



2019

# STRATEGI PENDANAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Dalam Rangka Pelaksanaan  
Wajib Belajar 12 Tahun





**STRATEGI PENDANAAN  
PENDIDIKAN MENENGAH:  
dalam Rangka Pelaksanaan  
Wajib Belajar 12 Tahun**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

# **Strategi Pendanaan Pendidikan Menengah: dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun**

## **Tim Peneliti :**

Catur Dyah Fajarini, SE, M.Si  
Ir. Siswantari, M.Sc.  
Novrian Perdana, SE, ME  
Fitri Juanita, S.Sos

ISBN 978-602-0792-43-9

## **Penyunting :**

Nur Berlian Venus Ali, MSE  
Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.  
Dra. Ida Kintamani Dewi, M.Sc

## **Tata Letak:**

Joko Purnama  
Genardi Atmadiredja

## **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,  
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA SAMBUTAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan membekali manusia untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang mengakibatkan hilangnya batas antar negara mengharuskan Indonesia menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri yang berkesempatan mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Kompetensi minimal yang dibutuhkan adalah lulusan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun perlu segera dilaksanakan agar semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal lulusan pendidikan menengah.

Penyelenggaraan Wajar 12 tahun membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar, sementara anggaran pendidikan sangat terbatas baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kajian Strategi Pendanaan Pendidikan Menengah dalam rangka Pelaksanaan Wajar 12 Tahun ini dilaksanakan untuk menjawab tentang berapa besar kebutuhan biaya penyelenggaraan Wajar 12 tahun dan bagaimana pemenuhannya. Berdasarkan hasil kajian diperoleh proyeksi besaran kebutuhan biaya operasional nonpersonalia pendidikan menengah dalam rangka penyelenggaraan Wajar 12 tahun

untuk 5 tahun ke depan, sejak tahun 2019 s.d. tahun 2023, serta opsi kebijakan dalam rangka mendanai kebutuhan biaya tersebut.

Semoga hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi *stakeholders* pendidikan dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan Wajar 12 tahun, khususnya dalam hal pendanaannya.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized name.

Muktiono Waspodu

## KATA PENGANTAR

Era globalisasi mengharuskan Indonesia menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar yang berkesempatan mengisi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri karena hilangnya batas antar negara. Selain itu, adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 dan di atas 64 tahun) semakin menguatkan perlunya penyelenggaraan wajib belajar (Wajar) 12 tahun agar menghasilkan tenaga kerja usia produktif, minimal lulusan pendidikan menengah.

Penyelenggaraan Wajar 12 tahun membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar, sementara anggaran pendidikan sangat terbatas baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sebelum Wajar 12 tahun dicanangkan, terlebih dahulu perlu dilakukan penghitungan kebutuhan biayanya. Seperti diketahui bahwa biaya pendidikan meliputi biaya investasi, operasional, dan personal atau biaya pribadi siswa. Biaya pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Orangtua, dan masyarakat. Mengingat besarnya lingkup biaya pendidikan tersebut maka studi ini hanya difokuskan untuk menghitung kebutuhan Biaya Operasi Nonpersonalia (BONP) pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan hasil kajian diperoleh proyeksi besaran kebutuhan BONP pendidikan menengah dalam rangka penyelenggaraan Wajar 12 tahun untuk 5 tahun ke depan, sejak tahun 2019 s.d. 2023, serta opsi kebijakan dalam rangka mendanai kebutuhan biaya tersebut.

Selanjutnya, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi *stakeholders* pendidikan dalam mendanai penyelenggaraan Wajar 12 tahun, khususnya BONP pada jenjang pendidikan menengah.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kebijakan yang akan dihasilkan .....	7
E. Sasaran .....	7
F. Keluaran .....	7
G. Ruang Lingkup/Batasan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Pendanaan Pendidikan.....	9
B. Jenis-jenis Biaya Pendidikan .....	10
C. Peran Pemerintah dan Orangtua dalam Pendanaan Pendidikan .....	12
D. Penghitungan BONP Pendidikan .....	21
E. Peran CSR dalam Pendidikan .....	27
F. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODOLOGI.....	33
A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Variabel dan Indikator.....	34
C. Sampel.....	36
D. Alat Pengumpul Data .....	37
E. Teknik Analisis.....	38

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	39
A. Profil Sekolah Sampel.....	39
B. Kebutuhan BONP .....	50
C. Besaran Biaya Operasional Pendidikan Nonpersonalia (BONP) di Sekolah Sampel.....	118
D. Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Nonpersonalia Wajar 12 tahun .....	126
E. Strategi Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Bermutu.....	132
BAB V SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN .....	153
A. Simpulan .....	153
B. Opsi Kebijakan .....	159
DAFTAR PUSTAKA .....	161

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Anak Usia 16–18 Tahun.....	6
Tabel 2. Tujuan, Variabel dan Indikator Penelitian.....	34
Tabel 3. Sampel Penelitian.....	36
Tabel 4. Profil Sekolah Sampel Kabupaten Klaten .....	41
Tabel 5. Profil Sekolah Sampel Kabupaten Gowa .....	44
Tabel 6. Profil Sekolah Sampel Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar .....	46
Tabel 7. Profil Sekolah Sampel Kota Balikpapan .....	48
Tabel 8. Profil Sekolah Sampel Kota Denpasar .....	49
Tabel 9. BONP di SMA Sampel Tahun 2017/2018.....	118
Tabel 10. BONP di SMK Sampel Tahun 2017/2018.....	122
Tabel 11. Satuan BONP SMA Tahun 2018 .....	126
Tabel 12. Proyeksi Kebutuhan BONP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2018-2023 (Dalam 000,-rupiah).....	128
Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan BONP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2018-2023 (Dalam 000,- rupiah).....	130
Tabel 9. Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan BONP dan BOS SMA dan SMK Tahun 2018-2023 (dalam 000,-rupiah).....	131

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Kerangka Berpikir .....	29
Grafik 2.	Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai per KK di SMKN 1 Trucuk.....	57
Grafik 3.	Proporsi Uji Kompetensi per KK di SMKN 1 Trucuk.....	57
Grafik 4.	Proporsi Bahan dan Alat per KK SMKN 1 Pedan .....	58
Grafik 5.	Proporsi Uji Kompetensi per KK SMKN 1 Pedan .....	59
Grafik 6.	Proporsi Bahan dan Alat per KK SMK Kristen 2 Klaten .....	60
Grafik 7.	Proporsi Uji Kompetensi per KK SMK Kristen 2 Klaten .....	60
Grafik 8.	Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai per KK SMK Krisda Klaten .....	61
Grafik 9.	Proporsi Uji Kompetensi/Prakerin per KK SMK Krisda .....	62
Grafik 10.	Proporsi Bahan dan Alat Khusus KK dan Uji Kompetensi per KK SMK PGRI Pedan.....	63
Grafik 11.	Proporsi Pengeluaran Biaya Uji Kompetensi per KK SMK PGRI Pedan .....	64
Grafik 12.	Proporsi Biaya Bahan dan Alat Khusus KK di SMKN 2 Gowa.....	69
Grafik 13.	Persentase Pengeluaran BONP menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 3 Gowa .....	70
Grafik 14.	Proporsi Biaya Bahan dan Alat menurut KK SMKN 3 Gowa.....	71

Grafik 15. Proporsi Biaya Uji Kompetensi/Prakerin di SMKN 3 Gowa.....	72
Grafik 16. Persentase Pengeluaran BONP menurut Komponen Biaya di SMKN 4 Gowa .....	73
Grafik 17. Proporsi Biaya Bahan dan Alat menurut KK SMKN 4 Gowa.....	74
Grafik 18. Proporsi Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMKN 4 Gowa.....	75
Grafik 19. Rata-rata BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA di Kabupaten Kampar.....	76
Grafik 20. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMA Negeri 1 Kampar .....	77
Grafik 21. Persentase Pengeluaran BONP di SMA Negeri 2 Kampar .....	78
Grafik 22. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMAN 3 Tapung Hulu.....	79
Grafik 23. Persentase Pengeluaran BONP di SMA Muhammadiyah Bangkinang .....	81
Grafik 24. Rata-Rata Persentase Pengeluaran BONP SMK menurut Sub Komponen Biaya, SMK di Kota Pekanbaru.....	82
Grafik 25. Persentase Pengeluaran BONP menurut sub Komponen Biaya di SMKN 1 Pekanbaru .....	83
Grafik 26. Persentase Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 1 Pekanbaru .....	84
Grafik 27. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 1 Pekanbaru.....	85
Grafik 28. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 2 Pekanbaru...	86
Grafik 29. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 2 Pekanbaru.....	87

Grafik 30. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 5 Pekanbaru ...	88
Grafik 31. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 5 Pekanbaru.....	90
Grafik 32. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 5 Pekanbaru.....	91
Grafik 33. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 7 Pekanbaru ...	92
Grafik 34. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 7 Pekanbaru.....	93
Grafik 35. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 7 Pekanbaru.....	94
Grafik 36. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Taruna Satria Pekanbaru.....	95
Grafik 37. Proporsi Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Taruna Satria Pekanbaru....	96
Grafik 38. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Taruna Satria Pekanbaru.....	97
Grafik 39. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Taruna Pekanbaru.....	98
Grafik 40. Persentase Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Taruna Pekanbaru ....	99
Grafik 41. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Taruna Pekanbaru .....	100
Grafik 42. Rata-rata BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA di Kota Balikpapan.....	101
Grafik 43. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMAN 4 Balikpapan.....	103

Grafik 44. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA Muhammadiyah 2 Al Mujahidin.....	104
Grafik 45. Persentase Rata-Rata BONP menurut Sub Komponen Biaya SMK di Kota Balikpapan .....	105
Grafik 46. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMK Negeri 1 Balikpapan ...	106
Grafik 47. Proporsi Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Negeri 1 Balikpapan .....	107
Grafik 48. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Negeri 1 Balikpapan.....	108
Grafik 49. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMK Syaichona Balikpapan.	109
Grafik 50. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Komponen Biaya di SMK Pangeran Antasari Balikpapan ...	110
Grafik 51. Persentase Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK, di SMK Pangeran Antasari Balikpapan .....	111
Grafik 52. Persentase Pengeluaran (BONP) Menurut Komponen Biaya di SMKN 5 Balikpapan.....	112
Grafik 53. Persentase Pengeluaran BONP menurut Komponen Biaya di SMAN 4 Denpasar.....	114
Grafik 54. Persentase Pengeluaran (BONP) Personalia Menurut Komponen Biaya SMKN 3 Denpasar..	115
Grafik 55. Proporsi Biaya Bahan dan Alat Menurut KK SMKN 3 Denpasar.....	116
Grafik 56. Proporsi Biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMKN 3 Denpasar .....	117
Grafik 57. BONP di SMA Sampel Tahun 2017/2018 .....	120
Grafik 58. BONP di SMK Sampel Tahun 2017/2018 .....	124



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Mekanisme pendanaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pendanaan perusahaan yang berorientasi *profit* atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (*non profit*). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

Menurut Suharsaputra (2013:288) pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan pendidikan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Sedangkan Thomas John (dalam Fatah, 2012:2) mengungkapkan dalam konsep pendidikan sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait di dalamnya yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan.

C. Benson dalam bukunya “George Psacharopoulos” mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan yaitu (1) adekuasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan, (2) efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan, dan (3) pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan.

Nawacita kelima dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, yang diterjemahkan ke dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemendikbud), salah satunya adalah “Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.” Peningkatan akses berarti tersedianya daya tampung pendidikan menengah yang mencukupi untuk menampung seluruh penduduk Indonesia dalam memperoleh layanan jenjang Pendidikan Menengah, khususnya penduduk pada usia pendidikan menengah, yaitu 16 s.d. 18 tahun. Layanan pendidikan menengah yang dimaksud adalah layanan pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka menyiapkan ketercukupan akses pendidikan menengah yang bermutu, pemerintah perlu melakukan kajian berapa banyak sumber daya pendidikan yang harus disiapkan dan berapa besar biaya yang dibutuhkan agar layanan pendidikan menengah dapat terselenggara dengan cukup dan bermutu. Ketercukupan layanan pendidikan ini disesuaikan dengan jumlah siswa pendidikan menengah yang harus

dilayani. Menurut Ghozali, dkk, 2004, sumber daya pendidikan dapat berbentuk natura (barang), pengetahuan, keahlian, waktu, tenaga, pengorbanan, peluang, maupun uang yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Biaya pendidikan adalah nilai uang dari seluruh sumber daya pendidikan tersebut dalam satu periode waktu.

Untuk mengetahui berapa besar biaya penyelenggaraan pendidikan menengah tersebut perlu dilakukan identifikasi sumber daya pendidikan yang di dalamnya juga termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya guna mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah. Setelah semua sumber daya pendidikan tersebut diidentifikasi, selanjutnya dapat dihitung besarnya biaya pendidikan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah yang cukup dan bermutu.

Kebutuhan sumber daya pendidikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan terjadi di lembaga pengelola pendidikan (pemerintahan), lembaga penyelenggara pendidikan (satuan pendidikan), dan rumah tangga. Implikasi biaya pendidikan di pemerintahan disebut biaya pengelolaan pendidikan, di satuan pendidikan (sekolah/madrasah) biaya penyelenggaraan pendidikan, dan di rumah tangga disebut biaya pribadi atau biaya personal peserta didik.

Indonesia sedang memasuki masa di mana penduduk usia produktifnya terus meningkat. Penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) persentasenya mengalami peningkatan, yakni dari 66,09 persen pada tahun 2010 menjadi 70 persen pada tahun 2016. Di sisi lain persentase penduduk usia tidak produktif menurun dari 33,11 persen pada tahun 2010 menjadi 30 persen pada tahun 2016. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap

turunnya rasio ketergantungan (bonus demografi) dan membuka jendela peluang dalam bidang ekonomi sebagai akibat melonjaknya penduduk usia produktif serta menurunnya penduduk usia tidak produktif. (BKKBN, 2013). Kondisi demografi Indonesia tersebut, dapat pula diartikan sebagai keadaan ekonomis yang dinilai menjadi jendela kesempatan “bonus demografi” sehingga akan membawa pada keuntungan (*demographic dividen*) atau bisa pula menjadi “beban demografi” (*demographic burden*). Hal ini terjadi bila penduduk usia produktif yang cukup besar ini tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk produktif.

Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup pelik terkait kependudukan terutama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di usia produktif. Hal ini terjadi bila penduduk usia produktif yang cukup besar ini tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk produktif. Oleh karena itu, kebijakan dalam RPJMN 2014-2019 adalah mengoptimalkan bonus demografi (Antarane.com, 2013). Bonus demografi ini harus dipersiapkan melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, keluarga berencana, dan ekonomi. Bonus demografi itu, bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi 10-15 persen.

Upaya memperluas akses jenjang pendidikan menengah telah dilakukan sejak Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun yang dinyatakan berhasil dengan pencanangan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tanggal 24 Juni Tahun 2013. Keberhasilan Wajar Dikdas 9 tahun tidak lepas dari peran pemerintah yang telah berkontribusi dalam pendanaan pendidikan, khususnya biaya operasional di sekolah dalam bentuk BOS dari pemerintah dan BOSDA dari

pemerintah daerah yang relatif telah dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional pendidikan dasar di sekolah. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana bantuan untuk siswa miskin/tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 untuk siswa usia 6 s.d. 21 tahun agar dapat memenuhi kebutuhan biaya pribadi siswa sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Berkiblat pada kesuksesan Wajar Dikdas 9 Tahun, metode tersebut juga diberlakukan pada penyelenggaraan PMU sebagai cikal bakal Wajar 12 tahun. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah mencapai 97 persen pada tahun 2020. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk mengikuti pendidikan menengah. Dalam pelaksanaan PMU, Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan dana operasional sekolah (BOS) per siswa per tahun dengan besaran *unit cost* Rp1.000,-.000,-,- per siswa per tahun. Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMA dan SMK Tahun 2016, besaran dana BOS adalah Rp1.400.000,-,- per siswa per tahun dan disalurkan melalui provinsi yang disalurkan ke rekening sekolah per triwulan dengan periode penyaluran Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember 2016. Kondisi demografi Indonesia tersebut, dapat pula diartikan sebagai keadaan ekonomis yang dinilai menjadi jendela kesempatan “bonus demografi” sehingga akan membawa pada keuntungan

(*demographic dividen*) atau bisa pula menjadi beban demografi (*demographic burden*).

Berdasarkan data Dapodik, proyeksi jumlah anak usia 16 – 18 tahun siswa pendidikan menengah tahun ajaran 2016/2017 s.d. tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Anak Usia 16–18 Tahun

No.	Tahun	Usia 16 -18 tahun	Tahun Ajaran	Siswa SM
1.	2016	13.276.000,-	2016/2017	10.802.979
2.	2017	13.305.400	2017/2018	11.210.195
3.	2018	13.359.500	2018/2019	11.544.473
4.	2019	13.398.700	2019/2020	11.928.699
5.	2020	13.414.500	2020/2021	12.390.628

Sumber: Dapodik 2018, data 2019-2020 diolah menggunakan proyeksi jumlah anak usia 16-18 tahun.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi data sekunder dan juga prioritas kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan nawacita terkait dengan peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah, perlu dilakukan kajian tentang kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan menengah, sumber pendanaannya dan pelibatan masyarakat atau publik untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan

menengah di Indonesia dalam rangka melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menghitung kebutuhan Biaya Operasi Nonpersonalia (BONP) dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu.
2. Merumuskan strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu melalui kontribusi pendanaan pendidikan dari masing-masing tingkat Pemerintahan, orangtua, dan masyarakat.

### **D. Kebijakan yang akan dihasilkan**

1. Kebijakan untuk mengoptimalkan potensi masyarakat mendukung kebutuhan biaya pendidikan menengah.
2. Kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari orangtua kurang mampu.

### **E. Sasaran**

Sasaran pada kajian ini adalah pendanaan pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK.

### **F. Keluaran**

Keluaran dari kajian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan tentang strategi pendanaan pendidikan menengah

yang merata dan berkualitas dalam rangka pelaksanaan Wajar 12 tahun.

### **G. Ruang Lingkup/Batasan**

Lingkup dari kajian ini adalah kebutuhan BONP dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pendanaan Pendidikan**

**K**ebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Dye, 2013). Pemerintah melakukan banyak hal seperti mengatur konflik dalam masyarakat, mendistribusikan bantuan kepada anggota masyarakat, memungut penerimaan negara. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat atau memungut pajak dilaksanakan sekaligus. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah dilaksanakan dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, salah satunya adalah bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan terkait dengan pendanaan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan meliputi penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dengan dua kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, di mana pendanaan pendidikan melibatkan kementerian lain (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia), pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah (OECD, 2015). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam pendanaan pendidikan merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur besarnya proporsi investasi kekayaan negara dalam bidang pendidikan (EACEA, 2013). PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan memiliki prinsip umum yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain prinsip umum, di dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 juga menyebutkan prinsip khusus yang menjadi pedoman pengelolaan dana pendidikan. Sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah.

## **B. Jenis-jenis Biaya Pendidikan**

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
3. Biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan yang dimaksud meliputi biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan dan non lahan pendidikan, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan nonpersonalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri dari

biaya investasi dan operasi. Sedangkan biaya personalia meliputi:

1. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  - b. Tunjangan yang melekat pada gaji pegawai pada satuan pendidikan;
  - c. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
  - d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
  - e. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
  - f. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
  - g. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  - h. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
  - i. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
2. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan yang melekat pada gaji;
  - c. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
  - d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

### **C. Peran Pemerintah dan Orangtua dalam Pendanaan Pendidikan**

Pendidikan sebagai proses berkembangnya peradaban manusia akan sangat membutuhkan adanya sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi dari pemangku kepentingan yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi input siswa, alat-alat pendukung, sarana dan prasarana, serta metode pembelajaran adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas dari *output* atau lulusan. Sedangkan pemangku kepentingan yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah diharapkan mempunyai visi yang sama serta dapat bersinergi sehingga akan mempermudah pencapaian tujuan baik itu secara akademis maupun pembentukan moral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dituntut untuk bekerja secara profesional. Indikator tingkat profesional guru mencakup empat hal yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Untuk mencapai keempat tingkat kompetensi tersebut selama ini ditempuh dengan cara konvensional antara lain melalui pelatihan dan penataran. Akan tetapi model konvensional tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang optimal karena materi pelatihan dan penataran belum tepat sasaran dan cenderung tidak melekat dan seringkali dilupakan begitu saja setelah sampai di sekolah.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap pendanaan pendidikan. Lembaga pendidikan yang

memiliki status Badan Hukum Pendidikan harus menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa subsidi dari negara. UU tersebut dibuat untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dari besarnya biaya pendidikan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2009, potensi meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua dan peserta didik cukup terbuka. Ditambahkan, dalam Pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orangtua siswa, dan pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

UU tersebut juga mengatur pembatasan kuota bagi pelajar berprestasi yang berhak memperoleh beasiswa pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total jumlah peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum. Pemerintah memang tidak melepas tanggung jawabnya secara langsung, namun bantuan yang akan diberikan hanya untuk kuota 20%, sehingga di luar kuota itu pemerintah tidak bertanggung jawab atas pendanaan pendidikannya.

Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan yang bermakna proses pembudayaan. Pendidikan yang demikian akan dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kutipan tersebut, sudah nampak jelas bahwa pemerintah negara republik merupakan pemerintah yang

menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Di antaranya, dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan, tetapi belum sepenuhnya merata, karena masih banyak anak di Indonesia yang masih tidak sekolah, karena kekurangan biaya. Kurangnya sosialisasi di masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kalau pemerintah sudah memberikan anggaran khusus seperti BOS, dan sekarang ini sudah dibebaskan biaya sekolah sampai dengan pendidikan dasar dan bantuan biaya operasional untuk pendidikan menengah, SMA dan SMK.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur pada Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Hal ini juga dipertegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan negara, karena kegiatan-kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pembiayaan pendidikan sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dalam bentuk anggaran rutin (DIK) dan anggaran pembangunan (DIP). Upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa terlepas dari upaya pemenuhan pendanaan pendidikan itu sendiri. Mengenai hal ini, Mulyasa berpendapat bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan salah

satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan (2004:47). Pendapat lainnya diungkapkan oleh Dedi Supriadi, yang menyatakan bahwa biaya (*cost*) memiliki pengertian yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang) (2001: 3).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka iuran siswa juga merupakan biaya pendidikan, demikian pula dengan sarana fisik, buku siswa dan buku guru juga merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan pendidikan (*educational finance*). Untuk membiayai penyelenggaraan program-program fungsional dan penunjangnya, sekolah juga menerima dana masyarakat dalam bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana lain yang jumlahnya relatif jauh lebih kecil daripada sumber-sumber dana pendidikan dari pemerintah. Persentase peranan dana masyarakat ini akan jauh lebih kecil lagi jika diperhatikan bahwa anggaran pembangunan yang selain untuk membiayai kegiatan investasi dan pengembangan, juga digunakan untuk membiayai program-program fungsional sekolah seperti

peningkatan kualitas guru. Sejak tahun 2005 pemerintah mengalokasikan dana operasional sekolah atau dana BOS. Kaitannya dengan pendanaan pendidikan, pemerintah sudah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur pendanaan pendidikan untuk sekolah dalam Pasal 46, 47, dan 48. Dalam Pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Dalam ayat (2) berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.” Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan: “Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PP.” Dengan demikian, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berkaitan dengan itu sekolah diharapkan mampu, sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya, untuk merancang berbagai program yang akan ditawarkan kepada masyarakat, menetapkan prioritas, dan membina/meningkatkan kerja sama dengan berbagai sumber dana yang potensial. Sangat penting bagi sekolah untuk mampu mengalokasikan sumber daya terutama dana secara efisien dan efektif, karena pada dasarnya dana bersifat terbatas.

Dalam Pasal 47 disebutkan:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebagaimana diketahui bahwa APBD setiap pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan melambatnya kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pendidikan. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha menyesuaikan dengan jumlah dana tersebut. Untuk mencapai jumlah dana pendidikan minimal 20% selain gaji sangat sulit diwujudkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kekurangannya dimintakan kepada masyarakat melalui pungutan-pungutan sekolah. Di sisi lain, pungutan yang dilakukan oleh sekolah melalui komite sekolah kepada wali murid atau calon wali murid memiliki kelemahan.

## 2. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Komite sekolah, sebagai perwakilan orangtua dan masyarakat, berupaya memperoleh dana pendidikan yang dipungut dari wali murid atau instansi melalui berbagai cara dengan menggunakan fasilitas sekolah. Dana yang diperoleh komite sekolah semestinya menjadi bagian dari dana

pendidikan yang pengelolaannya hendaknya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku yaitu diatur di dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 1 ayat (3) dalam PP ini berbunyi: “dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan”, dan dalam ayat (4) berbunyi: pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.” Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau wali peserta didik diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Dalam Pasal 47 “Peserta didik, orangtua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- 1) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar;
- 2) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar;

- 3) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar; dan
- 4) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Selanjutnya dalam Pasal 48 berisi “Tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai huruf e ditujukan untuk: a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas SNP.”

Adapun mengenai sumber pendanaan pendidikan diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan seterusnya hingga Pasal 57. Dalam Pasal 51 ayat (1) berbunyi “Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”, ayat (4) huruf c berbunyi “Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.” Dalam ayat (5) huruf c berbunyi: “Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Pasal 51 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c di atas berlaku untuk sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta berlaku Pasal 51 ayat (6) huruf d yang berbunyi “pungutan dari

peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.” Dalam ketiga ayat di atas ditegaskan bahwa pungutan dari masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 52 disebutkan “Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orangtua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) “Peserta didik atau orangtua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.” Pasal 55 ayat (2) “Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orangtua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.”

Kemudian, pengelolaan dana pendidikan diatur dalam Pasal 58, Pasal 59, dan seterusnya hingga Pasal 73. Pasal 63 ayat (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang belum

berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.”

Berdasarkan uraian Pasal-Pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan: sekolah selain wajib belajar diizinkan melakukan pungutan dana pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk SPP dan dana yang lain/hibah; penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana SPP dan dana lain/hibah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dalam setiap Pasal yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan selalu dikaitkan dengan kata dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal-Pasal dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 ini secara implisit menegaskan bahwa dana masyarakat yang diperoleh oleh sekolah yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan uang negara.

#### **D. Penghitungan BONP Pendidikan**

Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan biaya operasi. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Biaya pendidikan dalam standar ini hanya mencakup biaya operasi nonpersonalia.

Pada format analisis kebutuhan biaya operasional pendidikan memuat komponen-komponen barang/ bahan/ peralatan habis pakai/ kegiatan.

#### 1. Komponen Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

- a. Alat tulis sekolah (ATS) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan harga bahan/ATS/kantor/ administrasi.
- b. Daya dan/atau jasa (D/J) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan harga daya listrik, telepon, internet, gas kota/gas tabung, air bersih (PDAM).
- c. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan (BPPR) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah.
- d. Biaya transportasi (Transp) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah kegiatan, dan biaya transport di luar kantor.
- e. Biaya konsumsi (Kons) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah kegiatan, dan biaya konsumsi.
- f. Biaya asuransi (Asrns) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan biaya asuransi sarana dan prasarana dan pengguna/peserta didik/pendidik/warga sekolah.
- g. Pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (Pembsis) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan biaya kegiatan pramuka, kesenian, olah raga, lomba/promosi, PMI, Porseni, UKS, KIR, kegiatan kerohanian, dan peringatan hari besar nasional.

- h. Bahan dan alat habis pakai (BAHP) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan harga bahan/barang/alat habis pakai untuk menunjang kegiatan pembelajaran umum dan/atau khusus/praktik.
- i. Uji kompetensi/prakerin (UK/Prak) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan biaya penyelenggaraan ujian dan/atau Prakerin/magang guru.
- j. Pelaporan (Lap) adalah rincian kebutuhan jenis, jumlah, dan biaya pembuatan laporan sekolah pada periode bulanan dan tahunan.

## 2. Penentuan biaya per tahun

Perbedaan Kompetensi Keahlian (KK) pada pendidikan kejuruan akan berdampak pada kebutuhan bahan dan alat habis pakai yang berbeda antar KK. Oleh karena itu perlu dihitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia pendidikan kejuruan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan pemenuhan standar biaya operasi nonpersonalia. Penanggungjawab pemenuhan biaya operasi nonpersonalia secara bersama adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan.

Penentuan biaya per tahun dihitung berdasarkan analisis setiap komponen BOP dengan cara menentukan banyak kebutuhan setiap bahan/alat habis pakai/kegiatan untuk banyak siswa/pengguna/pelaku, dikali harga satuan bahan/alat habis pakai/kegiatan. Total biaya menggambarkan kebutuhan per KK dengan komposisi/kelas paralel 2 (dua), sehingga dapat diketahui banyak rombongan belajar (rombel). Untuk menentukan

biaya per siswa per tahun ditetapkan banyak siswa per rombel adalah 32 orang (ketentuan lama) atau 36 orang (kebijakan Dit. PSMK tahun 2017). Dengan membagi biaya per rombel dengan banyak siswa per rombel dapat diketahui kebutuhan biaya per siswa per tahun.

### 3. Standar Biaya Operasi

Standar biaya operasi ditentukan sebagai berikut.

- a. Standar biaya operasi nonpersonalia per KK, per rombongan belajar, dan per peserta didik dihitung dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan per komponen operasional nonpersonalia tahun berjalan penyelenggaraan pendidikan.

Standar biaya operasi nonpersonalia dihitung dengan menggunakan salah satu dari 3 (tiga) rumus sebagai berikut.

#### 1) Rumus A

Rumus A digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia tahun berjalan dengan mempertimbangkan setiap komponen operasional penyelenggaraan pendidikan.

$$BOP = \sum_{i=1}^M BK_i \times N_i \times V_i \times H_i$$

Keterangan:

BOP adalah biaya operasi nonpersonalia tahun berjalan,  $i$  adalah komponen biaya operasi yang dihitung,

M adalah jumlah komponen biaya operasi total sesuai dengan kebutuhan KK,

B<sub>ki</sub> adalah bobot komponen ke i terhadap komponen yang lain (diambil nilai 1, jika belum ditentukan),

N<sub>i</sub> adalah frekwensi komponen ke i,

V<sub>i</sub> adalah volume/kuantitas/jumlah komponen ke i, dan H<sub>i</sub> adalah harga komponen ke i.

## 2) Rumus B – Antar Daerah.

Rumus B digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia berdasarkan Standar Biaya Operasi nonpersonalia daerah lain.

$$BOP_i = BOP_j \times \frac{BOP_i}{BOP_j}$$

BOP<sub>i</sub> adalah Biaya Operasi nonpersonalia untuk suatu daerah i, i dan j adalah daerah yang berbeda lokasi, sedangkan IBP adalah Index Biaya Pendidikan untuk setiap kabupaten/kota atau kelompok

## 3) Rumus C – Antar Waktu.

Rumus C digunakan untuk menghitung Standar Biaya Operasi nonpersonalia tahun berjalan berdasarkan Biaya Operasi nonpersonalia tahun sebelumnya.

$$BOP_t = (BOP\ NVA)_t + (BOP\ NVA)_t$$

$$(BOP VA)_t = (BOP VA)_{t-1} \times PVA_t \times IN_t$$

$$(BOP NVA)_t = (BOP NVA)_{t-1} + IN_t$$

$BOP_t$  adalah Biaya Operasi nonpersonalia dari biaya pendidikan pada tahun berjalan.

$BOP_t$  yang terdiri atas  $(BOP VA)_t$  yaitu BOP valuta asing dan  $(BOP NVA)_t$  yaitu BOP non-valuta asing,

$PVA_t$  adalah perbandingan nilai valuta asing tahun  $t$  dibanding tahun  $t-1$ ,  $t$  adalah tahun berjalan,  $t-1$  adalah tahun sebelumnya, dan  $IN$  adalah nilai inflasi dalam setahun.

Nilai  $IN$  pada tahun sekarang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi.

- b. Standar biaya operasi nonpersonalia disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar untuk komponen impor dengan menggunakan nilai tukar valuta asing dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
- c. Standar biaya operasi nonpersonalia untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan indeks biaya pendidikan.

## **E. Peran CSR dalam Pendidikan**

Menurut Kotler dan Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Menurut *CSR Forum* (Wibisono, 2007) *CSR* didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

*CSR* adalah suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, sesuai kemampuannya, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial sekitar dimana perusahaan itu berada. Bentuk *CSR* bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *CSR* merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. *CSR* timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*.

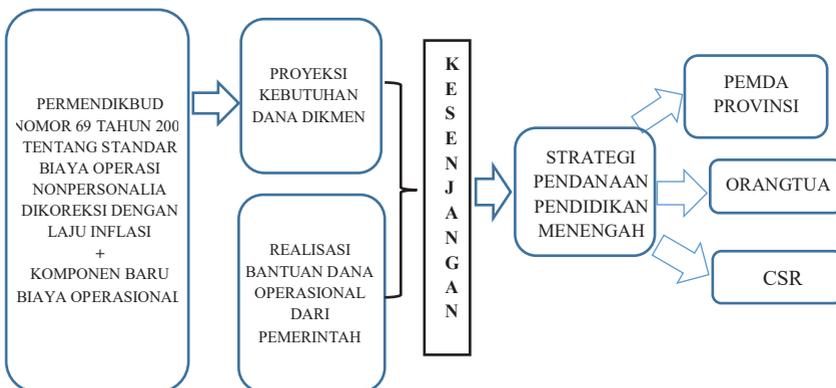
Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)). Keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena, apabila hal tersebut hanya dibebankan pada orangtua atau pemerintah, maka akan butuh waktu yang lama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan. Peran serta masyarakat atau pihak lain dalam peningkatan mutu pendidikan bahkan telah disinggung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 54. Peran serta tersebut meliputi peran serta organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Dea Cendani dan Tjiptohadi, 2012). *CSR* pada dunia pendidikan merupakan gerakan bersama secara nasional yang perlu dilakukan sebagai solusi alternatif di tengah perkembangan pendidikan di Indonesia. Berbagai implementasi *CSR* melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, pelaksanaan pelatihan, maupun pemberian kesempatan magang oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar

dalam pengembangan masyarakat. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, digambarkan dalam grafik berikut.



Grafik 1. Kerangka Berpikir

Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 69 Tahun 2009 telah menetapkan besarnya biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, baik per sekolah per tahun maupun per siswa per tahun yang dilengkapi dengan indeks biaya pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Besaran biaya satuan tersebut didasarkan pada pengeluaran biaya pendidikan tahun 2008, yaitu tahun dimana pengumpulan data untuk penghitungan biaya operasi dalam Permendikbud tersebut dilaksanakan. Dalam rangka menghitung besarnya

biaya satuan pendidikan baik per siswa maupun per sekolah untuk menghitung kebutuhan biaya operasi nonpersonalia tahun 2018 ke atas, besaran biaya satuan yang terdapat dalam Permendikbud tersebut perlu dikoreksi dengan laju inflasi dari tahun 2009 s.d. tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar penghitungan biaya operasi nonpersonalia pendidikan untuk tahun 2018 ke atas relatif akurat. Selain itu, komponen-komponen biaya pendidikan yang menjadi dasar perhitungan satuan biaya operasi nonpersonalia pada tahun 2008 tersebut perlu disesuaikan dengan komponen-komponen biaya operasi nonpersonalia yang dikeluarkan oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah tahun 2017, khususnya tambahan komponen biaya operasi nonpersonalia yang pada saat penghitungan tahun 2008, komponen biaya tersebut belum menjadi kebutuhan sekolah. Besaran satuan biaya operasi nonpersonalia yang telah dikoreksi dengan laju inflasi ditambah dengan komponen-komponen biaya baru yang ada di sekolah, selanjutnya dihitung untuk memperoleh satuan biaya operasi nonpersonalia yang baru. Kemudian satuan biaya baru tersebut dikalikan dengan proyeksi jumlah siswa pendidikan menengah di seluruh Indonesia untuk 5 tahun ke depan sehingga diperoleh data proyeksi kebutuhan biaya operasi nonpersonalia per siswa per tahun untuk 5 tahun ke depan.

Pendanaan pendidikan, khususnya untuk biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah sampai saat ini terdiri atas bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan BOSDA dari beberapa Pemda Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah memberikan bantuan dana untuk operasional pendidikan di sekolah. Bila perbandingan antara hasil proyeksi kebutuhan dana operasional pendidikan

dibandingkan dengan jumlah dana bantuan operasional yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah menghasilkan kesenjangan dimana dana yang diberikan lebih kecil daripada dana yang dibutuhkan maka perlu dilakukan terobosan bagaimana mendanai kebutuhan biaya operasional pada jenjang pendidikan menengah tersebut. Dalam rangka mencari solusi untuk mendanai kesenjangan kebutuhan biaya operasional pendidikan menengah, dilakukan kajian terhadap sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk mendanai kebutuhan biaya operasional pendidikan menengah tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian terhadap orangtua dan yang mewakili masyarakat yaitu dunia usaha untuk memperoleh kemungkinan adanya sumber dana yang dapat digunakan untuk menutup kesenjangan kebutuhan biaya operasional pendidikan menengah.

Keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejauh ini, potensi *CSR* dalam membantu mendanai pendidikan di Indonesia masih belum maksimal. Oleh karena itu masih ada potensi *CSR* untuk lebih diberdayakan membantu mendanai program pendidikan antara lain memberikan bantuan dana operasional pendidikan menengah secara terstruktur dan berkesinambungan. Dalam memanfaatkan potensi *CSR* ini perlu dilakukan kesepakatan antara Kemendikbud dengan dunia usaha yang tujuannya adalah menutup kesenjangan kebutuhan biaya operasional pendidikan menengah. Keterlibatan *CSR* dalam pendanaan kebutuhan biaya operasional pendidikan menengah ini akan

menjadi salah satu alternatif sumber dana di samping sumber dana lainnya yang sudah ada seperti BOS dari Pemerintah Pusat, BOSDA, dan kontribusi orangtua siswa yang mampu secara ekonomi. Dengan demikian seluruh siswa dapat memperoleh layanan pendidikan menengah yang bermutu.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

**S**tudi ini dilakukan untuk menemukan strategi pendanaan pelaksanaan pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder menyangkut kebutuhan BONP yang didasarkan pada data dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia di sekolah. Untuk verifikasi data dan pendalaman terhadap informasi terkait kebijakan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal pendanaan pendidikan, dilakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan potret sumber dana pendidikan menengah saat ini, baik di Pusat maupun di daerah.

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melaksanakan penghitungan standar BONP per sekolah, per rombongan belajar, dan per siswa yang akan digunakan untuk menghitung kebutuhan BONP pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajar 12 tahun. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan DKT dan wawancara dengan responden, dalam hal ini sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi. DKT dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang strategi penggalan dana. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengeluaran biaya operasi nonpersonalia SMA dan SMK.

## B. Variabel dan Indikator

Dalam kajian ini terdapat dua tujuan, yakni untuk:

1. Menghitung kebutuhan BONP dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu.
2. Merumuskan strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui kontribusi pendanaan pendidikan dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat.

Uraian variabel dan indikator dari kedua tujuan tersebut diatas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tujuan, Variabel dan Indikator Penelitian

<b>TUJUAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Menghitung kebutuhan BONP dalam penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu.	BONP	Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

TUJUAN	VARIABEL	INDIKATOR
2. Merumuskan strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui kontribusi pendanaan pendidikan dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat.	1. Pemerintah Pusat	a. BONP per siswa (BOS) b. Bantuan pemerintah lainnya
	2. Pemda Provinsi	a. BOSDA Provinsi b. <i>Bantuan Biaya Operasional (BOP)</i> c. Honor Guru Honorer
	3. Kontribusi biaya pendidikan dari orangtua	a. Iuran siswa dan jenis biaya pendidikan lainnya b. Sumbangan lainnya
	4. Kontribusi biaya pendidikan dari dunia usaha dan industri (DU/DI) dalam bentuk CSR	a. Beasiswa b. Bentuk lain

### C. Sampel

Sampel kajian dilakukan di 5 provinsi yang diambil dari 5 wilayah pulau/keulauan di Indonesia. Masing-masing satu provinsi dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi dipilih secara acak dan di masing-masing provinsi terpilih diambil masing-masing 4 SMA dan 6 SMK, yang terdiri atas 2 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta serta 3 SMK Negeri dan 3 SMK Swasta. Pemilihan sekolah sampel didasarkan pada sekolah yang memiliki siswa relatif banyak sehingga BONP yang dikeluarkan sekolah relatif lebih lengkap dan bervariasi. Diharapkan sekolah tersebut adalah sekolah yang memiliki layanan pendidikan yang cukup bermutu.

Tabel 3. Sampel Penelitian

No.	Provinsi	Kab/Kota	SMA	SMK
1	Riau	Kota Pekanbaru	4	6
2	Jawa Tengah	Kab. Klaten	4	6
3	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	4	6
4	Bali	Kota Denpasar	4	6
5	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	4	6

Responden studi meliputi kepala SMA/kepala SMK, Komite SMA/Komite SMK, dan dinas pendidikan provinsi. Instrumen DKT adalah pedoman DKT, sedangkan daftar isian digunakan untuk mendata tentang pengeluaran BONP sekolah. Untuk melengkapi daftar isian digunakan pedoman wawancara.

Pedoman DKT digunakan untuk menggali potensi sumber-sumber dana pendidikan yang berada di pemerintah daerah, orangtua, dan masyarakat, dalam hal ini CSR dari DU/DI. Data dan informasi tentang penggalian dana akan direkapitulasi untuk mendapatkan informasi tentang cara penggalian dana untuk menutupi kekurangan biaya operasi nonpersonalia dari sumber-sumber pendanaan yang ada.

#### **D. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan terdiri atas pedoman DKT dan daftar isian pembiayaan pendidikan menengah. DKT dilakukan dengan pejabat dinas pendidikan dan kepala sekolah. DKT dilakukan untuk memverifikasi data sekunder dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan strategi pendanaan jenjang pendidikan menengah. Sedangkan daftar isian digunakan untuk menjaring komponen biaya operasional jenjang pendidikan menengah yang belum termasuk dalam penghitungan biaya pendidikan yang tertera dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar biaya Operasional Pendidikan Nonpersonalia.

Instrumen penelitian disusun dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pendanaan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan isi (*content validity*) dari instrumen yang dikembangkan.

## **E. Teknik Analisis**

Data kebutuhan BONP pendidikan menengah, jumlah siswa pendidikan menengah, dan besaran kontribusi dana pendidikan menengah dari pemerintah, orangtua, dan DU/DI (*CSR*) dianalisis secara statistik deskriptif untuk melihat kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan dana pendidikan, serta daya tampung jenjang pendidikan menengah.

Data kualitatif yang diperoleh dari para informan dikelompokkan menurut kategori yang sama disertai dengan identitas sumber data yaitu dengan mengelompokkan komponen biaya di sekolah ke dalam kelompok dan jenis biaya pendidikan.

Berdasarkan informasi hasil diskusi dan analisis data sekunder dilakukan analisis lebih lanjut untuk dapat memperoleh strategi pendanaan jenjang pendidikan menengah.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN ANALISIS**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sekolah sampel tentang BONP di tiap sekolah sampel dengan menggunakan format isian tentang rincian komponen dan sub komponen BONP yang digunakan untuk mengumpulkan data pada saat penyusunan satuan BONP di sekolah dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai gambaran besaran satuan BONP di tiap sekolah sampel tahun ajaran 2017/2018. Selain itu, diperoleh juga data dan informasi tentang strategi pendanaan BONP Wajar 12 tahun dari pelaksanaan DKT di tiap kabupaten/kota sampel dengan peserta DKT meliputi pejabat terkait di Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah sampel.

Dalam rangka menghitung besaran kebutuhan BONP pelaksanaan Wajar 12 tahun dibutuhkan data sekunder yaitu: (1) Lampiran Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009; (2) Laju Inflasi Indonesia Tahun 2010 s.d. Tahun 2018; (3) Proyeksi jumlah siswa SMA dan SMK tahun 2019/2020 s.d. tahun 2023/2024.

#### **A. Profil Sekolah Sampel**

##### **1. Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah**

Menurut data pokok pendidikan, pada tahun 2018 Kabupaten Klaten memiliki 1.004 sekolah yang terdiri dari 783 SD, 114 SMP, 28 SMA, 55 SMK, dan 12 SLB.

Sejumlah sekolah tersebut memiliki rasio siswa per rombel sebesar 20,02 untuk jenjang SD, 30,33 untuk jenjang SMP, 27,2 untuk jenjang SMA, 28,12 untuk jenjang SMK, dan 4,6 untuk jenjang PLB. Selain capaian rasio siswa per rombel tersebut, untuk capaian rasio guru per rombel adalah sebagai sebesar 1,6 untuk jenjang SD, sebesar 2,17 untuk jenjang SMP, sebesar 2,29 untuk jenjang SMA, sebesar 1,79 untuk jenjang SMK dan sebesar 1,03 untuk jenjang PLB. Capaian pendidikan di Kabupaten Klaten tersebut mengindikasikan akses pendidikan di Kabupaten Klaten telah cukup baik. Jika akses pendidikan baik maka akan tercapainya kualitas SDM yang baik pula.

Sejalan dengan capaian akses pendidikan di Kabupaten Klaten di atas, berdasarkan hasil pengolahan data pada 9 sekolah sampel di Kabupaten Klaten, jumlah siswa terbanyak adalah sejumlah 1567 siswa yang berada di SMK Negeri 1 Trucuk yang terbagi dalam 45 rombel. Banyaknya jumlah siswa tersebut sejalan dengan program peningkatan akses pendidikan oleh pemerintah. Sayangnya banyaknya jumlah siswa tidak diimbangi dengan jumlah guru tetap yang tersedia. Di SMK Negeri 1 Trucuk masih membutuhkan 46 guru honorer dan 28 tendik honorer yang secara langsung membebani anggaran sekolah. Banyaknya jumlah guru dan tendik honorer tersebut diikuti oleh sekolah sampel lainnya. Sejumlah sekolah sampel rata-rata juga membutuhkan guru honorer sebanyak 7 hingga 46 guru, dan sebanyak 3 hingga 28 tendik honorer. Keberadaan tenaga honorer yang banyak akan menambah beban APBD. Berdasarkan informasi dari Menteri PAN dalam website nasional.kontan.co.id, bahwa pengangkatan tenaga honorer

akan menambah beban dalam APBD. "Pengangkatan tenaga honorer K2 akan membebani APBD tahun berjalan sekitar Rp8,4 triliun." Selanjutnya dalam upaya menekan jumlah tenaga honorer, menurut sumber dari website liputan6.com, menyatakan bahwa Pemerintah pusat akan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih melakukan rekrutmen tenaga honorer. Sebab, sejak UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan, tidak boleh ada lagi rekrutmen guru atau aparat sipil negara honorer, karena rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan kedua sumber tersebut jelas bahwa keberadaan honorer dapat membebani APBD, termasuk honorer yang ada di Kabupaten Klaten.

Tabel 4. Profil Sekolah Sampel Kabupaten Klaten

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMKN 1 Trucuk	A	1567	45	75	46	8	28
2	SMKN 1 Pedan	A	1038	30	40	25	2	14
3	SMK Kristen 2	A	134	8	14	8	5	4
4	SMK Krida	B	134	8	14	7	5	4
5	SMK PGRI Pedan	A	494	21	27	19	4	9
6	SMAN 1	A	1039	32	59	9	5	18

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
7	SMAN 2	A	1010	10	46	18	4	18
8	SMA Muhammadiyah 1	A	743	29	37	13	8	10
9	SMAIT Ibnu Abbas	A	364	13	4	30	0	3

## 2. Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut data pokok pendidikan pada tahun 2018 Kabupaten Gowa telah memiliki 596 sekolah yang terdiri dari 413 SD, 111 SMP, 48 SMA, 19 SMK, dan 6 SLB. Di antara sejumlah sekolah tersebut, memiliki rasio siswa per rombel sebesar 25 untuk jenjang SD, 31,05 untuk jenjang SMP, 30,76 untuk jenjang SMA, 28,49 untuk jenjang SMK, dan 3,41 untuk jenjang PLB. Selain capaian rasio siswa per rombel tersebut, untuk capaian rasio guru per rombel adalah sebagai berikut: sebesar 1,53 untuk jenjang SD, sebesar 1,86 untuk jenjang SMP, sebesar 1,46 untuk jenjang SMA, sebesar 1,12 untuk jenjang SMK dan sebesar 0,87 untuk jenjang PLB. Capaian pendidikan di Kabupaten Gowa tersebut mengindikasikan akses pendidikan di Kabupaten Gowa telah cukup baik. Jika akses pendidikan baik maka akan tercapainya kualitas SDM yang baik pula.

Membahas mengenai akses pendidikan di Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil pengumpulan data pada 10 sekolah sampel, jumlah siswa yang tertampung di sekolah bervariasi

antara 243 siswa hingga 1918 siswa. Capaian siswa tertinggi ada pada SMK Negeri 4 Kabupaten Gowa. Capaian siswa tertinggi berikutnya adalah di SMK Negeri 1, SMA Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK Negeri 3. Berdasarkan hasil DKT, banyaknya siswa yang tertampung di SMK ini merupakan salahsatu strategi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk meningkatkan percepatan keterserapan lulusan. Dengan banyaknya siswa lulusan SMK maka akan semakin banyak SDM berkualitas yang bekerja. Capaian ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mendukung pembangunan ekonomi, Kementerian Pendidikan Nasional membuat kebijakan yang signifikan tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 57,85%: 42,15% pada tahun 2007 dan menjadi 30%: 70% pada tahun 2014. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Capaian sejumlah siswa tersebut ternyata belum diimbangi keberadaan guru dan tendik tetap. Di Kabupaten Gowa, rata-rata membutuhkan guru honorer sebanyak 9 hingga 45 guru dan sebanyak 1 hingga 9 tendik honorer. Capaian jumlah guru honorer terbanyak ada pada SMK Negeri 1 (45 tendik) dan jumlah tendik honorer terbanyak ada pada SMA PGRI Sungguminasa (9 tendik). Masih banyaknya kebutuhan tenaga honorer ini harus segera diatasi agar tidak terjadi beban anggaran sekolah secara berkelanjutan yang akhirnya juga berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran akibat pergeseran penggunaan dana untuk membayar tenaga honorer.

Tabel 5. Profil Sekolah Sampel Kabupaten Gowa

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMKN 1	A	1503	47	45	45	6	4
2	SMKN 2	A	1185	40	47	22	6	4
3	SMKN 3	A	1002	31	41	19	3	8
4	SMKN 4	A	1918	63	76	38	6	1
5	SMKN Soba Opu	A	619	21	10	38	0	7
6	SMK Garudaya Bontonompo	B	411	11	7	28	0	4
7	SMAN 1	A	1417	48	53	29	5	4
8	SMAN 3	A	1002	31	41	19	3	8
9	SMA PGRI Sungguminasa	B	243	7	11	9	11	9
10	SMA YAPIP Sungguminasa	A	351	36	10	21	0	2

### **3. Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**

Secara administratif, Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota yaitu kabupaten Bengkalis, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Kampar, kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sejalan dengan capaian provinsi, pada data pokok pendidikan tahun 2018 dapat diketahui bahwa Provinsi Riau telah memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah sebanyak 674 satuan pendidikan, yang terdiri dari 376 SMA dan 298 SMK. Dari 376 satuan pendidikan SMA terdiri dari 147 SMA Negeri dan 229 SMA swasta, sedangkan dari 298 satuan pendidikan SMK terdiri dari 123 SMK Negeri dan 175 SMK Swasta.

Mengenai akses pendidikan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, berdasarkan hasil pengumpulan data pada 10 sekolah sampel, jumlah siswa yang tertampung di sekolah bervariasi antara 150 siswa hingga 2308 siswa. Jumlah siswa tertinggi ada pada SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru, secara berurutan disusul oleh SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru, SMK Negeri 5 Kota Pekanbaru, SMK Negeri 1 Kota Pekanbaru, SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru, SMA Negeri 1 Kampar, SMK Taruna Kota Pekanbaru, SMK Taruna Satria Kota Pekanbaru, SMA Negeri Tapung Hulu, SMA Negeri 2 Kampar dan SMA Muhammadiyah Bangkinang.

Berdasarkan hasil DKT yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, diperoleh informasi bahwa banyaknya siswa yang tertampung di SMK ini merupakan

salah satu strategi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk meningkatkan percepatan keterserapan lulusan. Dengan banyaknya siswa lulusan SMK maka akan semakin banyak ketersediaan SDM berkualitas yang siap bekerja.

Berdasarkan hasil DKT juga diketahui bahwa status akreditasi SMK baik negeri maupun swasta rata-rata A sedangkan untuk SMA masih ada 2 yang berakreditasi B. Untuk jumlah siswa terbanyak yaitu SMK Negeri 2 Pekanbaru, yang memiliki banyak guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer. Guru honorer mencapai 81 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 44 orang.

Tabel 6. Profil Sekolah Sampel Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar

No	Nama Sekolah	Akreditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMAN 1 Kampar Riau	A	867	25	53	8	11	7
2	SMAN 2 Kampar Kiri Tengah Riau	B	158	7	4	18	0	3
3	SMAN 3 Tapung Hulu (SMAS LKMD Sukaramai) Riau	B	376	11	6	19	0	5
4	SMAS Muhammadiyah Bangkinang Riau	A	150	6	11	17	0	8

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honoror	Tetap	Honoror
5	SMK Taruna Pekanbaru Riau	A	659	8	30	27	6	9
6	SMK Taruna Satria Pekanbaru Riau	A	630		1	32	0	0
7	SMKN 1 Pekanbaru Riau	A	1153	35	60	21	3	9
8	SMKN 2 Pekanbaru Riau	A	2308	71	102	81	4	44
9	SMKN 7 Pekanbaru Riau	A	1095	35	25	46	3	24
10	SMKN 5 Pekanbaru Riau	A	1535	53	75	41	5	24

#### 4. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Pada Tabel 4.4. terlihat bahwa semua (3) SMA sampel semua berakreditasi A. Jumlah siswa tertinggi adalah di SMAN 4 dan jumlah siswa terendah di SMA Muhammadiyah 2. Sejalan dengan jumlah siswa, jumlah rombel tertinggi sebanyak 30, dengan jumlah siswa per rombel 36 orang, sementara di SMA Muhammadiyah 2 sebanyak 27 orang dan di SMA Patra Dharma 26. Dengan demikian jumlah siswa per rombel di SMA negeri 4 adalah yang tertinggi. Kondisi tenaga guru di SMAN 4, dilihat dari status kepegawaiannya relatif bagus karena jumlah guru honorer hanya 10%, sementara di SMA Muhammadiyah 2 mencapai 45,72% dan di SMA Patra Dharma 34,62%. Sedangkan kondisi tendik di SMAN 4 kurang baik, karena

jumlah tenaga honorernya mencapai 80%, sementara di SMA Muhammadiyah 2 sebesar 71,43% dan di SMA Patra Dharma sebesar 37,5%.

Tabel 7. Profil Sekolah Sampel Kota Balikpapan

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMAN 4 Balikpapan	A	1070	30	45	5	3	12
2	SMA Muhammadiyah 2, Balikpapan	A	372	14	19	16	2	5
3	SMA Patra Dharma	A	689	27	34	18	5	3
4	SMKN 1 Balikpapan	A	2073	92	106	23	8	27
5	SMKN 5 Balikpapan	A	999	31	49	17	4	19
6	SMK Syaichona Cholil	-	32	3	3	8	1	0
7	SMK Airlangga	-	291	18	22	14	14	0
8	SMK Pangeran Antasari	A	249	8	4	30	0	4

## 5. Kota Denpasar, Provinsi Bali

Pada Tabel 4.5. terlihat bahwa semua (4) SMA sampel berakreditasi A. Jumlah siswa tertinggi adalah di SMA Kristen Harapan dan jumlah siswa terendah di SMA Santo Yoseph. Jumlah rombel tertinggi sebanyak 46, dengan jumlah siswa per rombel 23 orang. Sementara di SMAN 1 sebanyak 38 orang, di SMA Santo Yoseph dengan jumlah

siswa per rombel 37 orang dan di SMA Kristen Harapan jumlah siswa per rombel 41 orang. Artinya jumlah siswa per rombel tertinggi terjadi di SMA Kristen Harapan. Kondisi tenaga guru dilihat dari status kepegawaiannya kurang menggembirakan, karena tingginya proporsi jumlah guru honorer, tertinggi mencapai 62,71% dan terendah 6,35. Untuk kondisi tendik, di SMAN kurang baik karena jumlah tenaga honorernya mencapai 70%, dan di SMA Kristen Harapan juga tinggi yakni 42,86%.

*Tabel 8. Profil Sekolah Sampel Kota Denpasar*

No	Nama Sekolah	Akre- ditasi	Siswa	Rombel	Guru		Tendik	
					Tetap	Honorer	Tetap	Honorer
1	SMAN 1 Denpasar	A	1330	35	48	19	12	28
2	SMAN 4 Denpasar	A	1045	46	40	33	0	0
3	SMA Santo Yoseph	A	1219	33	59	4	0	0
4	SMA Kristen Harapan	A	1367	33	22	37	4	3
5	SMKN 3 Denpasar	-	436	14	48	44	9	26
6	SMKN 5 Denpasar	A	1626	48	63	36	5	25

## B. Kebutuhan BONP

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai bentuk tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam satuan pendidikan. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah tetapi menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas tinggi, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (pemerintah, orangtua siswa, atau masyarakat) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikeluarkan oleh siswa selama belajar.

Dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya, mempersyaratkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi: 1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, biaya pendidikan di sekolah mencakup biaya pengelolaan pendidikan di pemerintahan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri atas BONP, antara lain ATS, bahan dan alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan ringan, transportasi, konsumsi, asuransi, pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, dan pelaporan. Biaya operasional personalia meliputi gaji dan tunjangan pendidik, gaji dan tunjangan tendik. Biaya investasi sarana dan prasarana terdiri atas lahan, taman, lapangan olah raga, lapangan upacara, bangunan, jaringan, perabot, peralatan, media pendidikan dan lain-lain. Biaya investasi sumber daya manusia mencakup pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya pribadi peserta didik terdiri atas biaya pendaftaran, SPP, komite, praktek, OSIS, ujian, bahan belajar, pakaian sekolah, buku, alat tulis, kursus, transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan formal, besar biaya yang dibutuhkan oleh masing-

masing sekolah dan tingkat satuan pendidikan bervariasi tergantung besar kecilnya sekolah dan lokasi tempat sekolah tersebut berada. Selain itu, besar kecilnya biaya sekolah bervariasi berdasarkan tingkat kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah termasuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Kebutuhan biaya pribadi siswa juga tergantung lokasi dan kualitas sekolah. Sekolah yang berkualitas baik tentu memerlukan biaya yang besar, sebaliknya sekolah yang berkualitas buruk walaupun jumlah siswanya banyak biayanya juga tidak sebesar biaya di sekolah yang berkualitas baik. Letak sekolah juga berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya termasuk biaya pribadi siswa. Biaya sekolah yang berada di pedesaan atau di daerah terpencil berbeda dengan biaya sekolah yang ada di perkotaan. Dengan demikian lokasi dan kualitas sekolah sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya pendidikan, khususnya biaya pribadi siswa.

Berdasarkan kondisi sekolah tersebut, maka alokasi pembiayaan pendidikan tidak bisa disamaratakan. Di samping itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya sekolah. Berikut ini disampaikan capaian alokasi penggunaan biaya pendidikan di sekolah.

## **1. Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah**

### **a. SMA**

SMA sampel di Kabupaten Klaten berjumlah 4 sekolah, 2 SMA negeri dan 2 SMA swasta. Anggaran BONP di SMA yang terbesar digunakan untuk daya dan jasa (44%). Dalam komponen daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya. Adanya penggunaan terbesar

komponen ini sebenarnya telah sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0 yang mana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran sudah berbasis teknologi.

Selanjutnya penggunaan terbesar kedua adalah untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (27%). Penggunaan yang besar pada komponen ini karena gedung dan alat pembelajaran mengalami depresiasi setiap tahunnya sehingga memerlukan pemeliharaan dan perbaikan agar fungsinya dapat dimaksimalkan. Hal yang cukup memprihatinkan dalam penggunaan anggaran ini adalah kecilnya penggunaan anggaran untuk kebutuhan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler yang hanya sebesar 3%. Hal ini perlu diubah agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Rincian BONP di tiap SMA sampel di Kabupaten Klaten.

### **1) SMA Negeri 1 Klaten**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp3.057.544.000,-. Besaran dana tersebut termasuk untuk pembelian komputer dan sejenisnya. Anggaran BONP di SMA Negeri 1 Klaten yang terbesar digunakan untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (45%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Besarnya komponen penggunaan dana untuk pembinaan siswa telah sesuai dengan juknis BOS Pusat dan telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kualitas siswa.

## **2) SMA Negeri 2 Klaten**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp719.750.000,-. Anggaran BONP di SMA Negeri 2 Klaten yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (49%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

## **3) SMA Muhammadiyah 1 Klaten**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp497.957.000,-. Anggaran BONP di SMA Muhammadiyah 1 Klaten yang terbesar digunakan untuk daya dan jasa (44%). Besarnya komponen penggunaan dana ini karena sekolah telah menerapkan keunggulan teknologi (jaringan internet) sehingga kebutuhan akan daya dan jasa terkait listrik, internet, telepon dan sejenisnya lebih banyak daripada komponen lainnya. Adanya penggunaan terbesar komponen ini sebenarnya telah sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, yang mana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran sudah berbasis teknologi.

#### 4) SMA IT Ibnu Abbas Klaten

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp194.920.000,-. Anggaran BONP di SMA IT Ibnu Abbas yang terbesar digunakan untuk ATS (38%), kemudian pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (34%), dan daya dan jasa (24%). Besarnya komponen penggunaan dana ini karena sekolah membelanjakan alat tulis yang dibagikan kepada siswanya sehingga para siswa memperoleh buku tulis dan pedoman dari sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan alat penunjang pembelajaran agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi sekolah.

#### b. SMK

Anggaran BONP di SMK yang terbesar digunakan untuk daya dan jasa (27%). Dalam komponen daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya. Adanya penggunaan terbesar komponen ini sebenarnya telah sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, yang mana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran sudah berbasis teknologi. Selanjutnya penggunaan terbesar kedua adalah untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (21%). Penggunaan yang besar pada komponen ini agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik.

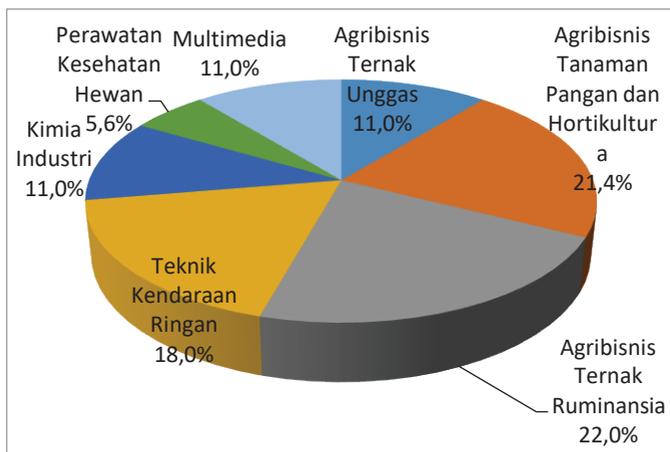
## 1) SMK Negeri 1 Trucuk

Anggaran BONP di SMK Negeri 1 Trucuk yang terbesar digunakan untuk bahan, alat khusus KK dan Uji Prakerin (30%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam hal prakerin. Adapun tujuan Prakerin antara lain: melatih dan mengasah keterampilan siswa dalam dunia kerja, menambah pengetahuan siswa tentang dunia kerja, membentuk mental siswa dan memberi motivasi agar serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita, dan menambah kreativitas siswa untuk mengembangkan bakat dan minat.

Pengeluaran BONP di SMK yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar yang utama adalah biaya untuk kegiatan praktik dan uji kompetensi. Kebutuhan biaya untuk praktik yang terbesar adalah untuk menyiapkan bahan dan alat habis pakai. Persentase BONP yang digunakan untuk penyediaan bahan dan alat habis pakai di SMK Negeri 1 Trucuk khusus untuk kegiatan praktik adalah sebesar 30% dari seluruh pengeluaran BONP di SMK ini. Biaya ini terbagi untuk 7 KK yang diselenggarakan di sekolah ini secara proporsional. Proporsi biaya bahan dan alat habis pakai untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik. berikut.

Grafik 2. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai per KK di SMKN 1 Trucuk

Sementara itu, proporsi biaya uji kompetensi untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik berikut.

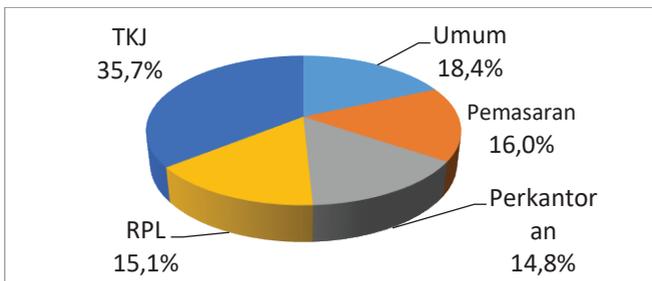


Grafik 3. Proporsi Uji Kompetensi per KK di SMKN 1 Trucuk

## 2) SMK Negeri 1 Pedan

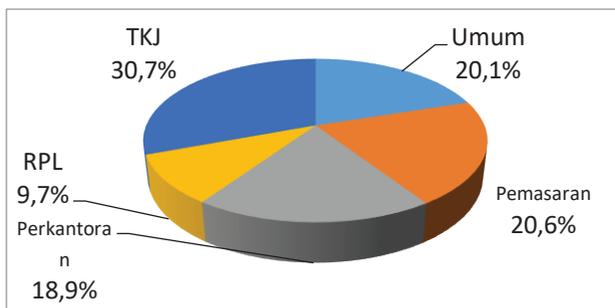
Anggaran BONP di SMK Negeri 1 Pedan yang terbesar digunakan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan (28%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Pengeluaran BONP di SMK yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar yang utama adalah biaya untuk kegiatan praktik dan uji kompetensi. Kebutuhan biaya untuk praktik yang terbesar adalah untuk menyiapkan bahan dan alat habis pakai. Persentase BONP yang digunakan untuk penyediaan bahan dan alat habis pakai di SMK Negeri 1 Pedan sangat kecil yaitu hanya 1%. Biaya ini terbagi untuk 5 KK yang diselenggarakan di sekolah ini. Proporsi biaya bahan dan alat habis pakai untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 4. Proporsi Bahan dan Alat per KK SMKN 1 Pedan

Sementara itu, persentase pengeluaran BONP yang digunakan untuk kegiatan Uji Kompetensi adalah sebesar 6% yang dialokasikan untuk 5 KK. Proporsi biaya uji kompetensi untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik berikut.



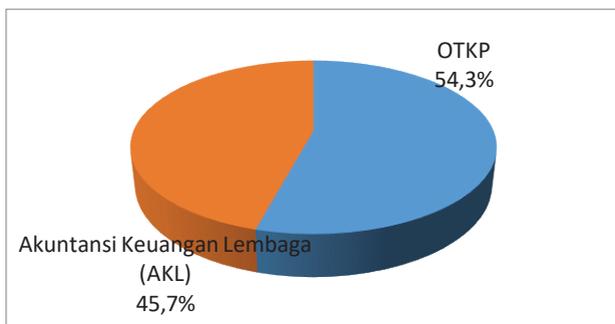
Grafik 5. Proporsi Uji Kompetensi per KK SMKN 1 Pedan

### 3) SMK Kristen 2 Klaten

Anggaran BONP di SMK Kristen 2 yang terbesar digunakan untuk biaya daya dan jasa (26%). Besarnya komponen penggunaan dana ini karena sekolah telah menerapkan keunggulan teknologi (jaringan internet) sehingga kebutuhan akan daya dan jasa terkait listrik, internet, telepon dan sejenisnya lebih banyak daripada komponen lainnya. Adanya penggunaan terbesar komponen ini sebenarnya telah sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, yang mana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran sudah berbasis teknologi.

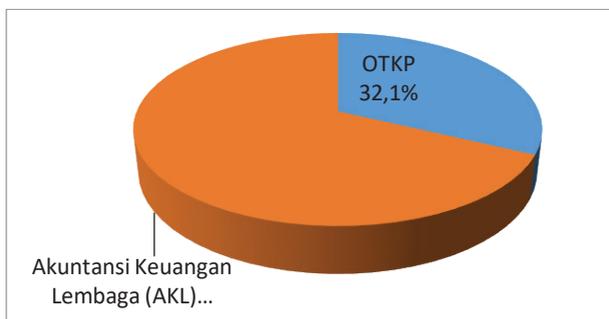
Persentase BONP yang digunakan untuk penyediaan bahan dan alat habis pakai khusus KK di SMK Kristen 2 Klaten adalah sebesar 6%. Biaya ini terbagi untuk 2 KK

yang diselenggarakan di sekolah ini. Proporsi biaya bahan dan alat habis pakai khusus KK untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik 4.14. berikut.



Grafik 6. Proporsi Bahan dan Alat per KK SMK Kristen 2 Klaten

Sementara itu, persentase pengeluaran BONP yang digunakan untuk kegiatan Uji Kompetensi cukup besar yaitu sebesar 17% yang dialokasikan untuk 2 KK. Proporsi biaya uji kompetensi untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik berikut.

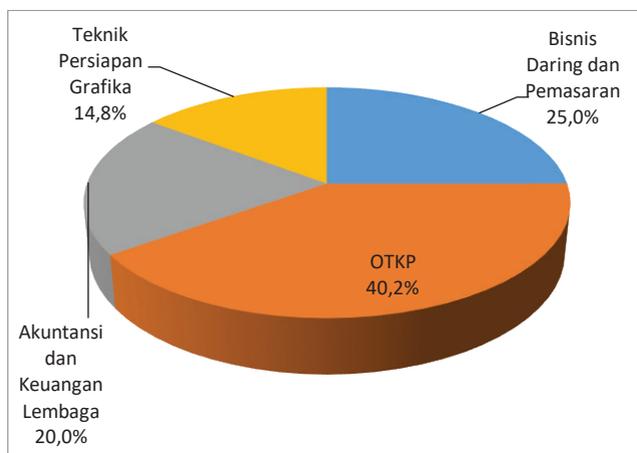


Grafik 7. Proporsi Uji Kompetensi per KK SMK Kristen 2 Klaten

#### 4. SMK Krisda

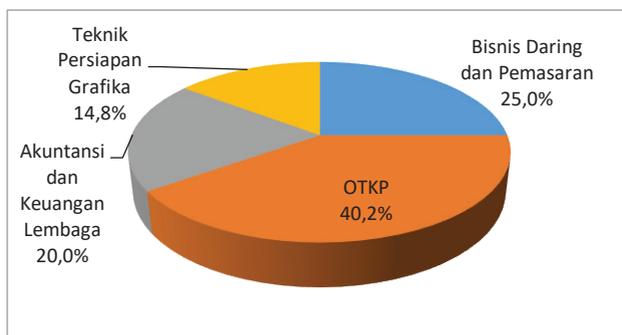
Anggaran BONP di SMK Krisda yang terbesar digunakan untuk bahan, alat khusus KK dan Uji Prakerin (34%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam hal Prakerin.

Alokasi biaya bahan dan alat khusus KK dan Uji Kompetensi secara proporsional untuk 4 KK yang diselenggarakan di sekolah ini, yaitu 40,2% untuk KK OTKP yang diikuti dengan KK Bisnis Daring dan Pemasaran sebesar 25%, dan KK Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebesar 20%. Proporsi biaya untuk masing-masing KK tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 8. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai per KK SMK Krisda Klaten

Sementara itu, alokasi biaya untuk kegiatan Uji Kompetensi memiliki proporsi yang sama dengan alokasi biaya bahan dan alat khusus praktik, yang secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.



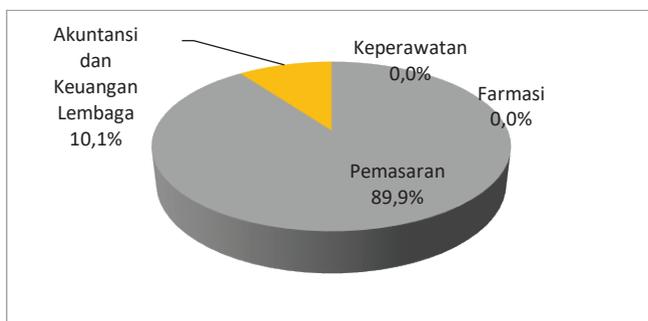
Grafik 9. Proporsi Uji Kompetensi/Prakerin per KK SMK Krisda

## 5) SMK PGRI Pedan

Anggaran BONP di SMK PGRI Pedan yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (39%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

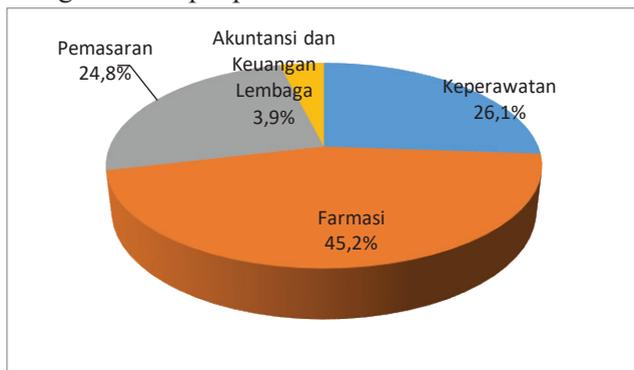
Alokasi biaya bahan dan alat khusus KK dan Uji Kompetensi untuk 4 KK yang diselenggarakan di sekolah ini, hanya 7% dari total pengeluaran BONP di

sekolah ini. Adapun biaya tersebut dialokasikan hanya untuk 2 KK yaitu Pemasaran sebesar 89,9% dan Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebesar 10,1%. Sedangkan untuk kedua KK lainnya, yaitu Farmasi dan Keperawatan tidak dialokasikan sama sekali. Ada kemungkinan biaya praktik dan uji kompetensi untuk kedua KK ini ditanggung oleh orangtua siswa. Proporsi biaya untuk masing-masing KK tersebut dapat dilihat pada Grafik 4.20. berikut.



Grafik 10. Proporsi Bahan dan Alat Khusus KK dan Uji Kompetensi per KK SMK PGRI Pedan

Adapun proporsi biaya Uji Kompetensi untuk masing-masing KK terdapat pada Grafik berikut.



Grafik 11. Proporsi Pengeluaran Biaya Uji Kompetensi per KK SMK PGRI Pedan

Proporsi Pengeluaran Biaya Uji Kompetensi per KK di SMK PGRI Pedan, porsi terbesar adalah untuk uji kompetensi KK Farmasi, yaitu sebesar 45,2% dan porsi terkecil adalah KK Akuntansi dan Keuangan Lembaga yaitu sebesar 3,9%. Hal ini sudah tepat karena biaya praktik siswa untuk KK Farmasi memang jauh lebih mahal karena bahan praktiknya berupa obat-obatan. Sementara kebutuhan bahan praktik yang bersifat habis pakai untuk KK Akuntansi hampir tidak ada.

## **2. Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan**

### **a. SMA**

Snggaran BONP di SMA yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (51%). Penggunaan yang besar pada komponen ini meliputi pengecatan tembok, pagar, penyediaan alat kebersihan, dan sebagainya yang digunakan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan fungsi media pembelajaran tetap baik. Komponen penggunaan dana yang terbesar adalah untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (14%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Besarnya komponen penggunaan dana untuk pembinaan siswa telah sesuai dengan juknis BOS Pusat dan telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kualitas siswa.

#### **1) SMA Negeri 1 Gowa**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp2.503.160.000,-. besarnya dana tersebut karena untuk pengadaan laptop, CCTV, *computer server* dan sejenisnya. Anggaran BONP di SMA Negeri 1 Gowa yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (49%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

## **2) SMA PGRI Sungguminasa**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp302.725.854. Anggaran BONP di SMA PGRI Sungguminasa yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (32%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

## **3) SMA YAPIP**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp633.430.000,-. Anggaran BONP di SMA YAPIP yang terbesar digunakan untuk ATS (34%). Besarnya komponen penggunaan dana ini karena sekolah membelanjakan alat tulis yang dibagikan kepada siswanya sehingga para siswa memperoleh buku tulis dan pedoman dari sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan alat penunjang pembelajaran agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi sekolah.

#### **4) SMA Negeri 3 Gowa**

Jumlah dana yang digunakan oleh sekolah sebesar Rp595.635.600. Anggaran BONP di SMA Negeri 3 Gowa yang terbesar digunakan untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (48%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Besarnya komponen penggunaan dana untuk pembinaan siswa telah sesuai dengan juknis BOS Pusat dan telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kualitas siswa.

#### **b. SMK**

Rata-rata penggunaan anggaran BONP di SMK yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (74%). Adanya penggunaan terbesar komponen ini karena gedung dan banyaknya alat praktikum pembelajaran yang membutuhkan perawatan dan juga karena mengalami depresiasi setiap tahunnya sehingga memerlukan pemeliharaan dan perbaikan agar fungsinya dapat dimaksimalkan. Penggunaan dana terbesar berikutnya adalah untuk kebutuhan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler (11%). Hal ini sangat diperlukan agar siswa diberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik.

## **1) SMK Negeri 1 Gowa**

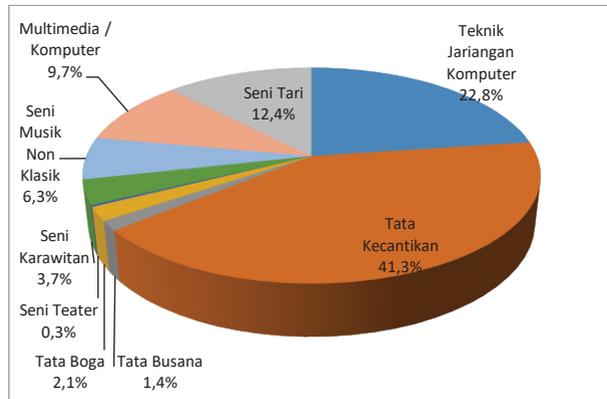
Anggaran BONP di SMK Negeri 1 Gowa yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan serta Daya dan Jasa, masing-masing 18%. Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang banyak melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki sekolah benar-benar dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak mengganggu kegiatan/proses pembelajaran di sekolah. Sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dengan harapan hasilnya pun maksimal. Proporsi terbesar kedua adalah untuk sub komponen bahan dan alat habis pakai sebesar 14%. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan baik karena bahan dan alat yang dibutuhkan cukup tersedia.

## **2) SMK Negeri 2 Gowa**

Anggaran BONP di SMK Negeri 2 Gowa yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (43,4%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena kondisi aset sekolah membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan yang cukup banyak dan bila pemeliharaan dan perbaikan aset tidak dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar. Sementara itu, pengeluaran BONP terbesar kedua adalah untuk biaya bahan dan alat khusus KK sebesar 22%, sedangkan biaya untuk Uji

Kompetensi/Prakerin adalah sebesar 7,5%. Biaya selanjutnya yang digunakan langsung untuk proses pembelajaran adalah pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebesar 6,2%.

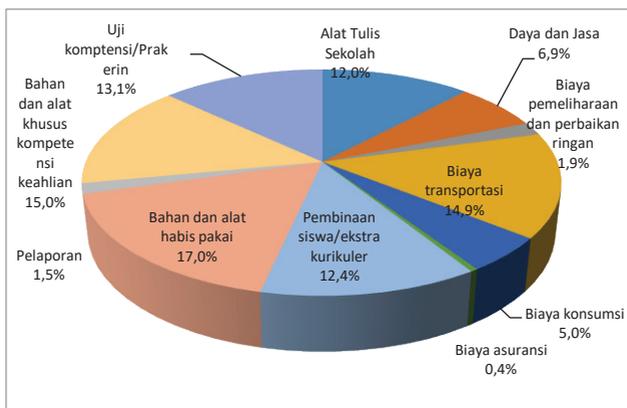
Biaya bahan dan alat khusus KK digunakan untuk membiayai kegiatan praktik 9 KK dan proporsi terbesar untuk KK Tata Kecantikan yaitu 41,3%. Secara rinci proporsi Biaya Bahan dan Alat Khusus KK dapat dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 12. Proporsi Biaya Bahan dan Alat Khusus KK di SMKN 2 Gowa

Persentase pengeluaran Biaya Uji Kompetensi/ Prakerin sebesar 7,5% juga digunakan untuk membiayai kegiatan Uji Kompetensi 9 KK, namun data proporsi biaya untuk masing-masing KK tidak diperoleh dari sekolah.

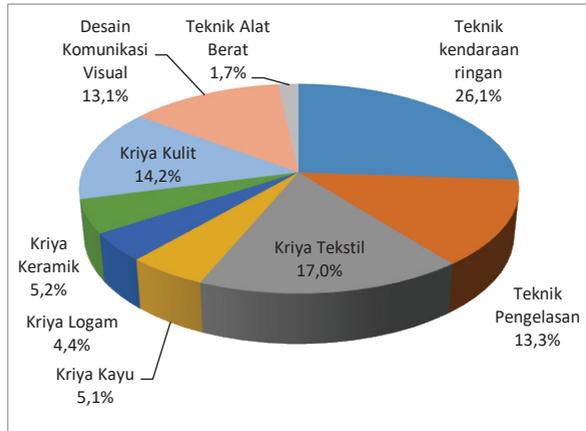
### 3) SMK Negeri 3 Gowa



Grafik 13. Persentase Pengeluaran BONP menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 3 Gowa

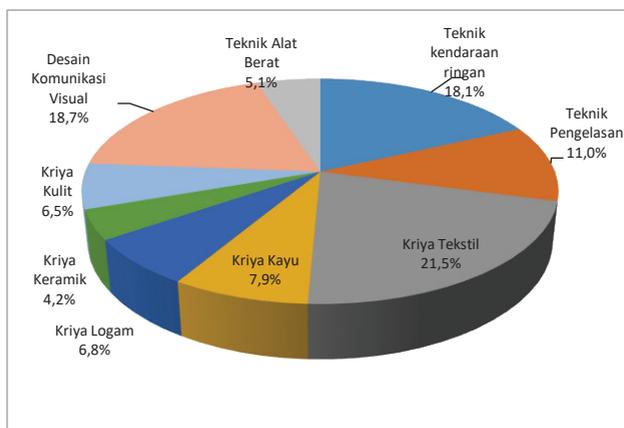
Berdasarkan Grafik di atas, anggaran BONP di SMK Negeri 3 Gowa yang terbesar digunakan untuk biaya Bahan dan Alat Habis Pakai sebesar 17%. Persentase untuk Sub Komponen BONP lainnya cukup proporsional. Sub Komponen Biaya yang langsung untuk proses pembelajaran adalah biaya Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 15%, Biaya Uji Kompetensi/Prakerin 13,1%, dan Biaya Pembinaan siswa sebesar 12,4%.

Biaya Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 15% digunakan untuk membiayai kegiatan praktik 9 KK dan proporsi terbesar untuk KK Teknik Kendaraan Ringan yaitu 26,1%. Secara rinci proporsi Biaya Bahan dan Alat Khusus KK dapat dilihat pada Grafik berikut.



Grafik 14. Proporsi Biaya Bahan dan Alat menurut KK SMKN 3 Gowa

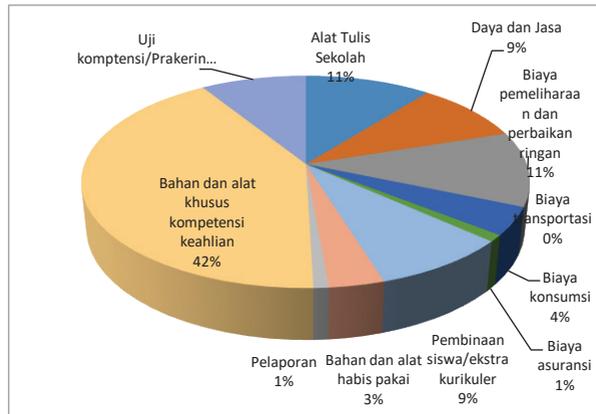
Porsi terbesar kedua adalah untuk pembelian bahan dan alat khusus KK Kriya Tekstil sebesar 17%, diikuti dengan KK Kriya Kulit sebesar 14,2%, KK Teknik Pengelasan 13,3%, Desain Komunikasi Visual 13,1%. Selanjutnya ada 4 KK yang biaya praktiknya di bawah 10%, yaitu KK Kriya Keramik 5,2%, KK Kriya Kayu 5,1%, KK Kriya Logam 4,4%, dan proporsi terkecil adalah untuk KK Teknik Alat Berat sebesar 1,7%. Hal ini sesuai karena untuk praktik KK Teknik Alat Berat tidak membutuhkan bahan dan alat habis pakai tetapi justru membutuhkan alat berat yang pengadaannya bersifat investasi dan bukan bagian dari BONP.



Grafik 15. Proporsi Biaya Uji Kompetensi/Prakerin di SMKN 3 Gowa

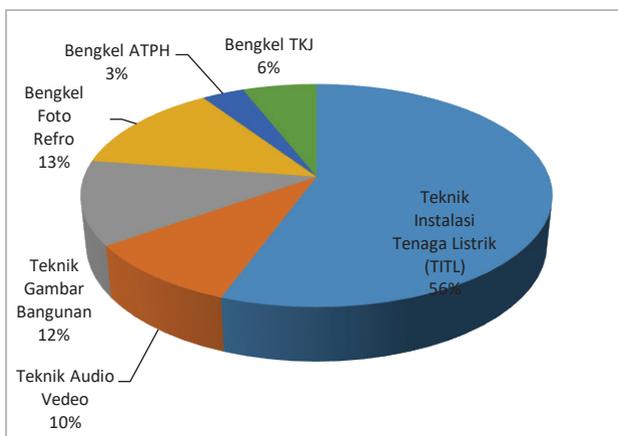
Grafik 4.33. menyajikan Proporsi Biaya Uji Kompetensi/Prakerin di SMKN 3 Gowa. Porsi terbesar adalah untuk uji kompetensi KK Kriya Tekstil sebesar 21,5%, diikuti dengan KK Desain Komunikasi Visual sebesar 18,7%, dan KK Teknik Kendaraan Ringan sebesar 18,1%. Sementara porsi terkecil adalah untuk KK Kriya Keramik sebesar 4,2%.

#### 4) SMK Negeri 4 Gowa



Grafik 16. Persentase Pengeluaran BONP menurut Komponen Biaya di SMKN 4 Gowa

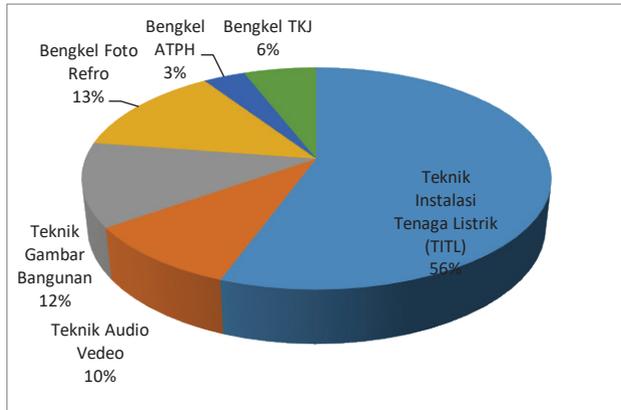
Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMK Negeri 4 Gowa yang terbesar digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan (18%). Besarnya komponen penggunaan dana untuk komponen ini karena sekolah sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.



Grafik 17. Proporsi Biaya Bahan dan Alat menurut KK SMKN 4 Gowa

Pada Grafik di atas disajikan rincian pemanfaatan sub komponen Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 42% yang digunakan untuk mendanai biaya praktik 6 KK. Porsi terbesar adalah untuk membeli bahan dan alat Khusus KK Teknik Instalasi dan Tenaga Listrik sebesar 56% dan porsi terkecil adalah untuk pembelian bahan dan alat praktik KK Bengkel ATPH yaitu sebesar 3%.

Sementara itu, pada Grafik di bawah, disajikan rincian pemanfaatan proporsi sub komponen biaya Uji kompetensi/prakerin sebesar 9% yang digunakan juga untuk mendanai kegiatan uji kompetensi 6 KK. Adapun proporsi biaya untuk 6 KK tersebut sama dengan proporsi pada sub komponen biaya Alat dan Bahan Khusus KK. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Grafik 4.36.

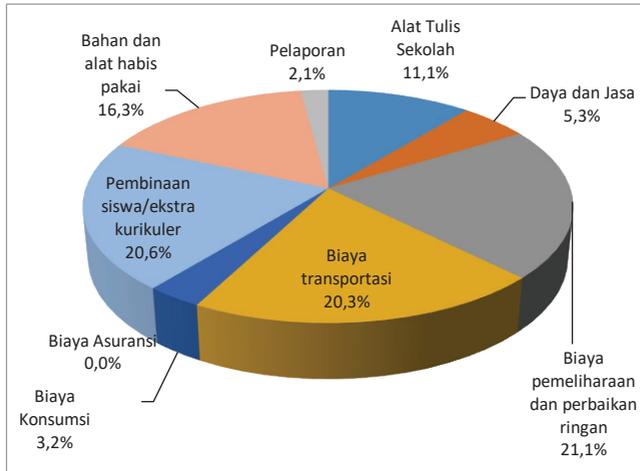


Grafik 18. Proporsi Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMKN 4 Gowa

### 3. Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

#### a. SMA

SMA Sampel untuk provinsi Riau diambil dari kabupaten Kampar, yaitu kabupaten yang terdekat dengan Kota Pekanbaru. Gambaran tentang rata-rata BONP SMA sampel dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

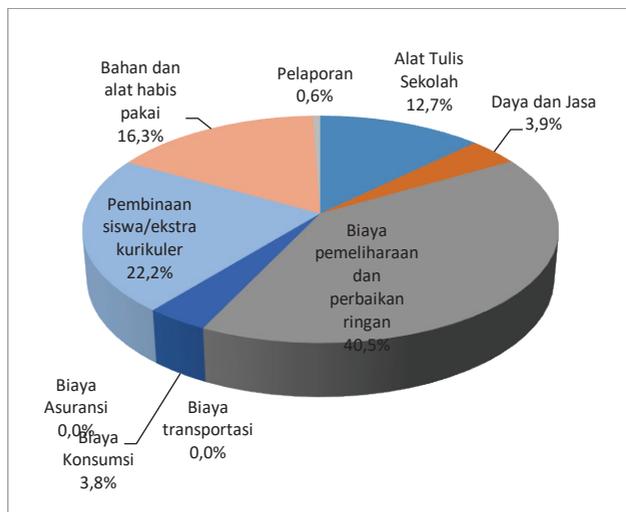


Grafik 19. Rata-rata BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA di Kabupaten Kampar

Pada Grafik di atas terlihat bahwa proporsi terbesar BONP di SMA sampel adalah pada sub komponen biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan yaitu 21,1%, tidak berbeda jauh dengan pengeluaran sub komponen pembinaan siswa dan biaya transportasi yang berkisar 20%. Sementara itu, pengeluaran untuk sub komponen Bahan dan Alat Habis Pakai lebih tinggi (16,3%) daripada pengeluaran pada sub komponen ATS yang hanya 11,1%. Untuk SMK hal ini cukup wajar karena proses belajar di SMK lebih banyak dalam bentuk praktek daripada teori. Sedangkan pengeluaran untuk sub komponen Konsumsi hanya sebesar 3,2% dan ini wajar karena konsumsi hanya sebagai biaya operasional penunjang saja. Adapun untuk biaya sub komponen Asuransi masih 0%, ini berarti sekolah belum

menyadari pentingnya mengasuransikan aset yang ada, baik yang berupa fisik maupun SDM.

### 1) SMA Negeri 1 Kampar

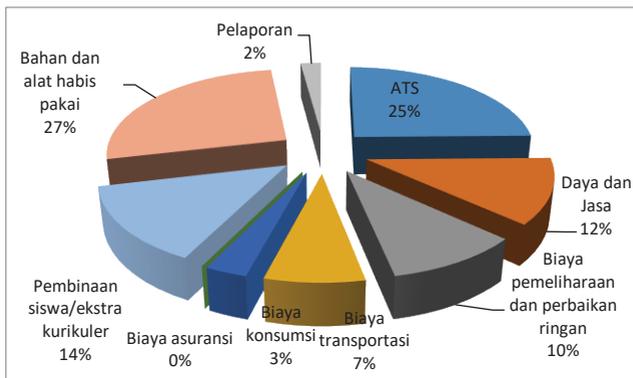


Grafik 20. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMA Negeri 1 Kampar

Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMA Negeri 1 Kampar terbesar digunakan untuk kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler yaitu sebesar 33%. Sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 33% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Penggunaan untuk pengadaan ATS mencapai 30% dan bahan dan alat habis pakai sebesar

25%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan media dan alat peraga dalam pembelajaran sangat besar. Dalam komponen daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 6%. Adanya penggunaan untuk komponen ini yang masih rendah belum sejalan dengan konsep revolusi industri, dimana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran yang belum berbasis teknologi, karena anggaran lebih banyak untuk pengadaan media dan alat peraga dalam pembelajaran yang habis pakai. Selanjutnya penggunaan untuk biaya asuransi 0%, dengan demikian sekolah belum mengalokasikan untuk biaya perlindungan dan kegiatan nonpersonalia lainnya.

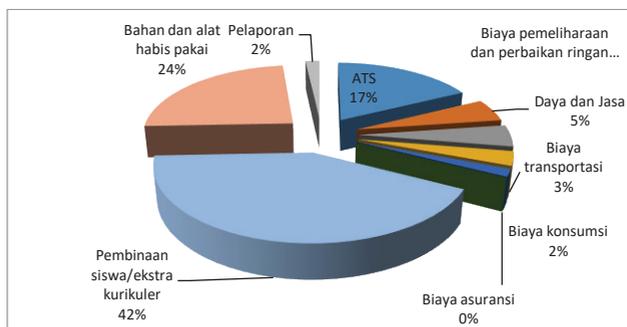
## 2) SMA Negeri 2 Kampar



Grafik 21. Persentase Pengeluaran BONP di SMA Negeri 2 Kampar

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata penggunaan anggaran BONP di SMA Negeri 2 Kampar terbesar digunakan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 27% dan pengadaan ATS mencapai 25%. Seperti halnya SMA Negeri 1 Kampar, menunjukkan bahwa kebutuhan akan media dan alat peraga dalam pembelajaran sangat besar. Adapun untuk kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, sekolah hanya mengalokasikan sebesar 14% untuk memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun non akademik. Penggunaan untuk komponen daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 12%, penggunaan untuk komponen ini untuk menyediakan bentuk informasi dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya penggunaan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 10%.

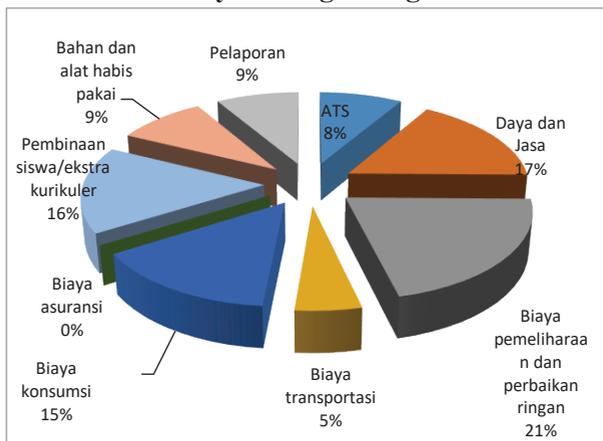
### 3) SMA Negeri 3 Tapung Hulu



Grafik 22. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMAN 3 Tapung Hulu

Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMA Negeri 3 Tapung Hulu terbesar digunakan untuk kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler yaitu sebesar 42%. Sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 42% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Penggunaan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 24%, sedangkan alokasi untuk pengadaan ATS yaitu 17%, dan dalam komponen daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 5%. Adanya penggunaan untuk komponen ini yang masih rendah belum sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, dimana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran yang belum berbasis teknologi, karena anggaran lebih banyak untuk pengadaan media dan alat peraga dalam pembelajaran yang habis pakai. Selanjutnya penggunaan untuk biaya perawatan dan perbaikan ringan 5%.

#### 4) SMA Muhammadiyah Bangkinang



Grafik 23. Persentase Pengeluaran BONP di SMA Muhammadiyah Bangkinang

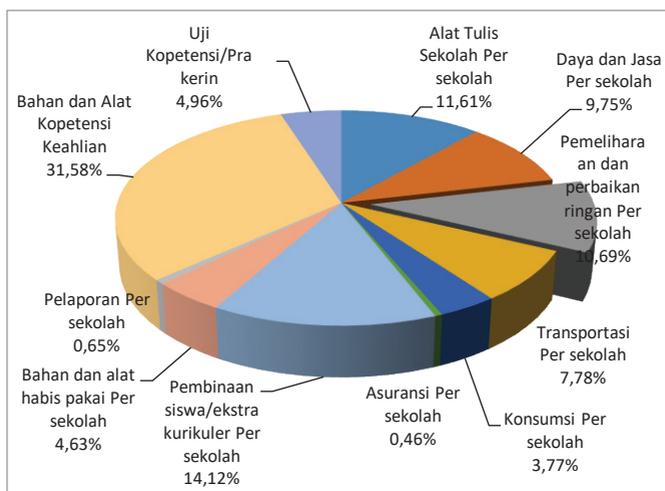
Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMA Muhammadiyah Bangkinang terbesar digunakan untuk kegiatan perawatan dan perbaikan ringan yaitu sebesar 21%. Sedangkan untuk pengadaan daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 17%.

Adanya penggunaan untuk komponen ini sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, dimana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 16% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Alokasi untuk pengadaan konsumsi rapat yakni 15%. Penggunaan

untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 9%, sedangkan alokasi untuk pengadaan ATS yaitu 8%.

## b. SMK

Berdasarkan data yang diperoleh di SMK sampel, diperoleh rata-rata BONP di Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

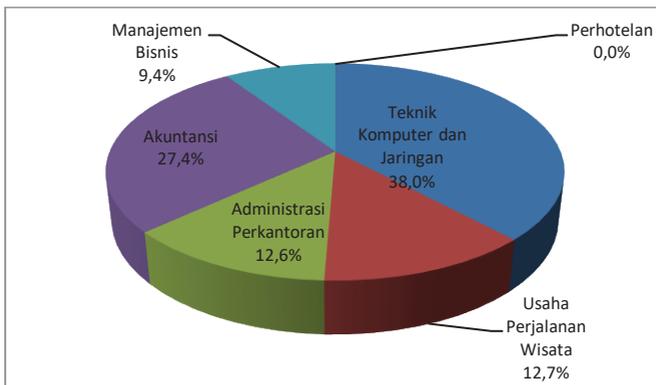


Grafik 24. Rata-Rata Persentase Pengeluaran BONP SMK menurut Sub Komponen Biaya, SMK di Kota Pekanbaru

Pengeluaran rata-rata BONP di SMK Kota Pekanbaru memperlihatkan bahwa persentase terbesar digunakan untuk membiayai Bahan dan Alat habis pakai KK yaitu sebesar 31,58%. Selanjutnya untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebesar 14,12%, diikuti dengan pengeluaran untuk ATS sebesar 11,61%. Ketiga jenis BONP ini memang merupakan pengeluaran inti dalam

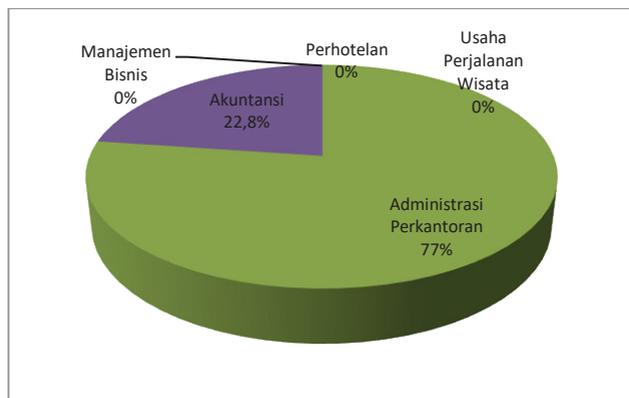


Berdasarkan grafik di atas, BONP di SMK Negeri 1 Pekanbaru terbesar pertama digunakan untuk kegiatan pengadaan daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 18,9%. Penggunaan terbesar kedua untuk perawatan dan perbaikan ringan yaitu sebesar 18,1%. Selanjutnya penggunaan terbesar lainnya digunakan untuk pengadaan ATS yaitu sebesar 16,9% sedangkan untuk pengadaan bahan habis pakai sebesar 14,2%, untuk bahan dan alat habis pakai khusus KK sebesar 11,7%. Sekolah juga mengalokasikan biaya untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebesar 8,9% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Alokasi untuk pengadaan konsumsi sebesar 5,5% dan transportasi yakni 5,4%. Adapun untuk alokasi biaya asuransi 0%.



Grafik 26. Persentase Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 1 Pekanbaru

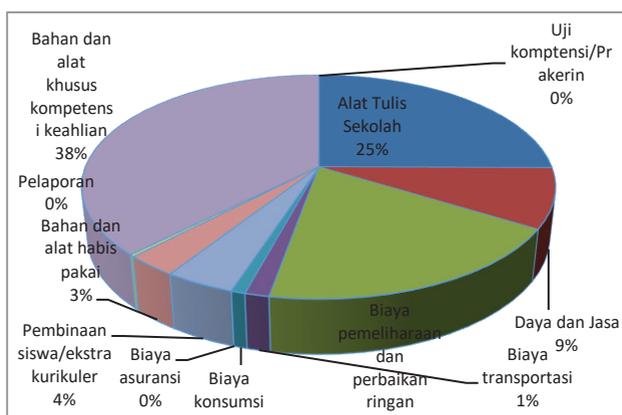
Berdasarkan grafik di atas, biaya bahan dan alat menurut KK di SMK 1 Negeri Pekanbaru, penggunaan terbesar pertama untuk biaya Teknik Komputer dan Jaringan yaitu sebesar 38,0%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk biaya KK Akuntansi sebesar 27,4%. Selanjutnya digunakan untuk biaya KK Manajemen Bisnis sebesar 9,4%, sedangkan biaya KK Perjalanan Wisata sebesar 12,7% dan Administrasi Perkantoran sebesar 12,6% kedua keahlian ini mempunyai presentase biaya yang tidak terlampau jauh. Adapun KK Perhotelan tidak mengeluarkan biaya bahan dan alat habis pakai untuk praktik. Hal ini bisa terjadi karena biaya bahan dan alat habis pakai langsung dibiayai oleh orangtua siswa.



Grafik 27. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 1 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas pengeluaran untuk Uji Kompetensi/Prakerin di SMK Negeri 1 Pekanbaru, penggunaan terbesar pertama digunakan untuk KK Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 77%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk KK Akuntansi sebesar 22,8%. Proporsi terkecil yaitu sebesar 0,2% digunakan untuk membiayai prakerin 3 KK yaitu KK Manajemen Bisnis, Perhotelan, dan Perjalanan Wisata.

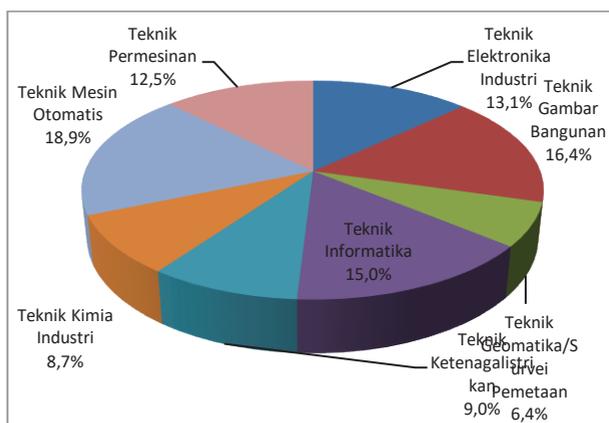
## 2) SMK Negeri 2 Pekanbaru



Grafik 28. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 2 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMK Negeri 2 Pekanbaru terbesar pertama digunakan untuk bahan dan alat khusus KK sebesar 38%. Penggunaan terbesar kedua adalah ATS yaitu sebesar 25%, dan biaya

pemeliharaan dan perbaikan ringan mencapai 19%. Untuk pengadaan daya dan jasa yang meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 9%. Sekolah juga mengalokasikan biaya untuk pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebesar 4% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Sementara alokasi untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai mencapai 3%. Alokasi untuk biaya pengadaan konsumsi dan transportasi berjumlah sama yaitu sebesar 1%. Adapun untuk alokasi uji kompetensi/prakerin, biaya pelaporan dan biaya asuransi sebesar 0%.

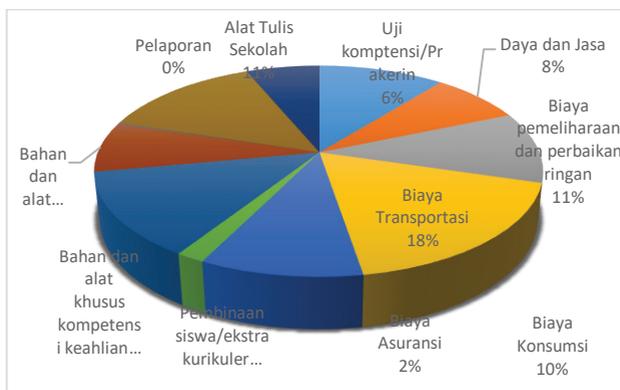


Grafik 29. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 2 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan biaya bahan dan alat menurut KK di SMK Negeri 2 Pekanbaru terbesar

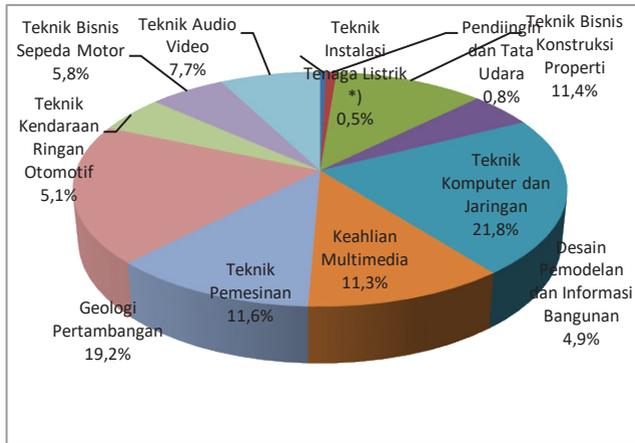
pertama digunakan untuk Teknik Permesinan Otomatis yaitu sebesar 18,9%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk Teknik Gambar Bangunan sebesar 16,4%. Selanjutnya untuk penggunaan alokasi untuk Teknik Informatika sebesar 15%. Alokasi untuk Teknik Elektronika Industri sebesar 13,1% sedangkan Teknik Permesinan yaitu sebesar 12,5%. Penggunaan berikutnya untuk Teknik Ketenagalistrikan sebesar 9,0% dan Teknik Kimia Industri mempunyai biaya yaitu sebesar 8,7%. Adapun alokasi untuk Teknik Geomatika Survei Pemetaan sebesar 6,4%. Untuk SMK Negeri 2 Pekanbaru tidak ada Biaya Uji Kompetensi/Prakerin.

### 3) SMK Negeri 5 Pekanbaru



Grafik 30. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 5 Pekanbaru

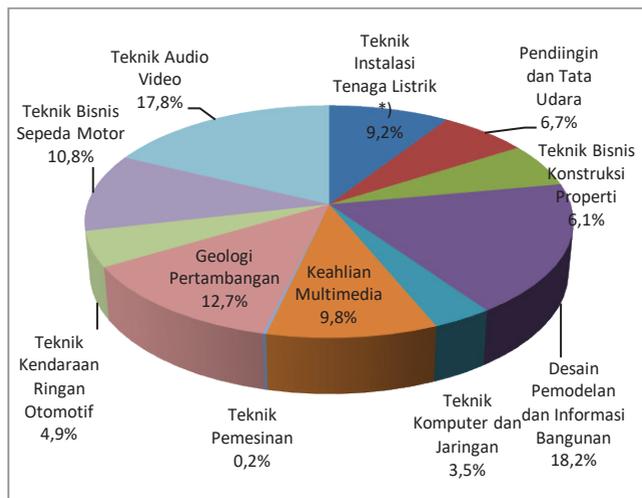
Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMK Negeri 5 Pekanbaru terbesar pertama digunakan untuk pengadaan bahan dan alat khusus KK yaitu sebesar 14%. Sekolah berupaya meningkatkan KK siswa dengan menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan praktek. Penggunaan terbesar kedua yaitu untuk biaya transportasi yang mencapai 18%. Penggunaan selanjutnya untuk kegiatan pembinaan siswa/esktrakurikuler, sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 13% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Alokasi untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan ringan dan pengadaan ATS mempunyai biaya yang sama yaitu 11%, sedangkan untuk biaya konsumsi kegiatan rapat di sekolah sebesar 10%. Selanjutnya pengadaan daya dan jasa meliputi kebutuhan listrik, internet, telepon, dan lainnya mencapai 8%. Adanya penggunaan untuk komponen ini sejalan dengan konsep revolusi industri, dimana segala bentuk informasi dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Sedangkan penggunaan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 7%, Untuk alokasi Uji Kompetensi /prakerin sebesar 6%, alokasi untuk biaya asuransi sebesar 2%. Adapun untuk alokasi biaya pelaporan 0%.



Grafik 31. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 5 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas rata-rata penggunaan biaya bahan dan alat menurut KK di SMK Negeri 5 Pekanbaru penggunaan terbesar pertama digunakan untuk Teknik Komputer dan jaringan sebesar 21,8%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk Geologi Pertambangan sebesar 19,2%. Selanjutnya tiga alokasi biaya persentase tidak jauh yaitu untuk Teknik Permesinan sebesar 11,6%, Teknik Bisnis Konstruksi Properti sebesar 11,4% dan Keahlian Multimedia sebesar 11,3%. Penggunaan selanjutnya untuk biaya Teknik Audio Video sebesar 7,7%. Sedangkan untuk biaya Teknik Bisnis Motor sebesar 5,8% dan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sebesar 5,1%. Untuk biaya Desain Permodelan dan Informasi Bangunan sebesar 4,9%. Adapun alokasi untuk biaya Pendingin dan Tata Udara

sebesar 0,8% dan penggunaan untuk biaya untuk Teknik Instalasi Tenaga Listrik sebesar 0,5%.

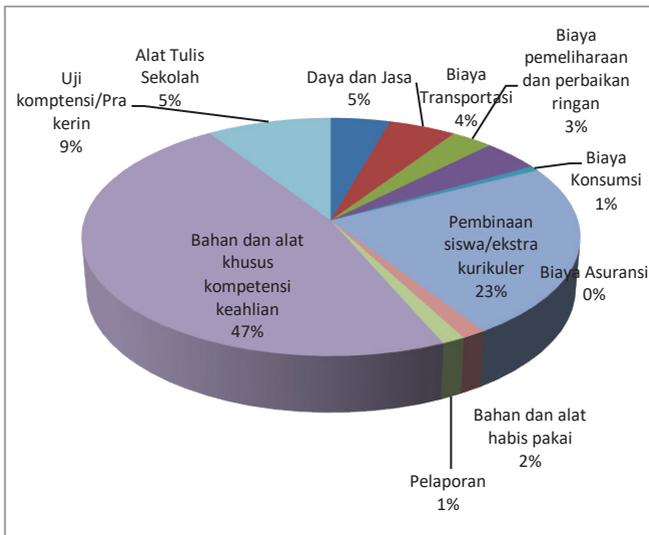


Grafik 32. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 5 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK di SMK Negeri 5 Pekanbaru penggunaan terbesar pertama untuk biaya Desain Permodelan dan Informasi Bangunan sebesar 18,7%. Penggunaan terbesar kedua untuk biaya Teknik Audio Video sebesar 17,8%. Penggunaan selanjutnya digunakan untuk biaya Geologi Pertambangan sebesar 12,7% dan untuk biaya Teknik Bisnis Sepeda Motor sebesar 10,8. Selanjutnya untuk biaya Teknik Instalasi Tenaga Listrik sebesar 9,2%. Sedangkan untuk biaya Pendingin dan Tata Udara sebesar 6,7% dan biaya untuk

Teknik Bisnis Konstruksi Properti sebesar 6,1%. Adapun alokasi lainnya untuk biaya Teknik Kendaraan Ringan Otomotif sebesar 4,9%, Teknik Komputer dan Jaringan sebesar 3,5% dan Teknik Permesinan sebesar 0,2%.

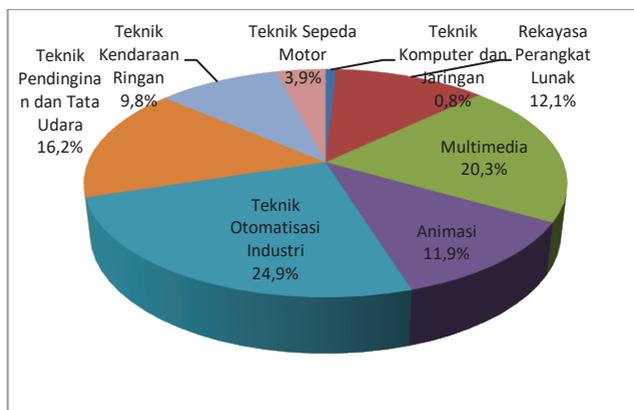
#### 4) SMK Negeri 7 Pekanbaru



Grafik 33. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Negeri 7 Pekanbaru

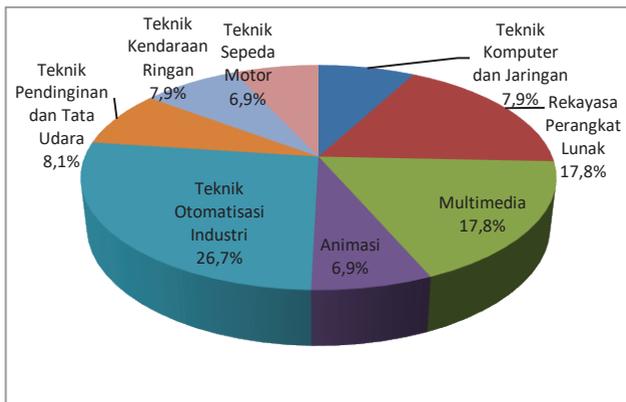
Berdasarkan grafik di atas, anggaran BONP di SMK Negeri 7 Pekanbaru terbesar pertama digunakan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai khusus KK yaitu sebesar 47%. Sekolah berupaya meningkatkan KK

siswa dengan menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan praktek. Penggunaan terbesar kedua yaitu untuk kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 23% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Penggunaan selanjutnya untuk pengadaan ATS dan pengadaan daya dan jasa mempunyai biaya sama yaitu 5%, dan untuk biaya transportasi sebesar 4%. Selanjutnya penggunaan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 3%. Sedangkan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 2%. Untuk biaya konsumsi dan biaya pelaporan mempunyai biaya sama yaitu sebesar 1%. Adapun alokasi untuk biaya asuransi sebesar 0%.



Grafik 34. Proporsi Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMKN 7 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, biaya bahan dan alat menurut KK di SMK Negeri 7 Pekanbaru penggunaan terbesar pertama digunakan untuk Teknik Otomatisasi Industri yaitu sebesar 24,9%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk Multimedia sebesar 20,3%. Selanjutnya penggunaan untuk biaya Teknik Pendinginan dan Tata Ruang sebesar 16,2. Sedangkan untuk Rekayasa Perangkat Lunak sebesar 12,1%, dan untuk Teknik Kendaraan Ringan sebesar 9,8%. Adapun alokasi lainnya untuk biaya Teknik Sepeda Motor sebesar 3,9% dan Teknik Komputer dan Jaringan sebesar 0,8%.

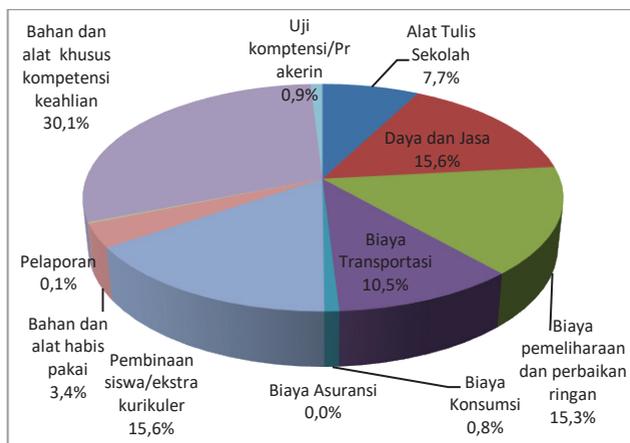


Grafik 35. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMKN 7 Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK di SMK Negeri 7 Pekanbaru digunakan terbesar pertama digunakan untuk biaya Teknik Otomatisasi Industri sebesar 26,7%.

Penggunaan yang terbesar kedua digunakan untuk biaya Multimedia dan Rekayasa Perangkat yang mempunyai nilai biaya yang sama yaitu sebesar 17,8%. Penggunaan selanjutnya untuk Teknik Pendingin dan Tata Ruang sebesar 8,1%. Untuk biaya Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer dan Jaringan mempunyai biaya yang sama yaitu sebesar 7,9%. Adapun Alokasi Teknik Sepeda Motor dan Animasi mempunyai biaya yang sama yaitu sebesar 6,9%.

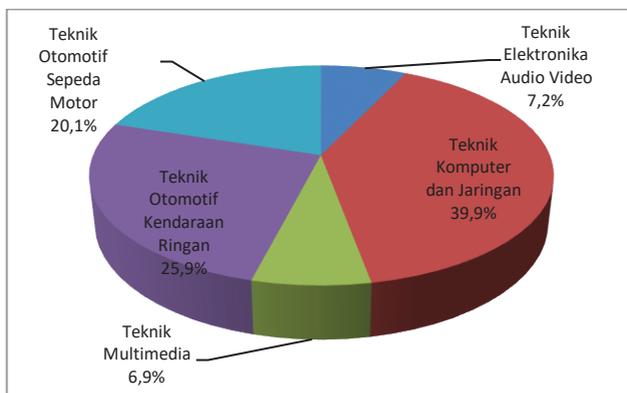
### 5) SMK Taruna Satria Pekanbaru



Grafik 36. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Taruna Satria Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan anggaran biaya terbesar operasional nonpersonalia di SMK Taruna Satria Pekanbaru pertama digunakan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai khusus KK yaitu sebesar

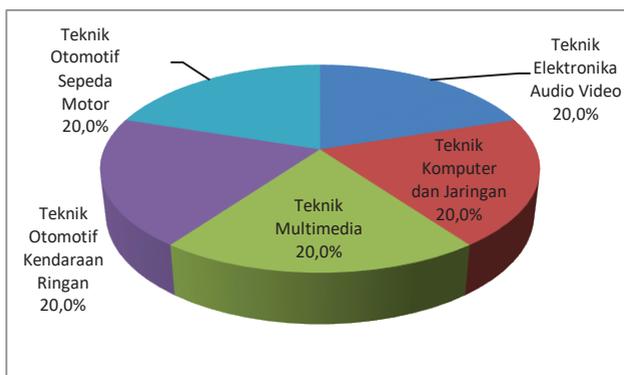
30,1%. Penggunaan terbesar kedua untuk kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, sekolah mengalokasikan anggaran sebesar 16% sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Alokasi untuk pengadaan daya dan jasa sama yaitu 16%. Selanjutnya penggunaan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebesar 15,3%. Untuk biaya transportasi sebesar 10,5%, dan biaya pengadaan ATS sebesar 7,7% dan pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 3,4%. Sedangkan untuk alokasi Uji Kompetensi/prakerin sebesar 0,9%, alokasi untuk biaya konsumsi sebesar 0,8%. Biaya pelaporan sebesar 0,1%. Adapun untuk alokasi biaya asuransi sebesar 0%.



Grafik 37. Proporsi Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Taruna Satria Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan biaya bahan dan alat menurut KK di SMK Taruna Satria Pekanbaru yang terbesar pertama digunakan untuk biaya Teknik Komputer dan Jaringan yaitu sebesar 39,9%.

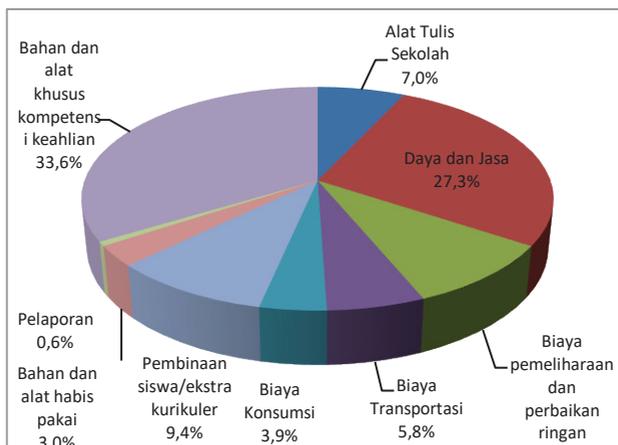
Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk biaya Teknik Otomotif Kendaraan Ringan sebesar 25,9%. Selanjutnya untuk Biaya Teknik Otomotif sebesar 20,1%. Sedangkan untuk biaya Teknik Elektronika Audio Video sebesar 7,2%. Adapun untuk biaya Teknik Multimedia sebesar 6,9%.



Grafik 38. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Taruna Satria Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMK Taruna Satria Pekanbaru, mempunyai persentase biaya yang sama untuk semua KK yaitu Teknik Multimedia, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Elektronika Audio Video, Teknik Otomotif Sepeda Motor dan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan dengan masing-masing biaya sebesar 20%.

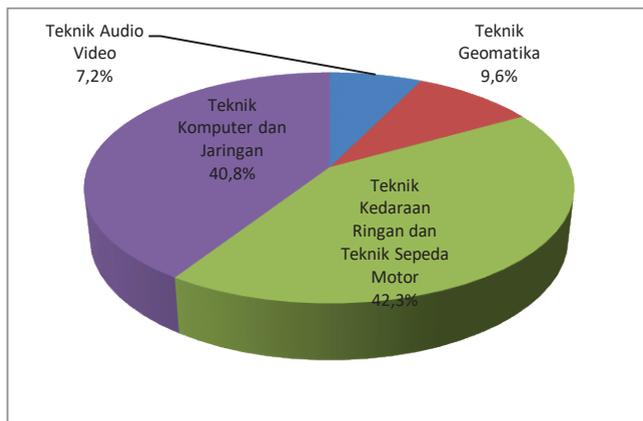
## 6) SMK Taruna Pekanbaru



Grafik 39. Persentase Pengeluaran BOPN Menurut Sub Komponen Biaya di SMK Taruna Pekanbaru

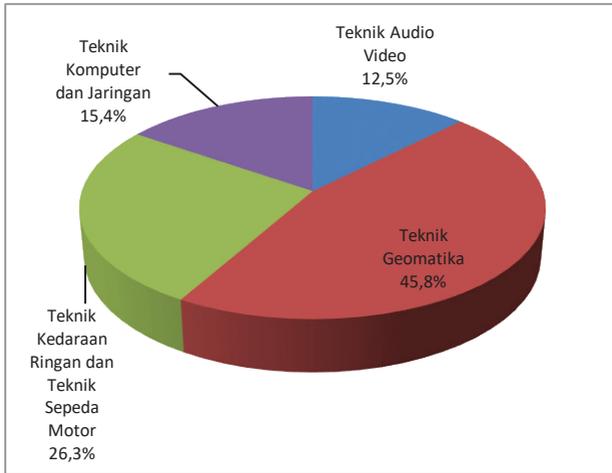
Berdasarkan grafik di atas, penggunaan terbesar anggaran BOPN di SMK Taruna Pekanbaru pertama digunakan untuk pengadaan bahan dan alat habis pakai khusus KK yaitu sebesar 33,6%. Penggunaan terbesar kedua digunakan untuk biaya daya dan jasa sebesar 27,3%. Selanjutnya penggunaan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan dan kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Kedua kegiatan ini mempunyai biaya yang sama yaitu sebesar 9,4%. Untuk biaya ATS yaitu sebesar 7%. Sedangkan untuk biaya transportasi sebesar 5,8% dan biaya konsumsi sebesar 3,9%. Adapun alokasi

pengadaan bahan dan alat habis pakai sebesar 3,0% dan biaya untuk pelaporan sebesar 0,6%.



Grafik 40. Persentase Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Taruna Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan terbesar biaya bahan dan alat menurut KK SMK Taruna Pekanbaru pertama digunakan untuk biaya Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor yaitu sebesar 42,3%. Penggunaan terbesar digunakan untuk biaya Teknik Komputer dan Jaringan sebesar 40,8%. Selanjutnya penggunaan untuk biaya Teknik Geomatika sebesar 9,6%, biaya Teknik Audio Video sebesar 7,2%.



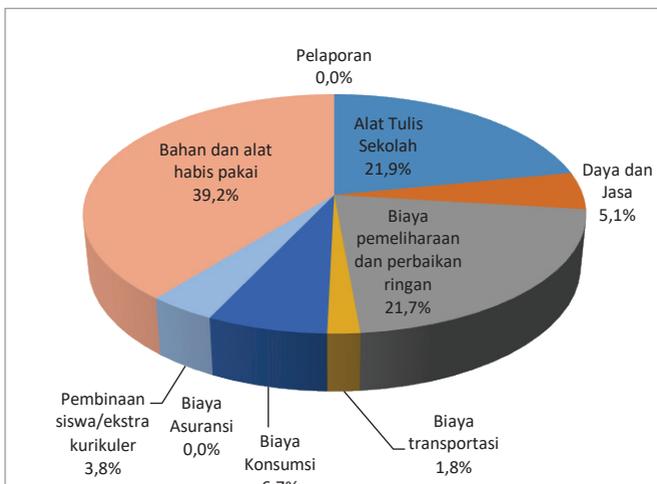
Grafik 41. Proporsi biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Taruna Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas, penggunaan terbesar Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMK Taruna Pekanbaru, pertama untuk biaya Teknik Geomatika yaitu sebesar 45,8%. Penggunaan terbesar kedua untuk biaya Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor sebesar 26,3%. Selanjutnya digunakan untuk teknik Komputer dan Jaringan sebesar 15,4%, dan alokasi untuk biaya Tehnik Audio Video sebesar 12,5%.

#### 4. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

##### a. SMA

SMA sampel di Balikpapan yang memiliki data cukup lengkap hanya 2 sekolah yaitu SMA Negeri 4 Balikpapan dan SMA Muhammadiyah 2 Al-Mujahidin. Pengeluaran biaya BONP di kedua SMK rata-rata komposisi pengeluaran BONP untuk masing-masing sub komponen biaya sebagai berikut.



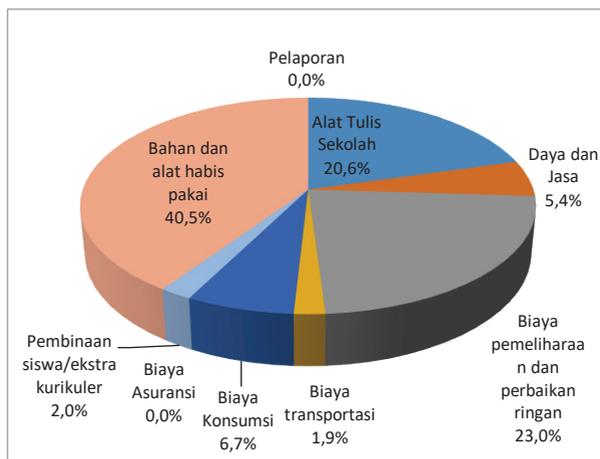
Grafik 42. Rata-rata BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA di Kota Balikpapan

Pada grafik di atas, terlihat bahwa persentase terbesar rata-rata pengeluaran BONP SMA di sekolah sampel di Kota Balikpapan adalah untuk Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai yaitu sebesar 39,2% yang diikuti dengan pengeluaran untuk Biaya ATS 21,9%. Hal ini cukup wajar karena kedua biaya

itu memang merupakan kebutuhan utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya diikuti dengan pengeluaran untuk Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 21,7%. Ini menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan sekolah untuk memelihara dan melakukan perbaikan ringan terhadap aset yang dimiliki sekolah cukup besar. Besar kecilnya kebutuhan biaya ini salah satunya ditentukan oleh umur sarana dan prasarana (aset) yang dimiliki sekolah. Semakin tua umur aset sekolah semakin banyak biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan yang dibutuhkan. Sementara itu, rata-rata biaya pembinaan siswa dan ekstrakurikuler relatif kecil karena hanya sebesar 3,8% dari seluruh pengeluaran BONP sekolah. Kecilnya pengeluaran untuk pembinaan siswa ini mengindikasikan sedikitnya kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah.

Dalam rangka melihat gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana pengeluaran BONP di masing-masing sekolah sampel dapat dilihat pada uraian tentang masing-masing SMA sampel berikut ini.

## 1) SMA Negeri 4 Balikpapan

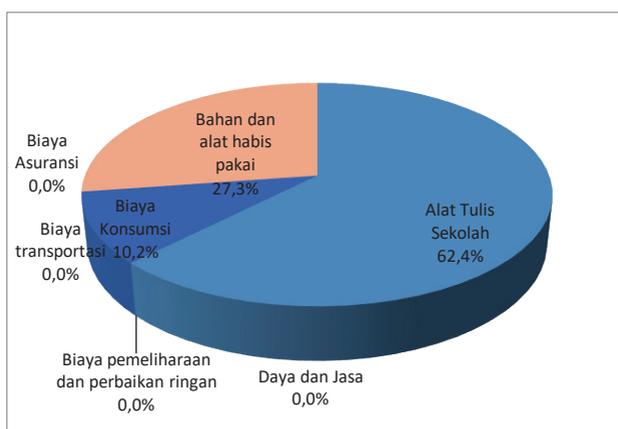


Grafik 43. Persentase Pengeluaran BOND Menurut Sub Komponen Biaya, SMAN 4 Balikpapan

Pada grafik di atas terlihat bahwa pengeluaran BOND untuk Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai merupakan pengeluaran terbesar yaitu 40,5%, yang diikuti dengan pengeluaran biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 23%, baru kemudian diikuti dengan pengeluaran untuk ATS yaitu sebesar 20,6%. Selanjutnya kebutuhan biaya Konsumsi sebesar 6,7% dan diikuti dengan biaya Daya dan Jasa sebesar 5,4%. Sementara untuk biaya Pembinaan Siswa hanya sebesar 2%. Urutan proporsi pengeluaran BOND seperti ini sebenarnya cukup baik bila diimbangi dengan pengeluaran biaya pembinaan siswa yang memadai.

Di sekolah ini nampaknya alokasi BONP sangat minim, yaitu hanya 2%. Hal ini mengindikasikan sekolah belum maksimal dalam memberikan bekal kompetensi kepada siswa karena adanya keterbatasan dana yang tersedia di sekolah.

## 2) SMA Muhammadiyah 2 Al-Mujahidin

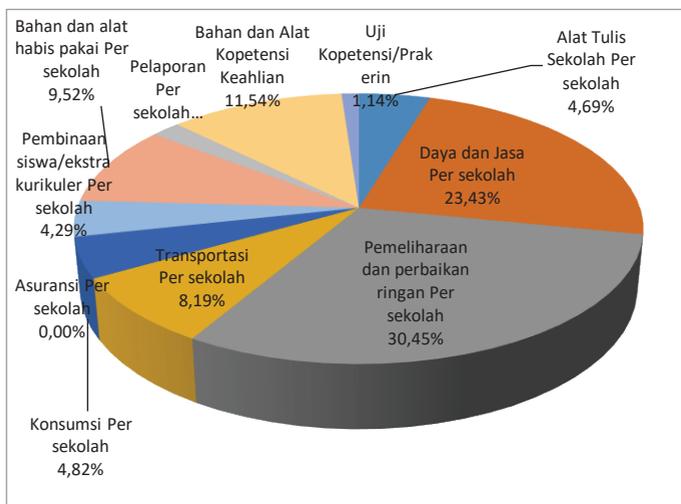


Grafik 44. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMA Muhammadiyah 2 Al Mujahidin

Pada grafik di atas terlihat bahwa SMA ini memanfaatkan dana biaya operasional sekolah hanya untuk sub komponen ATS sebagai pengeluaran paling banyak yaitu 62,4%, diikuti dengan Biaya Bahan dan alat habis pakai sebesar 27,3%, yang dilanjutkan dengan sub komponen biaya konsumsi sebesar 10,2% dan sisanya 0,1% untuk sub komponen Daya dan Jasa,

Transportasi, Pemeliharaan dan Perbaikan ringan, serta asuransi. Data pengeluaran BONP disini kemungkinan hanya yang bersumber dari dana BOS. Sementara untuk pengeluaran sub komponen BONP lainnya dibiayai oleh sumber dana lain yang ada di sekolah, bisa bersumber dari iuran siswa atau sumber dana Yayasan.

## b. SMK

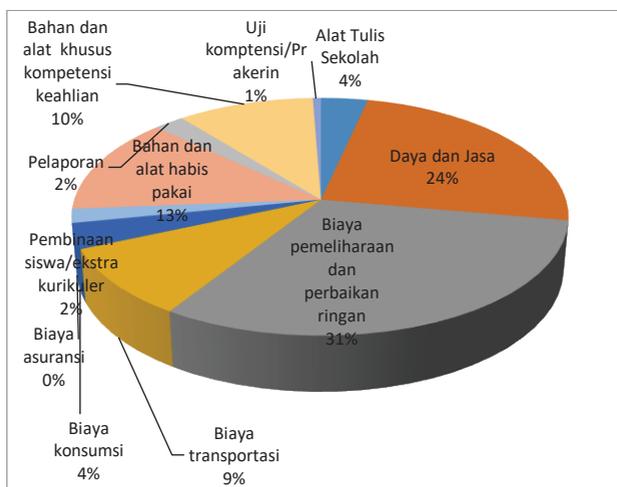


Grafik 45. Persentase Rata-Rata BONP menurut Sub Komponen Biaya SMK di Kota Balikpapan

Pada grafik di atas terlihat bahwa persentase terbesar pengeluaran BONP di Kota Balikpapan terbesar digunakan untuk Sub Komponen Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan yaitu sebesar 30,45%, yang diikuti dengan pengeluaran sub

komponen Daya dan Jasa sebesar 23,43%. Sementara itu untuk pengeluaran sub komponen biaya bahan dan alat habis pakai hanya sebesar 9,52%, sementara untuk bahan dan alat khusus KK sebesar 11,54% dan sub komponen Uji Kompetensi hanya 1,14%. Persentase biaya uji coba kompetensi ini hanya berupa subsidi dari sekolah sedangkan kekurangannya dibebankan kepada orangtua siswa.

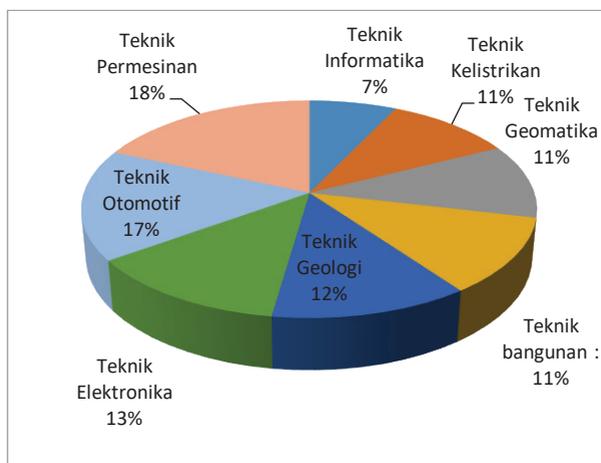
### 1) SMK Negeri 1 Balikpapan



Grafik 46. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMK Negeri 1 Balikpapan

Pada grafik di atas terlihat bahwa pengeluaran BONP terbesar digunakan untuk Sub Komponen Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan ringan sebesar 31%, selanjutnya Daya dan Jasa 24 % dan Biaya Bahan dan

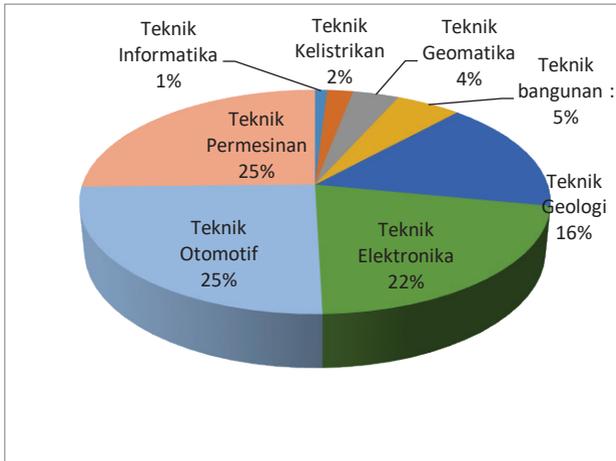
Alat khusus KK adalah 13%. Sementara itu, pengeluaran sub komponen Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai sebesar 10%. Kondisi ini cukup wajar, namun perlu dicermati sub komponen biaya Uji Kompetensi sangat kecil yaitu hanya sebesar 1%, padahal biaya tersebut digunakan untuk membiayai Uji Kompetensi 8 KK. Biaya uji kompetensi yang dikeluarkan sekolah ini hanya merupakan subsidi dari sekolah sedangkan kekurangannya dibebankan kepada orangtua siswa.



Grafik 47. Proporsi Pengeluaran Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK di SMK Negeri 1 Balikpapan

Grafik di atas merupakan rincian proporsi penggunaan biaya Bahan dan Alat Khusus KK untuk 8 jenis KK. Proporsi terbesar adalah untuk KK Teknik Permesinan sebesar 18%, diikuti dengan Teknik Otomotif 17%, Teknik Elektronika 13%, Teknik Geologi 12%, Teknik Bangunan, Geomatika dan Teknik Kelistrikan masing-masing 11%, dan Teknik Informatika 7%.

Pengeluaran untuk Sub Komponen Uji Kompetensi sebesar 1% dialokasikan untuk mendanai Uji Kompetensi 8 KK. Secara lebih rinci proporsi pengeluaran untuk 8 KK tersebut dapat dilihat pada Grafik 4.65.

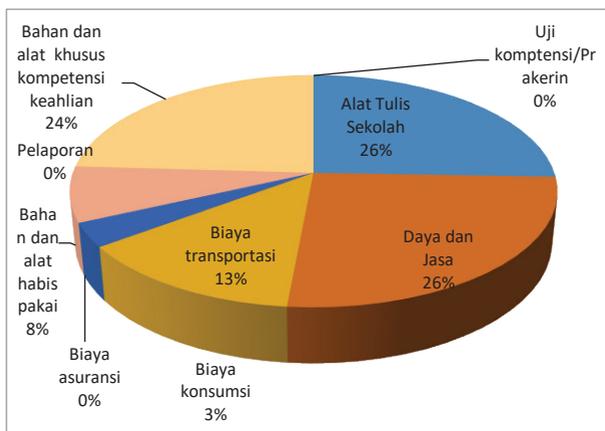


Grafik 48. Persentase biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK, SMK Negeri 1 Balikpapan

Pada grafik di atas terlihat bahwa proporsi terbesar Biaya Uji Kompetensi adalah untuk KK Teknik Permesinan dan KK Teknik Otomotif, masing-masing 25%. Berikutnya untuk Teknik Elektronika 22%, dan Teknik Geologi 16%. Sementara itu, proporsi biaya untuk 4 KK lainnya hanya 1% - 5%.

## 2) SMK Syaichona Balikpapan

SMK Syaichona Balikpapan adalah salah satu SMK swasta sampel dengan jumlah siswa hanya 32 orang. Persentase pengeluaran untuk sub komponen BONP data dilihat pada Grafik 4.66. berikut.



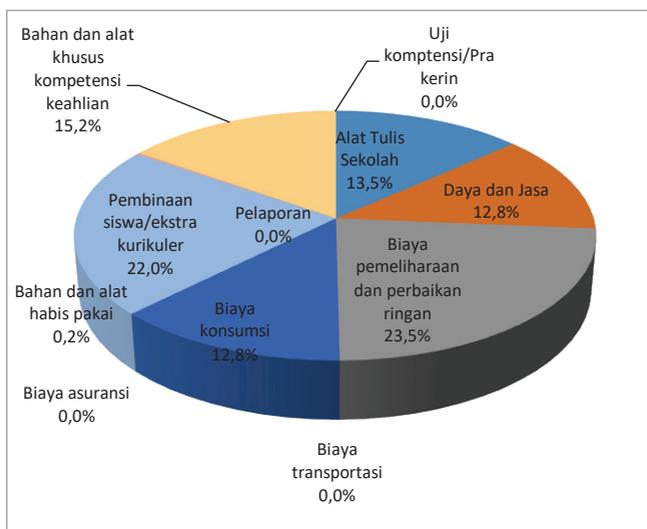
Grafik 49. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Sub Komponen Biaya, SMK Syaichona Balikpapan

Persentase pengeluaran BONP terbesar adalah pada Sub Komponen Biaya ATS dan Daya dan Jasa masing-masing sebesar 26%, yang diikuti dengan pengeluaran sub komponen Biaya Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 24% dan Biaya Transportasi sebesar 13%, sementara untuk pengeluaran sub komponen lainnya kurang dari 10%. Berdasarkan Grafik 4.66. terlihat bahwa sekolah tidak mengeluarkan biaya Uji Kompetensi. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengeluaran biaya Uji kompetensi didanai oleh orangtua siswa secara langsung dan tidak melalui sekolah.

### 3) SMK Pangeran Antasari Balikpapan

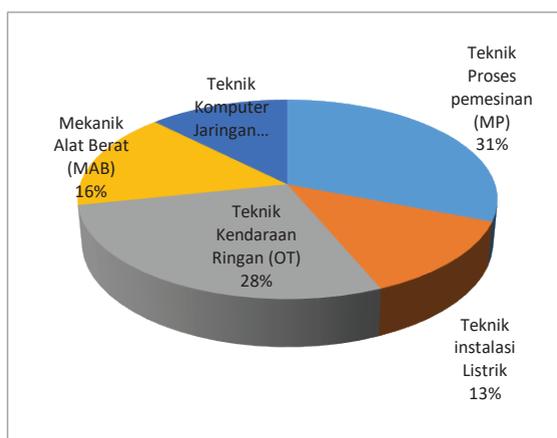
SMK Pangeran Antasari merupakan salah satu SMK swasta sampel yang memiliki 249 siswa dengan 8 rombongan belajar. SMK ini melayani 5 KK, yaitu Teknik Proses Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Mekanik Alat Berat, Teknik Instalasi Listrik, dan Teknik Komputer Jaringan. Rincian persentase pengeluaran BONP di sekolah ini dapat dilihat pada Grafik 4.67. berikut.



Grafik 50. Persentase Pengeluaran BONP Menurut Komponen Biaya di SMK Pangeran Antasari Balikpapan

Pada Grafik di atas, terlihat bahwa persentase pengeluaran terbesar adalah pada Sub Komponen Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 23,5%. Biaya pembinaan siswa dan ekstrakurikuler sebesar 22%. Berikutnya adalah biaya Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 15,2%, Biaya ATS 13,5%, Biaya Daya dan Jasa serta Biaya Konsumsi masing-masing 12,8%. Pada Grafik 4.67 tidak nampak adanya pengeluaran untuk sub biaya Uji Kompetensi. Hal ini berarti sekolah tidak mengeluarkan sub komponen biaya ini. Hal ini mengindikasikan pembiayaan untuk kegiatan Uji Kompetensi kemungkinan didanai oleh sumber lain di luar pengelolaan sekolah, seperti bersumber dari orangtua siswa.

Berikut disajikan rincian proporsi pengeluaran biaya Bahan dan Alat Khusus KK untuk 5 KK.

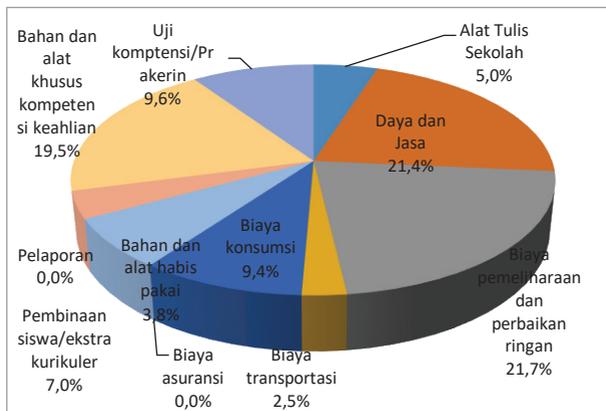


Grafik 51. Persentase Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai menurut KK, di SMK Pangeran Antasari Balikpapan

Dalam grafik di atas terlihat bahwa proporsi biaya bahan dan Alat Khusus KK terbesar untuk kegiatan praktik KK Teknik Proses Pemesinan sebesar 31%, diikuti Teknik Kendaraan Ringan sebesar 28%, Teknik Alat Berat 16%, Teknik Instalasi Listrik 13%, dan Teknik Komputer Jaringan 12%.

#### 4) SMKN 5 Balikpapan

SMKN 5 Balikpapan adalah salah satu SMK Negeri dengan akreditasi A yang menjadi sampel. SMKN ini memiliki 999 siswa dengan 31 rombongan belajar. Grafik 4.69. berikut menyajikan persentase pengeluaran BONP untuk masing-masing sub komponen BONP.



Grafik 52. Persentase Pengeluaran (BONP) Menurut Komponen Biaya di SMKN 5 Balikpapan

Dalam grafik di atas terlihat bahwa persentase pengeluaran BONP terbesar ada pada Sub Komponen Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 21,7% serta Biaya Daya dan Jasa sebesar 21,4%. Berikutnya adalah biaya Bahan dan Alat Khusus KK sebesar 19,5% dan Biaya Uji Kompetensi sebesar 9,6%. Berdasarkan data yang diperoleh dari SMKN 5 Balikpapan tidak ditemukan data tentang jumlah dan jenis KK yang ada di sekolah ini, sehingga tidak dapat disajikan proporsi biaya yang dikeluarkan masing-masing KK untuk Biaya Bahan dan Alat khusus KK serta biaya Uji Kompetensinya.

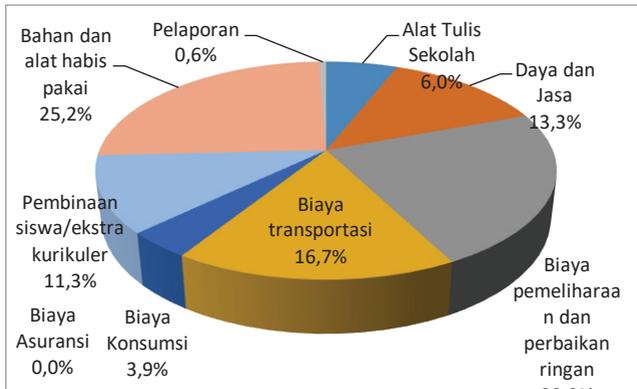
## **5. Kota Denpasar, Provinsi Bali**

### **a. SMA**

Sampel SMA di Kota Denpasar yang memiliki data relatif lengkap ada 4 sekolah yang terdiri atas 2 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. Namun kondisi data yang cukup lengkap dan dapat disajikan hanya data dari SMA Negeri 4 Denpasar. Oleh karena itu, data BONP di Kota Denpasar hanya bersumber dari data SMA Negeri 4 Denpasar sebagai berikut.

#### **1) SMA Negeri 4 Denpasar**

SMA Negeri 4 Denpasar adalah SMA yang cukup besar dengan jumlah siswa 1.045 orang dan 46 rombongan belajar. Persentase pengeluaran BONP untuk masing-masing sub komponen biaya dapat dilihat pada Grafik 4.70. berikut.



Grafik 53. Persentase Pengeluaran BOPN menurut Komponen Biaya di SMAN 4 Denpasar

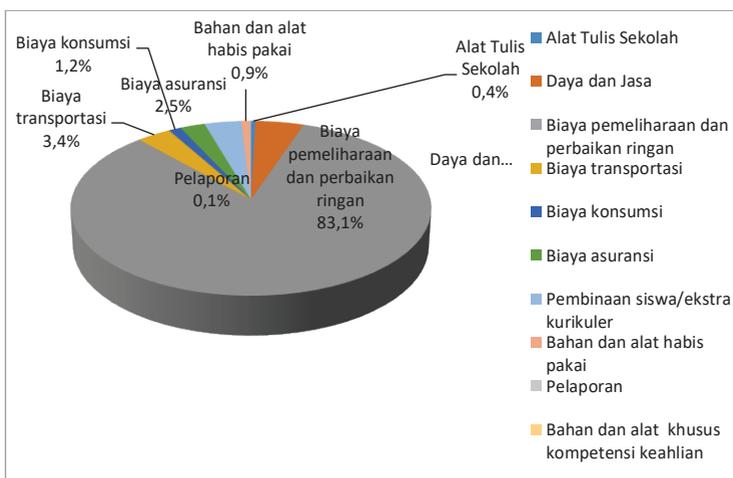
Dalam grafik di atas terlihat bahwa persentase pengeluaran BOPN terbesar ada pada Sub Komponen Biaya Bahan dan Alat habis Pakai sebesar 25,2% serta Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 23%. Berikutnya adalah biaya Transportasi sebesar 16,7%, Biaya Daya dan Jasa sebesar 13,3%, serta Biaya Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler sebesar 11,3%. Sedangkan biaya ATS hanya 6% dan untuk komponen biaya lainnya kurang dari 5%. Kondisi pembiayaan untuk BOPN ini masih relatif wajar karena persentase sub komponen BOPN yang besar ada pada sub komponen biaya langsung proses pembelajaran.

## b. SMK

SMK sampel di Kota Denpasar terdiri atas 6 SMK. Dari 6 sampel sekolah tersebut, hanya satu SMK yang mengisi data dengan lengkap walaupun dari sisi komposisi untuk masing-masing pengeluaran sub komponen BONP masih belum tepat. Sementara itu, 5 SMK sampel lainnya tidak mengisi data dengan lengkap dan kurang tepat. Oleh karena itu, data sekolah sampel yang disajikan hanya data pengeluaran BONP SMK Negeri 3 Denpasar.

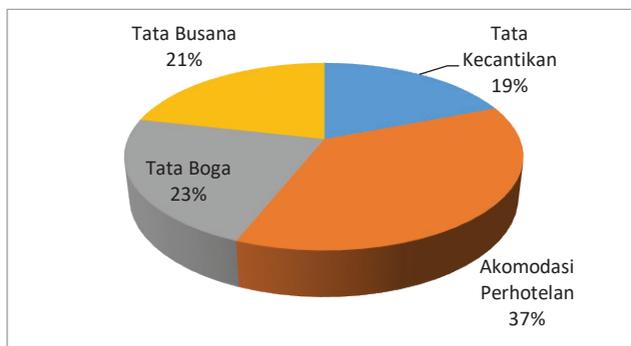
### 1) SMK Negeri 3 Denpasar

SMK Negeri 3 Denpasar adalah SMK Negeri yang sedang dengan jumlah siswa 436 orang dengan 14 rombongan belajar. Persentase pengeluaran BONP untuk masing-masing sub komponen biaya dapat dilihat pada Grafik 4.71. berikut.



Grafik 54. Persentase Pengeluaran (BONP) Personalia Menurut Komponen Biaya SMKN 3 Denpasar

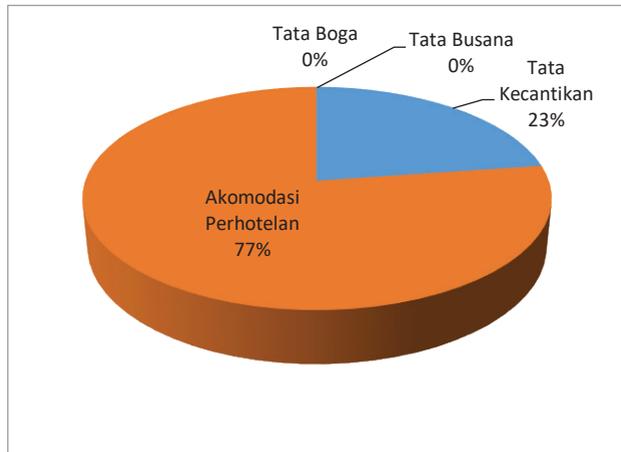
Dalam grafik di atas terlihat bahwa persentase pengeluaran BONP terbesar ada pada Sub Komponen Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sebesar 83,1%. Kondisi ini sangat tidak lazim karena sebagian besar penerimaan sekolah terkuras untuk membiayai Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan untuk aset yang dimiliki sekolah. Bahkan untuk semua sub komponen BONP lainnya, persentase pengeluarannya kurang dari 5%. Selain itu, sebagai sekolah kejuruan semestinya sekolah mempunyai pengeluaran biaya bahan dan alat khusus KK untuk kegiatan praktik dan juga biaya Uji Kompetensi. Walaupun demikian, sekolah memiliki data proporsi biaya Bahan dan Alat khusus KK dan Biaya Uji Kompetensi. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk kedua biaya tersebut didanai dari sumber yang tidak langsung dikelola oleh sekolah. Kemungkinan besar kedua jenis biaya ini didanai langsung oleh orangtua siswa. Berikut disajikan proporsi biaya Bahan dan Alat khusus KK pada Grafik 4.72.



Grafik 55. Proporsi Biaya Bahan dan Alat Menurut KK SMKN 3 Denpasar

Grafik di atas merupakan rincian proporsi penggunaan biaya Bahan dan Alat Khusus KK untuk 4 jenis KK. Proporsi terbesar adalah untuk KK Akomodasi Perhotelan 37%, diikuti dengan Tata Boga 23%, Tata Busana 21%, dan Tata Kecantikan 19%.

Adapun proporsi Biaya Uji Kompetensi untuk masing-masing KK dapat dilihat pada Grafik 4.73.



Grafik 56. Proporsi Biaya Uji Kompetensi/Prakerin menurut KK SMKN 3 Denpasar

Pada grafik di atas terlihat bahwa proporsi terbesar untuk kegiatan Uji Kompetensi adalah untuk KK Akomodasi Perhotelan sebesar 77% dan untuk Tata Kecantikan sebesar 23%. Sedangkan untuk Tata Busana dan Tata Boga tidak didanai dari sumber yang dikelola sekolah.

Kemungkinan biaya uji kompetensi untuk kedua KK tersebut didanai langsung oleh orangtua siswa.

### C. Besaran Biaya Operasional Pendidikan Nonpersonalia (BONP) di Sekolah Sampel

Berdasarkan hasil pengumpulan data biaya operasional pendidikan nonpersonalia di sekolah sampel diperoleh gambaran besaran biaya di masing-masing sekolah sampel bervariasi, baik untuk SMA maupun SMK. Variasi yang ada di SMA sampel tidak dibedakan untuk masing-masing jurusan yang ada di SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, sehingga satuan BONP hanya satu nilai untuk tiap sekolah. Sementara itu, variasi besaran satuan BONP di SMK sampel juga hanya satu nilai per sekolah sampel walaupun di SMK terdiri dari beberapa layanan KK.

#### 1. Besaran BONP di SMA Sampel

Berikut disajikan besaran BONP di 12 SMA sampel yang memiliki data yang relatif lengkap dari semua SMA sampel yang ada (20 SMA).

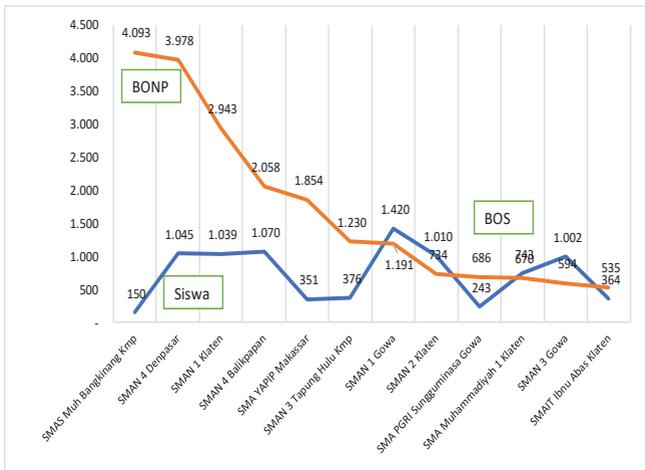
Tabel 9. BONP di SMA Sampel Tahun 2017/2018

No.	Nama Sekolah	Kabupaten/ Kota	Siswa	BONP	Total BONP	BOS	Total BOS
1	SMAN 4 Balikpapan	Kota Balikpapan	1.070	2.058	2.201.774	1.400	1.498.000 ,-
2	SMAN 4 Denpasar	Kota Denpasar	1.045	3.978	4.156.572	1.400	1.463.000 ,-
3	SMAN 1 Klaten	Kab. Klaten	1.039	2.943	3.057.544	1.400	1.454.600
4	SMAN 2 Klaten	Kab. Klaten	1.010	734	741.000,-	1.400	1.414.000 ,-

No.	Nama Sekolah	Kabupaten/ Kota	Siswa	BONP	Total BONP	BOS	Total BOS
5	SMA Muhammadiyah 1	Kab. Klaten	743	670	497.957	1.400	1.040.200
6	SMAIT Ibnu Abas Klaten	Kab. Klaten	364	535	194.920	1.400	509.600
7	SMAN 1 Gowa	Kab. Gowa	1.420	1.191	1.691.200	1.400	1.988.000 ,-
8	SMAN 3 Gowa	Kab. Gowa	1.002	594	595.636	1.400	1.402.800
9	SMA PGRI Sungguminasa	Kab. Gowa	243	686	166.797	1.400	340.200
10	SMA YAPIP Makassar	Kab. Gowa	351	1.854	650.926	1.400	491.400
11	SMAN 3 Tapung Hulu	Kab. Kampar	376	1.230	462.363	1.400	526.400
12	SMAS Muh Bangkinang	Kab. Kampar	150	4.093	614.020	1.400	210.000,-

Dalam tabel di atas disajikan 12 SMA sampel dengan variasi BONP berkisar antara Rp535.000,- s.d. Rp4.093.000,- per siswa per tahun. Dari 12 SMA tersebut, 7 SMA diantaranya memiliki BONP di atas dana BOS sebesar Rp1.400.000,- per siswa per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih memerlukan sumber dana lain untuk menutup besarnya kebutuhan biaya operasional nonpersonalia tersebut. Bagi SMA di kabupaten/kota yang menerapkan sekolah gratis maka sekolah hanya mencukupkan pembiayaan biaya operasional nonpersonalia dengan dana yang diterima. Sebagai contoh, di Kota Balikpapan dimana Pemerintah Daerah menerapkan pendidikan gratis, SMA Negeri hanya beroperasi dengan dana yang diterima sebesar Rp2.300.000,- (BOS Rp1.400.000,- ditambah dana dari Pemda Provinsi sebesar Rp900.000,-). Sedangkan untuk

SMA di Denpasar yang tidak menerapkan pendidikan gratis dapat beroperasi dengan biaya yang dibutuhkan, contohnya SMAN 4 Denpasar dengan BONP sebesar Rp3.978.000,- dibiayai dari beberapa sumber, yaitu dari BOS Rp1.400.000,- + BOSDA Provinsi Rp700.000,- = Rp2.600.000,-, kekurangannya sebesar Rp1.378.000,- diperoleh dari sumber lainnya, termasuk dari orangtua siswa.



Grafik 57. BONP di SMA Sampel Tahun 2017/2018

Pada grafik di atas digambarkan variasi besaran BONP dan jumlah siswa yang dilayani di masing-masing SMA sampel dengan besaran BONP tersebut. Grafik tersebut tidak menunjukkan pola pengeluaran biaya operasional nonpersonalia yang jelas. Contoh, SMAS Muhammadiyah Bangkinang dengan jumlah siswa 150 orang BONP yang

dibutuhkan sebesar Rp4.093.000,- per siswa per tahun. Bila ditelusuri lebih jauh ternyata biaya terbesar ada pada sub komponen biaya transportasi dan honor guru dan karyawan. Sekolah memasukkan besaran biaya honor guru karena sekolah ini adalah sekolah swasta dan semua biaya operasional menjadi tanggung jawab sekolah sehingga sekolah tidak memisahkan biaya operasional menjadi biaya operasional personalia dan biaya operasional nonpersonalia.

Berbeda halnya dengan SMAN 1 Gowa, dan SMAN 3 Gowa hanya beroperasi dengan BONP kurang dari Rp1.400.000,- per siswa per tahun, artinya lebih rendah dari dana BOS Pusat dengan jumlah siswa yang relatif lebih banyak, yaitu 1.420 siswa dengan BONP Rp1.191.000,- untuk SMAN 1 Gowa dan 1.002 siswa dengan BONP Rp594.000,- untuk SMAN 3 Gowa. Kedua sekolah SMAN ini tidak memasukkan biaya transportasi guru dan karyawan ke dalam BONP karena biaya transportasi guru dan karyawan merupakan biaya operasional personalia yang dibiayai oleh Pemerintah melalui gaji dan tunjangan PNS bagi guru dan karyawan yang berstatus PNS.

Sementara itu, untuk guru dan karyawan honorer sebagian dibayar melalui dana BOS dan sebagian dari Pemda Provinsi. BONP di SMAN di Kabupaten Gowa ini belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan biaya operasional nonpersonalia di sekolah tersebut karena Kabupaten Gowa menerapkan sekolah gratis, sehingga sekolah tidak dapat menarik dana dari orangtua dan sedapat mungkin hanya beroperasi dengan dana yang tersedia, yaitu dana BOS karena sejak pengelolaan pendidikan menengah menjadi

kewenangan Pemda Provinsi, otomatis bantuan dana dari Kabupaten Gowa ke sekolah menengah ditiadakan, sementara Pemda Provinsi belum memiliki kebijakan untuk berkontribusi dalam membantu mendanai kebutuhan BONP di sekolah menengah yang menjadi ke-wenangannya.

Kondisi BONP di semua SMA sampel tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menggeneralisasi BONP di seluruh SMA karena kebutuhan BONP di tiap-tiap sekolah dipengaruhi oleh kebutuhan riil BONP di sekolah, status sekolah (negeri/swasta), dan kebijakan Pemda Provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah.

## 2. Besaran BONP di SMK Sampel

Pola besaran BONP di SMK sampel tidak terlalu berbeda dengan pola BONP di SMA, yaitu tidak adanya pola khusus yang dapat dijadikan acuan dalam perhitungan biaya operasional nonpersonalia di sekolah. Besaran BONP di SMK sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. BONP di SMK Sampel Tahun 2017/2018

No.	Nama Sekolah	Kabupaten/ Kota	Siswa	BONP	Total BONP	BOS	Total BOS
1	SMKN 1 Balikpapan	Kota Balikpapan	2.073	4.429	9.181.29 2	1.400	2.902.200
2	SMKN 1 Trucuk	Kab. Klaten	1.567	1.602	2.509.58 4	1.400	2.193.800
3	SMKN 1 Pedan	Kab. Klaten	1.038	1.999	2.074.80 9	1.400	1.453.200
4	SMK Kristen 2 Klaten	Kab. Klaten	134	1.749	234.327	1.400	187.600
5	SMK Krisda Klaten	Kab. Klaten	134	2.845	381.192	1.400	187.600
6	SMKN 2 Gowa	Kab. Gowa	1.185	2.374	2.812.62 7	1.400	1.659.000,-
7	SMKN 3 Gowa	Kab. Gowa	1.002	1.606	1.608.88 9	1.400	1.402.800

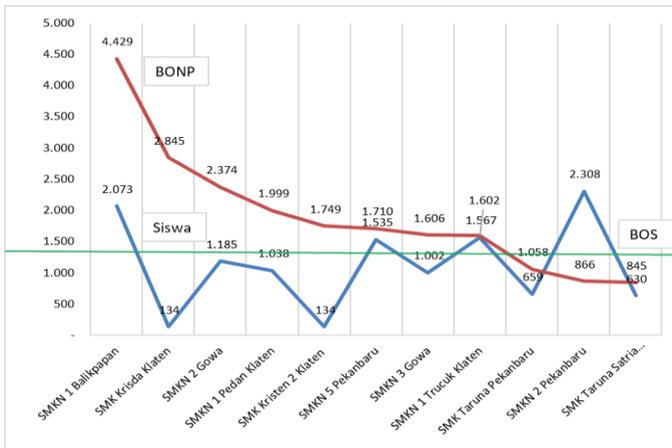
No.	Nama Sekolah	Kabupaten/ Kota	Siswa	BONP	Total BONP	BOS	Total BOS
8	SMKN 2 Pekanbaru	Kota Pekanbaru	2.308	866	1.997.644	1.400	3.231.200
9	SMKN 5 Pekanbaru	Kota Pekanbaru	1.535	1.710	2.625.267	1.400	2.149.000,-
10	SMK Taruna	Kota Pekanbaru	659	1.058	697.124	1.400	922.600
11	SMK Taruna Satria	Kota Pekanbaru	630	845	532.378	1.400	882.000,-

BONP SMK sampel memperlihatkan variasi yang cukup tinggi yaitu berkisar antara Rp845.000,- s.d. Rp4.429.000,- per siswa per tahun. Variasi yang cukup tinggi ini dapat dipahami mengingat tiap SMK memiliki beberapa KK dimana BONP untuk masing-masing KK tersebut sangat bervariasi sesuai dengan besarnya kebutuhan biaya untuk sub komponen bahan dan alat habis pakai untuk praktek siswa.

Pada SMK dengan program keahlian yang memerlukan peralatan dan bahan praktek yang mahal, maka BONP untuk KK tersebut akan tinggi. Sebagai contoh, SMKN 1 Balikpapan memiliki BONP paling tinggi dari semua SMK sampel, yaitu Rp4.429.000,- per siswa per tahun. Tingginya BONP di SMKN ini cukup wajar karena KK yang dimiliki SMK ini cukup banyak, yaitu 10 KK.

SMK dengan berbagai KK teknik cenderung memiliki BONP besar karena kebutuhan biaya prakteknya besar. SMK ini juga memiliki jumlah siswa yang cukup besar yaitu 2.073 siswa. Sedangkan untuk SMK dengan BONP terkecil adalah SMK Taruna Satria Pekanbaru dengan jumlah siswa 630 siswa dan 5 KK. Walaupun kedua SMK sampel tersebut sama-sama SMK dengan bidang keahlian

teknik namun dalam pengeluaran biaya operasional nonpersonalia tidak sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya BONP di tiap SMK sangat tergantung pada KK apa yang dimiliki sekolah tersebut.



Grafik 58. BONP di SMK Sampel Tahun 2017/2018

Pada grafik di atas terlihat bahwa BONP di SMK sebagian besar atau 8 dari 11 SMK sampel memiliki BONP di atas dana BOS (Rp1.400.000,-). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan BONP di SMK jauh lebih besar daripada kebutuhan BONP di SMA. Besaran BONP di SMK cenderung besar di sub komponen Alat dan bahan praktek untuk tiap KK. Dengan demikian, dibutuhkan kontribusi dari sumber dana lain selain dana BOS. Padahal saat ini dana BOS diberikan sama, baik untuk SMA maupun SMK.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pada umumnya siswa yang sekolah di SMK: (1) cenderung berasal dari orangtua dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah; (2) biaya pendidikan di SMK lebih tinggi daripada di SMA; (3) adanya kebijakan agar proporsi SMK lebih besar daripada SMA. Ketiga hal tersebut mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih bagi penyelenggaraan SMK baik dari sisi pendanaan maupun kebijakan yang mendukung penyelenggaraan SMK.

Besaran BONP di tiap sekolah sampel baik di SMA maupun di SMK secara umum tidak dapat digeneralisasi mengingat adanya keterbatasan jumlah sampel yang kurang mewakili kondisi di SMA dan SMK di Indonesia yang memiliki keragaman wilayah dan keragaman kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Selain itu, dalam mengisi instrumen daftar isian tentang komponen dan sub komponen BONP, ada kecenderungan sekolah kurang tepat dalam mengelompokkan tambahan komponen biaya operasional yang baru, yang pada saat penyusunan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 belum ada, sehingga mengakibatkan tambahan komponen BONP yang baru tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan. Sebagai contoh, komponen biaya yang ditambahkan tersebut merupakan komponen biaya investasi atau biaya operasional personalia sehingga tidak tepat bila ditambahkan sebagai tambahan komponen BONP. Oleh karena itu, data BONP dari SMA dan SMK sampel tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penghitungan BONP yang baru.

#### **D. Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan Nonpersonalia Wajar 12 tahun**

Menyadari bahwa data BONP dari SMA dan SMK sampel tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penghitungan BONP yang baru, maka penghitungan besaran BONP dilakukan hanya dengan cara mengoreksi standar biaya operasional pendidikan nonpersonalia dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 dengan laju inflasi sejak Permendiknas tersebut ditetapkan tahun 2009 s.d. tahun 2018. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dikalikan dengan proyeksi jumlah siswa pendidikan menengah (SMA dan SMK) 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2019/2020 s.d. tahun 2023/2024. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh tabel BONP di SMA dengan tiga (3) jurusan IPA, IPS, dan Bahasa sebagai berikut.

Tabel 11. Satuan BONP SMA Tahun 2018

No.	Jurusan	Biaya Operasi Nonpersonalia (RpRibu) Tahun 2018		
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik
1	SMA/MA Bahasa	282.632	47.105	1.472
2	SMA/MA IPS	282.632	47.105	1.472
3	SMA/MA IPA	297.352	49.559	1.549
		Rata-rata		1.498

Sumber: Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 Inflasi Indonesia, BPS

Berdasarkan hasil perhitungan dimana besaran BONP dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 yang dikoreksi dengan laju inflasi sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2018 diperoleh besaran

BONP yang baru untuk tahun 2018 seperti terlihat pada Tabel di atas.

Guna menghitung besarnya biaya operasional nonpersonalia yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Wajar 12 tahun, maka besaran BONP hasil perhitungan untuk tahun 2018 tersebut dikalikan dengan proyeksi jumlah siswa SMA untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2019/2020 s.d. tahun 2023/2024. BONP SMA yang dijadikan dasar perhitungan adalah BONP rata-rata SMA, yaitu sebesar Rp1.498.000,- pada tahun 2018. Besaran BONP yang menjadi dasar perhitungan setiap tahunnya dikoreksi dengan estimasi inflasi pada tahun sebelumnya sehingga estimasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Wajar 12 tahun pada tahun-tahun yang diproyeksikan berikutnya relatif lebih akurat.

Perhitungan proyeksi BONP untuk SMA dihitung dengan mengalikan proyeksi jumlah siswa dengan proyeksi rata-rata BONP SMA pada tahun yang sama. Hasil perhitungan proyeksi biaya operasional nonpersonalia penyelenggaraan SMA dalam rangka Wajar 12 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Proyeksi Kebutuhan BONP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2018-2023 (Dalam 000,-rupiah)

Tahun	Siswa	Biaya Satuan	Inflasi	Total Biaya	BOS	Total BOS	Kesenjangan
2018	4.837.257	1.498	2,22	7.246.210.986	1.400	6.772.159.800	474.051.186
2019	4.861.771	1.550	3,50	7.535.745.050	1.449	7.044.706.179	491.038.871
2020	4.876.484	1.601	3,29	7.807.250.884	1.497	7.300.096.548	507.154.336
2021	4.904.057	1.650	3,08	8.091.694.050	1.543	7.566.959.951	524.734.099
2022	4.961.736	1.697	2,86	8.420.065.992	1.587	7.874.275.032	545.790.960
2023	5.052.633	1.742	2,65	8.801.686.686	1.629	8.230.739.157	570.947.529

Sumber: (1) Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009, (2) Proyeksi Siswa, PDSPK, dan (3) Inflasi Indonesia, BPS.

Tabel di atas menyajikan total proyeksi kebutuhan BONP SMA untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun selama 5 tahun ke depan sejak tahun ajaran 2019/2020 s.d. tahun 2023/2024. Pada Tahun 2019/2020 dibutuhkan dana sebesar Rp7.536 triliun sementara dana yang selama ini dapat diberikan oleh pemerintah melalui BOS adalah sebesar Rp7.045 triliun sehingga ada kekurangan dana sebesar Rp491 milyar. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, bila pemerintah akan menyelenggarakan Wajar 12 tahun berarti adanya kekurangan dana tersebut perlu dicarikan solusinya.

Selanjutnya untuk menghitung besarnya BONP yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SMK, perlu dihitung dengan metode yang sama seperti yang dilakukan pada SMA. BONP SMK yang digunakan untuk menghitung adalah BONP hasil perhitungan dengan mengoreksi BONP SMK yang ada di Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 dengan laju inflasi dari tahun 2009 s.d. tahun 2018. BONP SMK dihitung berdasarkan kebutuhan BONP untuk masing-masing KK yang seluruhnya berjumlah 146 KK. BONP dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 dirinci berdasarkan Program Keahlian yang berjumlah 76 Program Keahlian. Sementara itu, berdasarkan Perdirjen Dikdasmen Nomor 06 Tahun 2018, 76 program keahlian tersebut dikembangkan menjadi 146 KK. Oleh karena itu, perhitungan BONP 146 KK untuk Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan pembiayaan yang mengacu pada data biaya dari 76 program keahlian yang sudah dikoreksi dengan laju inflasi tahun 2009 s.d. Tahun 2018 sesuai dengan pengembangan spektrum tersebut.

Dalam penghitungan BONP SMK yang dijadikan acuan untuk menghitung besarnya kebutuhan biaya operasional nonpersonalia dalam rangka penyelenggaraan Wajar 12 tahun adalah nilai rata-rata BONP dari 146 KK, yaitu Rp2.672.000,- untuk tahun 2018. (data hasil perhitungan BONP untuk 146 KK terlampir). Biaya operasional nonpersonalia SMK untuk 146 KK berkisar antara Rp1.961.000,- s.d. Rp3.363.800 per siswa per tahun dan nilai rata-rata BONP SMK adalah sebesar Rp2.672.000,- per siswa per tahun untuk tahun 2018.

Perhitungan proyeksi BONP untuk SMK dihitung dengan mengalikan proyeksi jumlah siswa SMK dengan proyeksi rata-rata BONP SMK pada tahun yang sama. Proyeksi biaya

operasional nonpersonalia penyelenggaraan SMK dalam rangka Wajar 12 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan BONP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun 2018-2023 (Dalam 000,- rupiah)

Tahun	Siswa	BONP	Inflasi	Total BONP	BOS	Total BOS	Kesenjangan
2018	5.136.305	2.672	2,22	13.724.206.960	1.400	7.190.827.000,-	6.533.379.960
2019	5.253.671	2.766	3,50	14.531.653.986	1.449	7.612.569.279	6.919.084.707
2020	5.319.627	2.857	3,29	15.198.174.339	1.497	7.963.481.619	7.234.692.720
2021	5.331.583	2.945	3,08	15.701.511.935	1.543	8.226.632.569	7.474.879.366
2022	5.374.694	3.029	2,86	16.279.948.126	1.587	8.529.639.378	7.750.308.748
2023	5.452.782	3.109	2,65	16.952.699.238	1.629	8.882.581.878	8.070.117.360

Sumber: Diolah dari estimasi siswa dan satuan BONP untuk SMK

Berdasarkan tabel tersebut, besaran proyeksi BONP SMK yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun 2019/2020 adalah sebesar Rp14.532 triliun, sementara dana yang diberikan Pemerintah Pusat selama ini melalui BOS adalah sebesar Rp7.613 triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp6.919 triliun. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Kekurangan ini jumlahnya cukup besar sehingga perlu dicarikan solusi bagaimana kekurangan dana tersebut bisa terpenuhi.

Tabel 14. Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan BONP dan BOS SMA dan SMK Tahun 2018-2023 (dalam 000,-rupiah)

Tahun	Total BONP SMA	Total BONP SMK	Total BONP SMA & SMK	Total BOS SMA	Total BOS SMK	TOTAL BOS SMA & SMK	Kesenjangan
2018	7.246.210.986	13.724.206.960	20.970.417.946	6.772.159.800	7.190.827.000,-	13.962.986.800	7.007.431.146
2019	7.535.745.050	14.531.653.986	22.067.399.036	7.044.706.179	7.612.569.279	14.657.275.458	7.410.123.578
2020	7.807.250.884	15.198.174.339	23.005.425.223	7.300.096.548	7.963.481.619	15.263.578.167	7.741.847.056
2021	8.091.694.050	15.701.511.935	23.793.205.985	7.566.959.951	8.226.632.569	15.793.592.520	7.999.613.465
2022	8.420.065.992	16.279.948.126	24.700.014.118	7.874.275.032	8.529.639.378	16.403.914.410	8.296.099.708
2023	8.801.686.686	16.952.699.238	25.754.385.924	8.230.739.157	8.882.581.878	17.113.321.035	8.641.064.889

Berdasarkan proyeksi kebutuhan BONP SMA dan SMK, total kebutuhan dana untuk membiayai BONP SMA dan SMK pada tahun 2019/2020 adalah sebesar Rp22.067 triliun, yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dibandingkan dengan ketersediaan dana yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui BOS yaitu sebesar Rp13.963 triliun, maka pada tahun 2019/2020 terdapat kesenjangan kebutuhan dana untuk BONP SMA dan SMK yaitu sebesar Rp7.410 triliun. Agar kebutuhan dana untuk membiayai BONP SMA dan SMK tersebut dapat terpenuhi, perlu dilakukan strategi penggalan dana yang masih potensial, baik dari pemerintah, orangtua, maupun masyarakat luas.

## **E. Strategi Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Bermutu**

Penyelenggaraan Wajar 12 tahun membutuhkan BONP yang cukup besar, melebihi bantuan pemerintah yang selama ini dialokasikan melalui dana BOS. Sementara belum semua Pemerintah Daerah berkontribusi dalam mendanai BONP di sekolah. Selama ini masyarakat memiliki pemahaman bahwa Wajib Belajar identik dengan sekolah gratis. Gratis yang dimaksud adalah beban biaya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu Wajar 12 tahun berarti biaya penyelenggaraan pendidikan menengah ditanggung oleh pemerintah, sehingga orangtua bebas dari membayar iuran sekolah.

Kebutuhan untuk penyelenggaraan Wajar 12 tahun sudah sangat mendesak mengingat perkembangan global dimana Indonesia perlu menyiapkan tenaga kerja yang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang tidak dapat dibendung untuk memasuki dunia kerja di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pendanaan pendidikan menengah dengan menggali potensi sumber dana yang ada. Adapun sumber dana yang potensial untuk digali adalah: (1) Pemerintah Pusat; (2) Pemda Provinsi sebagai pengelola penyelenggaraan pendidikan menengah; (3) orangtua siswa yang mampu; dan (4) masyarakat luas, antara lain CSR.

### **1. Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah

Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini berlaku bagi semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan semua jenjang sekolah luar biasa baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, sekolah sampel di kabupaten/kota seluruhnya menerima dana BOS sebagai sumber pendanaan kebutuhan biaya operasional mereka. Selain dana BOS, tidak ada lagi dana yang disalurkan dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kebutuhan biaya operasional sekolah.

Adapun tujuan diberikannya BOS dari Pemerintah Pusat ini dibedakan antara jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK, tujuan diberikannya BOS adalah untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personalia yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK;
- e. memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya

tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau

f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Adapun komponen biaya yang dapat dibiayai oleh dana BOS di SMA dan SMK adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru
- c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- d. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- e. Pengelolaan Sekolah
- f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
- g. Langganan Daya dan Jasa
- h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
- i. Pembayaran Honor. Pada prinsipnya pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan. Dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan honor guru pada jenjang SMA, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1) dana BOS untuk membayar honor guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling banyak 15% dari total BOS yang diterima.

- 2) dana BOS untuk membayar honor guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat paling banyak 30% dari total BOS yang diterima;
- 3) guru yang mendapat pembayaran honor merupakan guru honorer yang wajib: 1) memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan 2) mendapatkan penugasan dari Pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda.

j. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.

Khusus untuk SMK, dana BOS juga dapat digunakan untuk:

- k. Penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan, Sertifikasi Kejuruan dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (TOEIC).
- l. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

Besaran dana BOS yang diberikan baik untuk SMA maupun SMK sama, yaitu Rp1.400.000,- per siswa per tahun. Pada jenjang pendidikan menengah tidak diberlakukan kebijakan alokasi minimal, sehingga jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah sebanyak jumlah siswa di sekolah tersebut dikalikan dengan biaya satuan BOS Rp1.400.000,-.

Ketentuan besaran biaya satuan BOS dan pemanfaatan dana BOS tersebut menjadi acuan bagi semua SMA dan SMK sampel di semua kabupaten/kota. Dari sisi besaran biaya satuan BOS yang diberikan berdasarkan jumlah siswa dinilai kurang tepat karena cenderung memberatkan sekolah khususnya untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit sementara aset yang dimiliki cukup banyak. Berbeda halnya dengan jenjang pendidikan dasar yang memberlakukan alokasi minimal, dimana sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang diberikan alokasi BOS sebanyak 60 siswa, sedangkan pemberian dana BOS berdasarkan jumlah siswa diberlakukan bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa 60 orang ke atas. Bila hal ini diberlakukan juga untuk sekolah pada jenjang pendidikan menengah maka sekolah akan lebih leluasa dalam memelihara aset yang mereka miliki. Selain itu, besaran biaya satuan BOS yang sama baik untuk SMA maupun SMK juga dinilai kurang tepat karena kebutuhan biaya operasional untuk proses pembelajaran di SMA berbeda dengan kebutuhan biaya operasional untuk proses pembelajaran di SMK, khususnya SMK untuk jurusan yang membutuhkan biaya praktek yang besar.

Besaran biaya satuan BOS yang diterima sekolah memiliki efek yang berbeda untuk masing-masing sekolah sampel, khususnya sekolah negeri. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Pemda yang menjadi sampel kajian ini. Di Kabupaten Klaten yang tidak menerapkan kebijakan sekolah gratis, dana BOS dinilai sangat membantu sekolah dalam mendanai kebutuhan biaya operasionalnya karena selain menerima

BOS, sekolah juga masih dapat menarik iuran dari orangtua siswa, yang besarnya dimusyawarahkan bersama antara sekolah dan Komite Sekolah sebagai wakil dari orangtua siswa. Sementara di Kabupaten Gowa yang menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya sekolah negeri terpaksa mencukupkan kebutuhan biaya operasionalnya dengan dana BOS yang mereka terima sebagai sumber pendanaan satu-satunya, karena sekolah tidak memiliki sumber pendanaan lainnya. Hal ini mengakibatkan sekolah mengurangi berbagai kegiatan pembelajaran untuk menghemat biaya, antara lain kegiatan pembinaan siswa. Berbeda halnya dengan sekolah swasta, dana BOS benar-benar membantu karena walaupun menerima dana BOS, sekolah swasta tetap dapat menarik iuran dari orangtua siswa, bahkan sumber dari orangtua menjadi andalan utama sumber pendanaan sekolah.

## **2. Pemerintah Provinsi**

Pemda Provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pendidikan menengah di wilayahnya termasuk pendanaannya. Walaupun memiliki tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan di wilayahnya, namun tidak semua Pemda Provinsi mengalokasikan dana untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya. Hal ini tergantung dari kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Pemda Provinsi, apakah mau mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah menengah atau tidak.

Sejauh ini, belum semua Pemda Provinsi menyalurkan BOSDA ke sekolah menengah. Sebagian berpedoman bahwa sekolah menengah masih bisa menarik iuran sekolah dari orangtua sebagai sumber dana pembiayaan operasional sekolah. Sebagian lainnya telah menyalurkan BOSDA dengan biaya satuan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Sebagai contoh, provinsi Jawa Tengah telah memberikan BOSDA provinsi yang disalurkan khusus ke sekolah negeri. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan bantuan dana rutin ke sekolah menengah, khususnya ke SMA dan SMK sampel di Kabupaten Gowa.

Lain halnya dengan Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten/kota. Sebelum pengalihan kewenangan, 5 kabupaten/kota di antaranya menerapkan pendidikan gratis. Dalam upaya mengamankan kebijakan, setelah pengalihan kewenangan, Dinas Pendidikan Provinsi tetap menerapkan pendidikan gratis di 5 kabupaten/kota tersebut, meliputi: i) kabupaten Kampar; ii) kabupaten Kuantan Singingi; iii) kabupaten Bengkalis; iv) kabupaten Pelalawan; dan v) kabupaten Siak. Namun demikian, untuk mengurangi perlakuan yang berbeda, Dinas Pendidikan Provinsi sudah mulai mengingatkan kepala SMA dan SMK di kabupaten/kota yang menerapkan pendidikan gratis, bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilanjutkan, sehingga sekolah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dan orangtua dalam pendanaan biaya operasional.

Dampak pendidikan gratis adalah terganggunya pelaksanaan program/kegiatan di SMA dan SMK. Kepala sekolah menjadi bingung karena keterbatasan dana membuat sekolah tidak dapat berinovasi. BOSDA yang bersumber dari Provinsi, setelah pengalihan kewenangan besarnya sesuai dengan kebutuhan atau biaya satuan yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota yang menggratiskan sebelum pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yaitu Rp3.600.000,- s.d. Rp4.800.000,-/siswa/tahun. Kabupaten/kota yang tidak menggratiskan berarti sekolahnya masih memungut dan diberi bantuan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp450.000,-/siswa/tahun.

Kebijakan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap SMA dan SMK di 5 kabupaten yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi menimbulkan permasalahan di sekolah. Bentuk permasalahan tersebut adalah terjadinya 2 blok keberpihakan, ada blok yang tidak mendukung kepala sekolah dan ada blok yang mendukung kepala sekolah. Dulu ada sekolah unggulan dan sekolah minimalis (beroperasi dengan biaya minimal). Standar biaya di sekolah minimalis juga bersifat minimalis. Kenyataannya biaya yang dikeluarkan oleh sekolah di dalam satu kota saja bervariasi. LSM dan wartawan selalu mempertanyakan perbedaan-perbedaan tersebut. Namun demikian, setiap hari selalu dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan kenyataan tersebut disimpulkan tentang perlunya standar pembiayaan, termasuk untuk SMK yang pembiayaannya berbeda-beda antar Kompetensi Keahlian.

Selain untuk BOSDA, APBD pendidikan Pemda Provinsi juga digunakan untuk membayar honor 5.860 orang guru bantu yang besarnya Rp2.200.000,-/guru/bulan, sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Aturan BOS, untuk membayar guru honor itu tidak boleh lebih dari 15 persen, sehingga sebanyak 60% BOSDA digunakan untuk honor guru. Dengan demikian sumber pembayaran honor guru di Provinsi Riau ini adalah BOS dan BOSDA. BOSDA hanya diberikan kepada SMA dan SMK Negeri. Besar honor guru rerata Rp500.000,- per bulan. Selama ini kepala sekolah negeri terlalu berani mengangkat guru honor. Sekarang ini pengangkatan guru dianalisis oleh Dinas Pendidikan provinsi supaya BOSDA mencukupi. Selain BOSDA, sumber lain dari honor guru adalah uang komite yang minimal besarnya Rp1.500.000,-/siswa/tahun. Agar guru dapat mengajar dengan tenang, kepala sekolah diharapkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Disdik provinsi.

Salah satu usul dari kepala sekolah swasta adalah sebagai berikut. Mengingat BOSDA hanya diberikan kepada sekolah negeri, sekolah swasta menyarankan agar besarnya pungutan dari orangtua tidak dipatok besarnya. Kalau biaya yang ditarik dari orangtua terlalu tinggi, dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sekolah swasta juga berharap memperoleh BOSDA, agar dapat menutupi biaya yang tidak terbayarkan oleh beberapa anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Minimal biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta adalah biaya untuk penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan biaya personalia. Biaya yang dibutuhkan per siswa Rp4.500.000,-/tahun di luar honor untuk guru dan tenaga

kependidikan. Untuk menentukan standar sekolah swasta, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) bisa menentukan standar, kemudian dapat menambahkan biaya operasional personalia (rerata Rp2.200.000,-/guru/bulan) untuk 60 orang guru. Kalau sekolah swasta ingin menstandarkan biaya personalia, bisa saja dianalogkan dengan gaji PNS.

Kondisi APBD Riau masih baik, meskipun untuk Dinas Pendidikan selalu minus. Namun untuk mengalokasikan BOSDA ke sekolah swasta bukan kewenangan Disdik provinsi. Sekedar untuk diketahui, tahun 2018 ini, hutang Pemda Provinsi Riau dari Pemerintah Pusat sebesar 900 milyar belum dibayar.

Sementara itu, kondisi di Provinsi Bali dengan Kota Denpasar sebagai sampel, menurut Kadisdik Provinsi, calon Gubernur mencanangkan Wajar 12 tahun. Saat ini disdik provinsi melalui APBD provinsi memberikan Rp700.000,-/siswa/tahun untuk siswa SMA dan Rp900.000,-/siswa/tahun untuk siswa SMK. Jumlah itu belum cukup, sesuai perhitungan tim kebutuhan biaya SD s.d SMA dan SMK. Bila benar-benar akan menerapkan pendidikan gratis akan dibutuhkan biaya yang sangat besar yang bila dianalogikan sebesar biaya untuk pendanaan semua SKPD yang ada di provinsi Bali. Besarnya biaya pendidikan tersebut adalah untuk mendanai bukan hanya sekolah negeri tetapi juga semua sekolah swasta. Sesuai dengan Pasal 282 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai

dari dan atas beban APBD. Dulu ada kebijakan yang berpihak ke siswa miskin. Provinsi Bali pun memanfaatkannya karena di provinsi Bali hanya kabupaten Badung saja yang yang memiliki pendapatan daerah surplus. Untuk Kota Denpasar jumlah siswa miskin sangat sedikit. Namun tidak demikian halnya dengan jumlah siswa miskin di kabupaten/kota lain di provinsi Bali, jumlahnya cukup banyak. Saat ini di provinsi Bali, orangtua siswa masih tetap dipungut iuran sesuai Surat Edaran Gubernur Bali tentang pendanaan pendidikan yang menjadi dasar memungut iuran sekolah.

Berbeda halnya dengan provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Balikpapan sebagai sampel. Setelah terjadi pengalihan kewenangan, sumber penerimaan SMA dan SMK menurun karena pendapatan dari Pemda Provinsi lebih sedikit dibandingkan waktu pengelolaan pendidikan menengah dengan masih di bawah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Untuk mengatasi hal itu, pada akhirnya SMK mengambil kebijakan tidak mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS) yang merupakan ajang bergengsi, karena sekolah tidak memiliki dana sendiri untuk mempersiapkan dan memberangkatkan siswa mengikuti LKS. Padahal provinsi Kalimantan Timur pernah menjadi juara umum LKS dan juga peringkat 5 besar LKS.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana adalah, sekolah mengurangi kegiatan dinas luar. Dalam pembelajaran juga terjadi pengurangan pembelian bahan praktek, sehingga volume praktek dikurangi dan/atau kegiatan praktek hanya berbentuk demonstrasi saja (siswa

tidak praktek) dan/atau praktek dilakukan siswa dalam kelompok. Jumlah siswa praktek per kelompok pun diperbesar, misalnya sebelumnya 2 orang per kelompok menjadi 3 orang per kelompok. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil UN, dimana dalam 3 tahun terakhir hasil UN menurun yang mengindikasikan turunnya kualitas pembelajaran.

Menurunnya penerimaan sekolah dari Pemda Provinsi juga disebabkan oleh defisitnya anggaran provinsi, selain jumlah siswa yang jumlahnya terus menerus bertambah. Untuk honor guru, sumber dananya pun dari Pemda Provinsi. Sebetulnya ada dana dari BOS yang dapat dialokasikan untuk honor guru, namun proses pertanggungjawabannya merepotkan, sehingga sekolah lebih senang menggunakan dana dari provinsi.

Sumber dana lain di SMK misalnya Unit Produksi (UP), namun belum dapat dikomersialkan sesuai dengan keputusan dari Disdik Provinsi. Hasil UP harus disetor ke Pemerintah Kota (Pemkot) dan biaya operasional UP ditanggung oleh Pemkot. Hal itu tidak memberikan insentif dan motivasi kepada guru dan siswa untuk mengembangkan UP, sehingga UP menjadi tidak berkembang. Padahal UP di SMK itu seharusnya digalakkan, bukan saja sebagai tempat praktek namun juga tempat untuk melatih siswa berproduksi sehingga saat siswa lulus sudah memiliki kompetensi untuk berwirausaha.

Kondisi sekolah yang menjadi peserta DKT memang bervariasi, ada yang kategori kuat ada yang lemah dilihat dari kemampuan orangtua siswa. Untuk sekolah swasta

juga ada yang yayasannya kuat juga ada yang lemah. Di sekolah swasta sudah tidak ada lagi guru yang diperbantukan. Khusus untuk SMK masih kekurangan guru mata pelajaran produktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangkan guru tamu. Banyaknya jumlah guru honor juga menjadi masalah tersendiri, bahkan ada sekolah yang sampai 2 bulan belum membayar honor guru. Selama ini tidak ada pengangkatan guru PNS oleh Pemda Provinsi.

Adanya berbagai kondisi pendanaan biaya operasional sekolah di kabupaten/kota sampel tersebut. Pemda Provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah sudah seharusnya berkontribusi dalam pendanaan BONP di sekolah. Besaran biaya bantuan tersebut disesuaikan dengan besarnya kebutuhan BONP di sekolah dan kemampuan dana yang dimiliki Pemda Provinsi. Agar hal ini dapat terpenuhi, harus ada komitmen Pemda Provinsi untuk berkontribusi sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam pengelolaan pendidikan menengah. Dalam hal ini Pemda Provinsi dapat bersinergi dengan lembaga/perorangan yang potensial untuk menjadi sumber pendanaan BONP di sekolah.

### **3. Orangtua Siswa**

Pendanaan biaya operasional pendidikan di sekolah menengah sampai saat ini sebagian besar masih menjadi tanggung jawab orangtua siswa. Hingga saat ini Pemerintah belum mencanangkan pendidikan gratis di jenjang pendidikan menengah. Itu berarti, sekolah masih

leluasa untuk menarik iuran komite dari orangtua siswa. Namun demikian dalam menarik iuran komite, sekolah perlu memperhatikan berbagai kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dimana sekolah berada. Kebijakan pemberian BOS dari Pemerintah Pusat membatasi jumlah iuran yang boleh ditarik oleh sekolah setelah bermusyawarah dengan komite sekolah dan juga kewajiban sekolah untuk membebaskan siswa kurang mampu dari iuran komite. Sedangkan bagi provinsi yang menerapkan kebijakan pemberian BOSDA semakin mengurangi jumlah iuran komite yang boleh ditarik sekolah dari orangtua siswa, bahkan ada kemungkinan kontribusi BOSDA justru dapat membebaskan seluruh siswa dari kewajiban membayar iuran komite. Berbagai contoh kontribusi orangtua siswa dalam pembiayaan operasional sekolah di kabupaten/kota sampel adalah sebagai berikut.

Di Kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah, seluruh sekolah swasta memberlakukan SPP kepada siswanya. Adapun besaran SPP berkisar antara Rp100.000,- hingga Rp250.000,-. Berdasarkan hasil diskusi, Pemerintah provinsi memberlakukan potongan SPP sebesar 60 persen untuk seluruh sekolah agar orangtua tidak keberatan dalam membayar SPP.

Sedangkan di Kabupaten Gowa, seluruh sekolah negeri membebaskan siswanya dari iuran SPP. Hal ini karena dampak dari kebijakan sebelumnya saat sekolah menengah masih dikelola kabupaten, dimana seluruh sekolah tidak boleh memungut biaya kepada siswa/orangtua karena Pemda Kabupaten Gowa menerapkan sekolah gratis.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sebetulnya merupakan dasar hukum orangtua siswa menyumbang, orangtua siswa juga sebetulnya tidak keberatan. Di SMAN 1 Kota Balikpapan yang merupakan sekolah elit, jika ada siswa berprestasi yang perlu biaya untuk mengikuti berbagai lomba atau kegiatan, maka disampaikan ke orangtua siswa yang bersangkutan. Biasanya orangtua mereka bersedia menanggung semua biaya yang diperlukan. Permasalahan yang muncul adalah jika orangtua siswa yang berprestasi tersebut kurang mampu secara ekonomi. Sementara itu, sekolah swasta leluasa memungut iuran sekolah, sehingga sekolah swasta yang bagus semakin eksis. Sebagai contoh SMK Patra dulu merupakan sekolah yayasan Pertamina dimana seluruh biaya operasional sekolah bersumber dari Pertamina, namun sekarang sekolah menarik iuran komite dari siswa dan Pertamina hanya memberikan bantuan yang bersifat insidental saja.

Permasalahan di provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 bahwa orangtua siswa dapat menyumbang pendanaan di sekolah adalah adanya larangan Gubernur kepada Kepala SMA dan SMK negeri untuk tidak memungut maupun meminta sumbangan dari orangtua siswa. Hal itu terkait dengan janji kampanye Gubernur untuk menyelenggarakan pendidikan gratis. Oleh karena itu, SMA dan SMK negeri di Kota Balikpapan tidak berani menerima sumbangan dari orangtua siswa. Larangan Gubernur tersebut dituangkan dalam peraturan daerah. Pada Pasal 55 dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 16 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa salah satu larangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik secara perseorangan maupun kolektif adalah melakukan pungutan kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembiayaan ditegaskan bahwa sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan terdiri atas APBN, APBD, dan sumber lain yang dianggap sah dan tidak mengikat. Mengingat orangtua siswa tidak ditulis secara eksplisit dan memang pendidikan gratis merupakan janji kampanye, Kepala SMA dan SMK negeri sudah diberitahukan dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa. Jika mereka melanggar ada kekhawatiran menerima sanksi. Adapun sanksi tersebut adalah sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 55 yang dituangkan dalam Pasal 70 Perda tersebut. Bentuk sanksi administratif tersebut meliputi:

- a. penghentian kegiatan yang dilarang;
- b. teguran/peringatan tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
- d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;

- e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, terutama Pasal 10 yang membolehkan sekolah menerima sumbangan dari orangtua siswa sepanjang sesuai peraturan, tidak diterapkan di Kalimantan Timur.

Di Kota Denpasar, Kepala SMKN 1 menjelaskan bahwa di sekolahnya ada sumbangan dan pungutan. Sumbangan sifatnya sukarela dan himbauan, sementara pungutan besarnya sama untuk semua siswa. Untuk siswa miskin diajukan Kartu Indonesia Pintar, setelah itu mereka dibebankan untuk membayar pungutan. SMAN 1 Denpasar memungut iuran siswa 500.000,-/siswa/bulan. Besarnya iuran tersebut didasarkan pada kesepakatan orangtua dan sekolah. Untuk sumbangan karena bersifat sukarela, harus dihitung per anak, dan bagi yang tidak mampu perlu diberikan keringanan. Guru tidak boleh banyak campur tangan. Namun ada kendala waktu untuk menggunakan dana partisipasi masyarakat berdasarkan rekening yang ada, karena pemanfaatan dana harus melalui rekanan. Kalau tidak sesuai dengan SOP tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada di aplikasi dan tidak dikategorikan “saberpungli” seperti yang dipahami masyarakat.

Sementara itu, untuk Kota Pekanbaru masih memperbolehkan sekolah untuk menarik iuran komite yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara sekolah dengan komite sekolah/orangtua siswa. Namun bagi siswa kurang mampu sekolah menyisihkan dana BOS untuk dapat membebaskan mereka dari iuran SPP sesuai dengan tujuan pemberian BOS. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi orangtua siswa mampu cukup besar dalam mendukung pembiayaan operasional sekolah.

#### **4. Masyarakat**

Kontribusi masyarakat dalam pendanaan biaya operasional sekolah pada umumnya diberikan oleh alumni sekolah yang bersangkutan dan masyarakat sekitar sekolah, baik perorangan maupun perusahaan atau lembaga. Namun demikian, bantuan yang diberikan umumnya bersifat insidental sesuai dengan kemauan pemberi bantuan. Sebagai contoh di Kabupaten Klaten bantuan yang diberikan alumni baru sebatas program orangtua asuh dan tali asih (beasiswa) untuk siswa tidak mampu di sekolah tertentu. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh Perusahaan untuk SMK Negeri adalah berupa bantuan mobil bekas untuk kegiatan praktik siswa. Ada bantuan juga berupa alat praktikum tetapi bekas (layak pakai) berupa mesin las. Ada juga bantuan berupa beasiswa. Sedangkan di SMK Swasta belum pernah ada bantuan CSR.

Sementara itu, di Kabupaten Gowa bantuan yang diperoleh dari alumni juga sama dengan di Kabupaten Klaten yaitu masih sebatas tali asih (beasiswa) untuk siswa tidak mampu di sekolah tertentu. Sedangkan bantuan dari perusahaan hanya sebatas kerjasama dengan perusahaan skala kecil yaitu penyediaan tempat prakerin khusus untuk siswa SMK.

Berbeda di Kota Pekanbaru dimana Disdik Provinsi sudah lebih aktif yaitu membentuk forum Komite Provinsi dalam upaya memperkuat peran dan posisi Komite SMA, SMK dan SLB sebagai mitra sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan SMA, SMK dan SLB. Forum komite dilantik oleh gubernur pada tanggal 2 Februari 2018 untuk masa kerja 2018 s.d 2021 dan beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan mau berkorban untuk pendidikan. Forum komite ini terdiri dari 295 komite se Kota Pekanbaru, 118 SMA Negeri se provinsi Riau, 17 SLBN se provinsi Riau dengan total keseluruhannya 430 komite. Di setiap komite terdapat 5-15 pengurus. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menjadi acuan utama. Forum Komite sudah diakui oleh Kemenkumham dan juga sudah bekerja sama antara lain dengan Tim Saber Pungli, Biro Hukum Kementerian, lembaga advokasi dan BNN. Forum Komite dimaksudkan juga sebagai induk yang menyamakan persepsi dan peran tentang Komite Sekolah dan masyarakat. Hal ini mengingat sudah berakarnya stigma pendidikan gratis untuk SMA dan SMK. Pembentukan forum komite ini sudah diketahui oleh semua sekolah yang terkait. Jika menghadapi berbagai

permasalahan terkait dengan komite sekolah, sekolah dapat berkonsultasi dengan forum komite.

Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh undang-undang. Kalau sekolah swasta semata-mata hanya cari keuntungan akan ditutup. Sekolah swasta perlu memperhitungkan *supply and demand*. Dinas tidak melarang perkembangan sekolah swasta, namun sekolah swasta perlu mempertimbangkan 3 hal berikut. i) Daya tampung sekolah negeri, dengan melakukan kajian; ii) berbagai hal terkait dengan guru; dan iii) fakta-fakta tentang pendanaan. Pemda Provinsi bisa memberikan bantuan atas dasar proposal, jadi semua sesuai dengan aturan. Sekolah swasta yang akan bertahan adalah sekolah yang bermutu, yaitu sekolah yang menyediakan berbagai macam menu yang dibutuhkan oleh siswanya.

Dalam rangka digulirkannya Wajar 12 tahun, apakah biaya ditanggung pemerintah? Kalau tidak solusinya bagaimana? Sudah ada Perda tentang Wajar 12 tahun di beberapa kabupaten/kota yang menyatakan pendidikan menengah harus gratis. Salah satu solusinya adalah bersinergi dengan paguyuban orangtua untuk mendukung, termasuk untuk kegiatan ekstrakurikuler, artinya dengan memperbesar partisipasi masyarakat. Untuk mengharapkan CSR tampaknya tidak mudah, meskipun sudah ada yang berhasil seperti sekolah yang dimiliki oleh nara sumber yang mendapat voucher sembako dari perusahaan Duta Palma. tampaknya yang dipentingkan oleh perusahaan yang bersedia menyumbang atau memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan, meskipun tidak secara rutin adalah sikap saling percaya.

Di Kota Balikpapan, terkait dengan sumbangan, kantor pemerintah kota mau memberi/menghibahkan lunit engine ke SMKN 1 tidak berani, karena khawatir tidak sesuai prosedur. Dengan status menghibahkan perlu dilakukan proses penghapusan yang sulit dilakukan, sehingga masih tercatat di data aset Pemkot. Sementara SMKN 5 pernah menerima mesin-mesin bekas dan digunakan untuk praktek bongkar pasang oleh siswa.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Profil Sekolah Sampel**

**S**ekolah sampel dalam studi ini terdiri atas 20 SMA dan 30 SMK. Dari 20 SMA sampel hanya 12 SMA yang memiliki data relatif lengkap dengan variasi satuan BONP yang cukup tinggi, yang terdiri atas 7 SMA Negeri dan 5 SMA Swasta. Sedangkan untuk sampel SMK, dari 30 SMK sampel hanya 11 SMK yang memiliki data relatif lengkap. Satuan BONP SMA Sampel bervariasi dari yang terendah Rp535.000,- persiswa/tahun di SMA Islam Terpadu Ibnu Abbas Klaten sampai dengan Rp4.093.000,- persiswa/bulan di SMA Swasta Muhammadiyah Bangkinang. Namun bila dikelompokkan menurut status sekolah, satuan BONP di SMA Negeri berkisar antara Rp. 594.000,- s.d. Rp. 3.978.000,- persiswa/tahun. Sedangkan untuk SMA Swasta berkisar antara Rp535.000,- s.d. Rp4.093.000,- persiswa/tahun.

Sementara itu, Satuan BONP SMK Sampel bervariasi dari yang terendah Rp845.000,- persiswa/tahun di SMK Taruna Satria Pekanbaru sampai dengan Rp4.429.000,-,- persiswa perbulan di SMK Negeri 1 Balikpapan. Bila dikelompokkan menurut status sekolah, satuan BONP di SMK Negeri berkisar antara Rp1.602.000,-,- s.d. Rp4.429.000,-,- persiswa/tahun di SMKN 1 Trucuk Klaten dan di SMK Negeri 1 Balikpapan. Sedangkan untuk SMK

Swasta berkisar antara Rp845.000,-,- s.d Rp2.845.000,- persiswa/tahun di SMK Taruna Satria Pekanbaru dan di SMK Krisda Klaten.

Besarnya BONP SMA dan SMK sampel baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh jenis dan jumlah layanan pendidikan yang diberikan, lokasi sekolah dan besar kecilnya sekolah dilihat dari sisi jumlah siswa di tiap-tiap sekolah sampel.

## **2. Kebutuhan BONP**

Kondisi BONP di semua SMA sampel tidak dapat dijadikan acuan untuk menggeneralisasi BONP di seluruh SMA karena kebutuhan BONP di tiap-tiap sekolah dipengaruhi oleh kebutuhan riil BONP di sekolah, status sekolah (negeri/swasta), dan kebijakan Pemda Provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah di daerahnya. Begitu pula halnya dengan BONP di SMK sampel tidak menunjukkan pola yang jelas. Pemanfaatan biaya operasional sangat bervariasi antar sekolah. Variasi pemanfaatan biaya operasional tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain jumlah KK yang diajarkan, jenis dan jumlah aset yang dimiliki sekolah, serta jenis dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

Besaran BONP di tiap sekolah sampel baik di SMA maupun di SMK secara umum tidak dapat digeneralisasi mengingat adanya keterbatasan jumlah sampel yang kurang mewakili kondisi di SMA dan SMK di Indonesia yang memiliki keragaman wilayah dan keragaman kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Selain itu, dalam mengisi instrumen

daftar isian tentang komponen dan sub komponen BONP, ada kecenderungan sekolah kurang tepat dalam mengelompokkan tambahan komponen biaya operasional yang baru, yang pada saat penyusunan Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 belum ada, sehingga mengakibatkan tambahan komponen BONP yang baru tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan. Sebagai contoh, komponen biaya yang ditambahkan tersebut merupakan komponen biaya investasi atau biaya operasional personalia sehingga tidak tepat bila ditambahkan sebagai tambahan komponen BONP. Oleh karena itu, data BONP dari SMA dan SMK sampel tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penghitungan BONP yang baru.

### **3. Kebutuhan BONP Wajar 12 tahun**

Berdasarkan proyeksi kebutuhan BONP SMA untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun 5 tahun ke depan sejak tahun ajaran 2019/2020 s.d. tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2019/2020 dibutuhkan dana sebesar Rp7.536 triliun sementara dana yang selama ini dapat diberikan oleh pemerintah melalui BOS adalah sebesar Rp7.045 triliun sehingga ada kekurangan dana sebesar Rp491 milyar. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, bila pemerintah akan menyelenggarakan Wajar 12 tahun berarti adanya kekurangan dana tersebut perlu dicarikan solusinya.

Sementara itu, besaran proyeksi BONP SMK yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun 2019/2020 adalah sebesar Rp14.532 triliun, sementara dana yang

diberikan Pemerintah Pusat selama ini melalui BOS adalah sebesar Rp7.613 triliun sehingga ada kekurangan sebesar Rp6.919 triliun. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Kekurangan ini jumlahnya cukup besar sehingga perlu dicarikan solusi bagaimana kekurangan dana tersebut bisa terpenuhi.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan BONP SMA dan SMK, total kebutuhan dana untuk membiayai BONP SMA dan SMK pada tahun 2019/2020 adalah sebesar Rp22.067 triliun yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dibandingkan dengan ketersediaan dana yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui BOS yaitu sebesar Rp13.963 triliun maka pada tahun 2019/2020 terdapat kesenjangan kebutuhan dana untuk BONP SMA dan SMK yaitu sebesar Rp7.410 triliun. Agar kebutuhan dana untuk membiayai BONP SMA dan SMK tersebut dapat terpenuhi maka perlu dilakukan strategi penggalian dana yang masih potensial, baik dari pemerintah, orangtua, maupun masyarakat luas.

#### **4. Strategi Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Bermutu**

##### **a. Pemerintah Pusat**

Terkait dengan berbagai permasalahan yang bervariasi di kabupaten/kota sampel dimana Nampak bahwa BOS cukup dominan sebagai sumber pendanaan BONP di sekolah, maka sudah seyogyanya Pemerintah Pusat perlu meningkatkan besaran dana BOS yang sampai sekarang masih Rp1.400.000,- per siswa per tahun. Berdasarkan

proyeksi kebutuhan BONP memperlihatkan adanya kenaikan BONP setiap tahunnya yang disesuaikan dengan laju inflasi pada tahun sebelumnya. Selain mempertimbangkan laju inflasi, Pemerintah Pusat dapat pula meningkatkan satuan BONP bila penerimaan negara meningkat. Upaya meningkatkan besaran dana BOS ini kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat usulan dari pemerintah untuk meningkatkan dana BOS memerlukan kesepakatan dan persetujuan dari DPR.

#### **b. Pemerintah Daerah Provinsi**

Adanya berbagai kondisi pendanaan biaya operasional sekolah di kabupaten/kota sampel yang memperlihatkan ada Pemda Provinsi yang sudah berkontribusi, tetapi juga ada Pemda Provinsi yang sama sekali belum berkontribusi dalam pendanaan BONP. Pemerintah daerah provinsi sebagai pengelola dan penanggungjawab pendidikan menengah sudah seharusnya berkontribusi dalam pendanaan BONP. Besaran biaya satuan bantuan tersebut disesuaikan dengan besarnya kebutuhan BONP di sekolah dan kemampuan dana yang dimiliki Pemda Provinsi. Agar hal ini dapat terpenuhi, harus ada komitmen Pemda Provinsi untuk berkontribusi sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam pengelolaan pendidikan menengah. Dalam hal ini Pemda Provinsi dapat bersinergi dengan lembaga/perorangan yang potensial untuk menjadi sumber pendanaan BONP di sekolah.

### **c. Orangtua Siswa**

Penyelenggaraan Wajar 12 tahun mengharuskan semua anak lulusan SMP berusia 16 s.d. 18 tahun mengikuti jenjang pendidikan menengah. Pemerintah berkewajiban untuk membiayainya, sehingga siswa tidak mampu tetap mendapatkan layanan pendidikan menengah. Sejauh ini, dana BOS dari Pemerintah Pusat sebagian dimanfaatkan sekolah untuk membebaskan siswa tidak mampu dari iuran sekolah. Namun lain halnya bagi orangtua siswa mampu, sebaiknya mereka dihimbau untuk tetap membiayai anaknya dengan membayar iuran sekolah untuk memenuhi kebutuhan BONP. Himbauan pada orangtua siswa untuk berkontribusi dalam membiayai pendidikan anaknya harus dilakukan secara terus-menerus baik melalui media maupun sosialisasi dari sekolah. Pada dasarnya orangtua siswa yang memiliki aspirasi pendidikan yang baik cenderung tidak berkeberatan bahkan sangat bersemangat untuk terlibat dalam pembiayaan pendidikan anaknya.

### **d. Masyarakat**

Masyarakat yang selama ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang potensial antara lain: alumni dan perusahaan melalui CSR. Keterlibatan alumni dalam pendanaan di sekolah bersifat insidental dan kurang dapat diandalkan secara rutin. Lain halnya dengan CSR. Dalam hal menggali potensi CSR untuk mendanai kebutuhan BONP di sekolah sangat dimungkinkan mengingat Pemerintah memiliki kewenangan dalam pemberian izin operasi perusahaan dan mengatur bagian keuntungan perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap kondisi lingkungannya. Dalam hal ini Pemerintah

baik Pusat maupun Daerah dapat menetapkan aturan kontribusi secara rutin dari dana CSR untuk pendanaan pendidikan menengah di wilayah operasi perusahaan.

## **B. Opsi Kebijakan**

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan Wajar 12 tahun perlu adanya sinergi dari semua sumber dana yang dinilai potensial seperti yang telah disampaikan di atas. Sinergi antar sumber dana ini hanya bisa dilakukan bila ada aturan yang jelas dan mengikat, sehingga keberlangsungan pendanaan dari semua sumber tersebut dapat diandalkan. Lembaga yang perlu membuat aturan terkait penggalan dana tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat membuat aturan untuk Pemerintah Pusat sendiri, Pemerintah Daerah, Perusahaan potensial, dan orangtua siswa. Peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat wajib ditindaklanjuti oleh Pemda Provinsi yang mengatur pemerintah daerah provinsi sendiri, sekolah, orangtua, dan masyarakat.

### **1. Pemerintah Pusat**

- a. Mengatur besaran BOS yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan BONP dan meningkat setiap tahunnya menurut karakteristik wilayah.
- b. Mengatur pembagian tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam pendanaan BONP yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Pemda Provinsi.

- c. Mengatur kontribusi orangtua mampu dalam pendanaan BONP dan mensosialisasikannya secara terus menerus sehingga mengubah pola pikir masyarakat/orangtua siswa terkait tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak.
- d. Mengatur kerjasama dengan Perusahaan nasional dan multinasional dalam mengalokasikan persentase tertentu dari CSR untuk mendanai BONP di pendidikan menengah. Dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **2. Pemerintah Provinsi**

- a. Pemda Provinsi menindaklanjuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penggalangan dana baik untuk Pemda Provinsi sendiri maupun untuk orangtua dan CSR perusahaan yang ada di wilayah provinsi.
- b. Pemda Provinsi mengatur kewajiban perusahaan lokal dalam mengalokasikan persentase tertentu dari CSR untuk mendanai BONP di pendidikan menengah di wilayahnya. Dalam hal ini ditetapkan melalui peraturan daerah.
- c. Menindaklanjuti peraturan tentang kontribusi orangtua dalam pendanaan BONP dan mensosialisasikannya secara terus-menerus sehingga mengubah pola pikir masyarakat/orangtua siswa terkait tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)*. (2013, February). <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice>. Accessed April 12, 2017.
- Fatah, Nanang. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/DD5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 -2019. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usaha Kecil Website*. September 25, 2008. [http://www.usaha-kecil.com/pengertian\\_csr.html](http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html) accessed February 25, 2017.
- Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 -2019. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Review of National Policies for Education, Education in Indonesia Rising to The Challenge*. (2015)., from <http://www.adb.org>. Retrieved April 12, 2017
- Suharsaputra, Uhar. (2013). *Administrasi Pendidikan*, 288. Bandung: Refika Aditama.

Lampiran 1. BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMK MENURUT KOMPETENSI KEAHLIAN TAHUN 2018

Hasil perhitungan BONP di SMK dengan harga Tahun 2018, sebagai berikut.  
(dalam 000, - rupiah)

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian (3)	per Rombongan Belajar (4)	per Peserta Didik (5)
(1)	(2)			
1	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	417.451	69.575	2.174
2	Konstruksi jalan, Irigasi dan jembatan	427.017	71.170	2.224
3	Bisnis Konstruksi dan Property	418.309	69.718	2.179
4	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	396.712	66.119	2.066
5	Teknik Geomatika dan Geospasial	404.089	67.348	2.105
6	Teknik Geomatika dan Informasi Geospasial	404.089	67.348	2.105
7	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	449.973	74.996	2.344
8	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	394.019	65.670	2.052

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
9	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	449.973	74.996	2.344
10	Teknik Otomasi Industri	400.486	66.748	2.086
11	Teknik Pendingin dan Tata Udara	404.499	67.417	2.107
12	Teknik Tenaga Listrik	376.521	62.754	1.961
13	Teknik Pemesinan	466.248	77.708	2.428
14	Teknik Pengelasan	454.865	75.811	2.369
19	Teknik Pengecoran Logam	394.688	65.781	2.056
16	Teknik Mekanik Industri	418.856	69.809	2.182
17	Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	396.712	66.119	2.066
18	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	419.885	69.981	2.187
19	Teknik Airframe & Power Plant	493.445	82.241	2.570
20	Aircraft Machining	465.915	77.653	2.427
21	Aircraft Sheet Metal Forming	465.915	77.653	2.427

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
22	Airframe Mechanic	465.915	77.653	2.427
23	Aircraft Electricity	402.428	67.071	2.096
24	Aviation Electronics	402.428	67.071	2.096
25	Electric Avionics	402.428	67.071	2.096
26	Desain Grafika	402.428	67.071	2.096
27	Produksi Grafika	402.428	67.071	2.096
28	Teknik Instrumentasi Logam	603.478	100.580	3.143
29	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	598.578	99.763	3.118
30	Teknik Pengendalian Produksi	598.578	99.763	3.118
31	Teknik Logistik	598.578	99.763	3.118
32	Teknik Pemintalan Serat Buatan	698.411	116.402	3.638
33	Teknik Pembuatan Benang	698.411	116.402	3.638
34	Teknik Pembuatan Kain	620.268	103.378	3.231

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
35	Teknik Penyempurnaan Tekstil	620.268	103.378	3.231
36	Analisis Pengujian Laboratorium	617.213	102.869	3.215
37	Kimia Industri	617.213	102.869	3.215
38	Kimia Analisis	606.294	101.049	3.158
39	Kimia Tekstil	623.268	103.878	3.246
40	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	418.856	69.809	2.182
41	Teknik dan Bisnis Speda Motor	418.856	69.809	2.182
42	Teknik Alat Berat	418.856	69.809	2.182
43	Teknik Bodi Otomotif	418.856	69.809	2.182
44	Teknik Ototronik	629.914	104.986	3.281
45	Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	629.914	104.986	3.281
46	Otomotif Daya dan Konversi	629.914	104.986	3.281
47	Konstruksi Kapal Baja	454.865	75.811	2.369

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
48	Konstruksi Kapal Non Baja	454.865	75.811	2.369
49	Teknik Pemesinan Kapal	454.865	75.811	2.369
50	Teknik Pengelasan Kapal	454.865	75.811	2.369
51	Teknik Kelistrikan Kapal	608.684	101.447	3.170
52	Desain Rancang Bangun Kapal	396.712	66.119	2.066
53	Interior Kapal	641.019	106.837	3.339
54	Teknik Audio Video	402.428	67.071	2.096
55	Teknik Elektronika Industri	402.428	67.071	2.096
56	Teknik Mekatronika	603.478	100.580	3.143
57	KK Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	598.578	99.763	3.118
58	Instrumentasi Medik	617.213	102.869	3.215
59	Teknik Produksi Minyak dan Gas	599.108	99.851	3.120
60	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	599.108	99.851	3.120

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
61	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	599.108	99.851	3.120
62	Geologi Pertambangan	599.108	99.851	3.120
63	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	599.108	99.851	3.120
64	Teknik Energi Bioma	599.108	99.851	3.120
65	Rekayasa Perangkat Lunak	407.581	67.930	2.123
66	Teknik Komputer Jaringan	391.836	65.306	2.041
67	Multimedia	599.960	99.993	3.125
68	Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi	407.581	67.930	2.123
69	Teknik Transmisi Telekomunikasi	600.837	100.140	3.129
70	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	568.501	94.750	2.961
71	Asisten Keperawatan	515.381	85.897	2.684
72	Dental Asisten	606.294	101.049	3.158
73	Teknologi Laboratorium Medik	606.294	101.049	3.158

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
74	Farmasi Klinis dan Komunitas	606.294	101.049	3.158
75	Farmasi Industri	606.294	101.049	3.158
76	Social Care (Keperawatan Sosial)	455.762	75.960	2.374
77	Caregiver	455.762	75.960	2.374
78	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	542.878	90.480	2.827
79	Agribisnis Tanaman Perkebunan	490.137	81.690	2.553
80	Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	542.878	90.480	2.827
81	Lanskap dan Pertanian	484.434	80.739	2.523
82	Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	490.137	81.690	2.553
83	Agribisnis Organik Ekologi	542.878	90.480	2.827
84	Agribisnis Ternak Ruminansia	541.401	90.234	2.820
85	Agribisnis Ternak Unggas	506.680	84.447	2.639
86	Industri Peternakan	506.680	84.447	2.639

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
87	Keperawatan Hewan	506.680	84.447	2.639
88	Kesehatan dan Reproduksi Hewan	506.680	84.447	2.639
89	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	506.680	84.447	2.639
90	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	506.680	84.447	2.639
91	Agroindustri	506.680	84.447	2.639
92	Alat Mesin Pertanian	506.680	84.447	2.639
93	Otomatisasi Pertanian	506.680	84.447	2.639
94	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	506.680	84.447	2.639
95	Teknik Konservasi Sumber Daya	506.680	84.447	2.639
96	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	506.680	84.447	2.639
97	Teknologi Produksi Hasil Hutan	506.680	84.447	2.639
98	PK Teknik Nautika Kapal Penangkap Ikan	417.932	69.655	2.177
99	Teknika Kapal Kapal Penangkap Ikan	401.552	66.925	2.091

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
100	Nautika Kapal Niaga	409.964	68.327	2.135
101	Teknika Kapal Niaga	401.552	66.925	2.091
102	Agribisnis Perikanan air Tawar	575.660	95.943	2.998
103	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	575.660	95.943	2.998
104	Agribisnis Ikan Hias	575.660	95.943	2.998
105	Agribisnis Rumpuk Laut	575.660	95.943	2.998
106	Industri Perikanan Laut	575.660	95.943	2.998
107	Agribisnis Hasil PerikananPengolahan Hasil Perikanan	575.660	95.943	2.998
108	Bisnis Daring dan Pemasaran	479.530	79.922	2.498
109	Retail	479.530	79.922	2.498
110	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	479.530	79.922	2.498
111	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	479.530	79.922	2.498
112	Perbankan dan Keuangan Lembaga	479.530	79.922	2.498

No.	Kompetensi Keahlian	Biaya Operasional nonpersonalia		
		per Program Keahlian	per Rombongan Belajar	per Peserta Didik
113	Perbankan Syariah	479.530	79.922	2.498
114	Teknik Manajemen Logistik	598.578	99.763	3.118
115	Usaha Perjalanan Wisata	455.762	75.960	2.374
116	Perhotelan	498.544	83.091	2.597
117	Wisata Bahari dan ekowisata	455.762	75.960	2.374
118	Hotel dan Restoran	504.675	84.113	2.629
119	Tata Boga	501.611	83.602	2.613
120	Kecantikan Kulit dan Rambut	649.041	108.174	3.380
121	Spa and Beauty Therapy	536.305	89.384	2.793
122	Tata Busana	492.411	82.069	2.565
123	Desain Fesyen	492.411	82.069	2.565
124	Seni Lukis	512.135	85.356	2.667
125	Seni Patung	517.838	86.306	2.697







Laporan hasil penelitian dengan judul Pendanaan Pendidikan: Strategi Pendanaan Pendidikan Menengah Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun disusun untuk menghitung kebutuhan Biaya Operasi Nonpersonalia (BONP) pada jenjang pendidikan menengah. Dalam hal mendanai penyelenggaraan Wajar 12 tahun perlu adanya sinergi dari semua sumber dana yang dinilai potensial. Berdasarkan hasil kajian diperoleh proyeksi besaran kebutuhan BONP pendidikan menengah dalam rangka penyelenggaraan Wajar 12 tahun untuk 5 tahun ke depan, sejak tahun 2019 s.d. 2023, serta opsi kebijakan dalam rangka mendanai kebutuhan biaya tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *stakeholders* pendidikan dalam mendanai penyelenggaraan Wajar 12 tahun, khususnya BONP pada jenjang pendidikan menengah.

